



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KAJIAN FISKAL REGIONAL

Kalimantan Selatan

TRIWULAN I TAHUN 2025





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KAJIAN FISKAL REGIONAL

Kalimantan Selatan

TRIWULAN I TAHUN 2025

Kajian Fiskal Regional merupakan hasil telaah makro atas pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kanwil DJPb sebagai *Regional Chief Economist* untuk mengkaji keterkaitan antara implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian output dan *outcome* yang terwujud dalam indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan **Kajian Fiskal Regional Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2025** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk kontribusi dalam memperkuat pemahaman dan pemantauan terhadap dinamika fiskal dan ekonomi daerah, serta sebagai landasan dalam merumuskan respons kebijakan yang tepat terhadap tantangan pengelolaan fiskal di tingkat regional.

Laporan ini memuat analisis komprehensif mengenai perkembangan ekonomi daerah, kondisi keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta kajian tematik yang difokuskan pada perkembangan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan. Di samping itu, laporan ini juga menyajikan rumusan *policy responses* yang diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan fiskal yang efektif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Dalam penyusunan laporan ini, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan banyak memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak. Atas seluruh bantuan dan kerja sama tersebut, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harapan kami, hubungan kemitraan yang terjalin baik selama ini dapat terus terjaga dan meningkat pada masa yang akan datang.

Kami juga mengharapkan masukan dan saran untuk lebih meningkatkan kualitas kajian agar dapat memberikan manfaat yang maksimal. Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah selalu memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya bagi Kalimantan Selatan tercinta.

Banjarmasin, 31 Mei 2025
Kepala Kantor Wilayah



Syafriadi



SYAFRIADI

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel

TIM PENYUSUN

Pengarah

Syafriadi

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

Local Expert

Prof. Muhammad Handry Imansyah, M.A.M., Ph.D.

Guru Besar FEB Universitas Lambung Mangkurat

Ketua Tim

Juanda

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Tim Penyusun

Arif Budi Rahman

Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A

Shasza Yemima Puteri Atmodjo

Sonnie Wahyu Dewantoro

Anggota Tim

Bekti Hendri Atmoko

Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B

Achmad Fajar Setiawan

Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C

Chandra Julihandono Sj

APN Ahli Muda

Faralisa Almadia

Ahmad Ruhyat Firdaus

Desain Grafis

Shasza Yemima Puteri Atmodjo

KAJIAN FISKAL REGIONAL

Kalimantan Selatan

TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB
01

Analisis Ekonomi Regional

BAB
02

Analisis Fiskal Regional

BAB
03

Analisis Tematik: *"Analisis atas Peran dan Strategi Pengembangan Koperasi di Daerah"*

BAB
04

Kesimpulan dan Rekomendasi

KORESPONDENSI

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. D.I. Panjaitan No. 24, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114



(0511) 3354224



ppaiikasel@gmail.com

DAFTAR ISI

List Of Contents.

1. BAB 01 ANALISIS EKONOMI REGIONAL	7
1.1 Analisis Indikator Makro Ekonomi.....	1
1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto	3
1.1.2 Inflasi	7
1.1.3 Neraca Perdagangan	10
1.2 Analisis Indikator Kesejahteraan	11
1.2.1 Tingkat Kemiskinan.....	11
1.2.2 Tingkat Pengangguran.....	13
1.2.3 Ketimpangan (Rasio Gini).....	14
1.2.4 Nilai Tukar Petani (NTP)	15
1.2.5 Nilai Tukar Nelayan (NTN)	16
1.2.6 Perbandingan NTP dan NTN di Regional Kalimantan	17
1.2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	19
2. BAB 02 ANALISIS EKONOMI REGIONAL.....	22
2.1. Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi.....	22
2.2.1 Pendapatan Negara.....	23
2.2.2 Belanja Negara	31
2.2.3 Surplus/Defisit APBN.....	41
2.2. Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi	42
2.3.1 Pendapatan Daerah.....	43
2.3.2 Belanja Daerah	49
2.3.3 Surplus/ Defisit APBD.....	54
2.3.4 Pembiayaan Daerah	54
2.3.5 Prognosis / Outlook Kinerja APBD di Kalimantan Selatan	55
2.3.6 Rekomendasi Kebijakan APBD.....	55
2.3. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian Tahunan 2024	56
2.3.1 Pendapatan Negara Konsolidasian.....	57
2.3.2 Belanja Negara Konsolidasian	57
2.3.3 Analisis Surplus / Defisit Konsolidasian	57
2.3.4 Analisis Pembiayaan Konsolidasian.....	58
2.4. Progres Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).....	58



3. BAB 03 ANALISIS TEMATIK: ANALISIS ATAS PERAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI DAERAH DI WILAYAH KALSEL	59
3.1. Pendahuluan	59
3.2. Pembahasan	60
3.1.1. Perkembangan Kondisi Koperasi di Kalimantan Selatan.....	60
3.1.2. Dukungan Pemerintah Untuk Pengembangan Koperasi	67
3.1.3. Tantangan Dalam Pengembangan Koperasi di Daerah	71
3.1.4. Strategi Pengembangan Koperasi di Kalsel	76
3.1.5. Potensi Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan.....	82
4. BAB 04 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	85
4.1. Kesimpulan	85
4.1.1. Analisis Ekonomi Regional	85
4.1.2. Analisis Fiskal Regional.....	85
4.1.3. Analisis Tematik: Koperasi.....	86
4.2. Rekomendasi.....	87
4.2.1. Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat.....	87
4.2.2. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah	90

DAFTAR GRAFIK

List Of Graphs.

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan (yoy%)	3
Grafik 1.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi	3
Grafik 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan (yoy%)	3
Grafik 1.4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Regional Kalimantan Selatan (ctc%)	4
Grafik 1.5 PDRB Kalimantan Selatan.....	4
Grafik 1.6 Struktur PDRB Kalimantan Selatan Menurut Komponen Pengeluaran	5
Grafik 1.7 Struktur PDRB Kalimantan Selatan Menurut Komponen Lapangan Usaha	5
Grafik 1.8 Aliran Kas ke C, I, dan G di Kalimantan Selatan	6
Grafik 1.9 Inflasi Kalimantan Selatan (yoy%)	7
Grafik 1.10 Inflasi Kalimantan Selatan (mtm%)	7
Grafik 1.11 Surplus Neraca Perdagangan	10
Grafik 1.12 Jumlah dan Persentase Kemiskinan	11
Grafik 1.13 Tingkat Pengangguran di Kalimantan Selatan (%)	13
Grafik 1.14 Penduduk yang Bekerja Menurut.....	13
Grafik 1.15 Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini).....	14
Grafik 1.16 Perbandingan Gini Ratio Regional Kalimantan	14
Grafik 1.17 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kalimantan Selatan.....	16
Grafik 1.18 Perkembangan Nilai Tukar Nelayan Kalimantan Selatan	17
Grafik 1.19 Perbandingan Nilai Tukar Petani	17
Grafik 1.20 Perbandingan Nilai Tukar Nelayan	18
Grafik 1.21 Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Selatan	19
Grafik 1.22 Perbandingan IPM Regional Kalimantan	20
Grafik 2.1 Analisis Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri.....	24
Grafik 2.2 Analisis Pertumbuhan Penerimaan Kepabeanaan	25
Grafik 2.3 Tax Ratio APBN Kalimantan Selatan	26
Grafik 2.4 Analisis Pertumbuhan PNBPN	28
Grafik 2.5 Trendline Prognosis Kinerja Penerimaan Negara Kalimantan Selatan.....	29
Grafik 2.6 Analisis Pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat	31
Grafik 2.7 Analisis Kontribusi BPP terhadap PDRB.....	33
Grafik 2.8 Grafik Belanja Pemerintah Pusat Per Kapita	34
Grafik 2.9 Analisis Pertumbuhan Transfer ke Daerah	37
Grafik 2.10 Trendline Prognosis Kinerja Belanja Negara Kalimantan Selatan	40
Grafik 2.11 Perkembangan Defisit APBN Kalimantan Selatan	41
Grafik 2.12 Analisis Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.....	44
Grafik 2.13 Analisis Pertumbuhan Pendapatan Transfer per Komponen.....	46
Grafik 2.14 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah per Komponen.....	47
Grafik 2.15 Tax Ratio APBD Kalimantan Selatan.....	47
Grafik 2.16 Rasio Kemandirian Daerah se-Kalsel.....	48



Grafik 2.17 Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah	49
Grafik 2.18 Analisis Pertumbuhan Belanja Operasi	51
Grafik 2.19 Analisis Pertumbuhan Belanja Transfer	52
Grafik 2.20 Analisis Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB	53
Grafik 2.21 Analisis Belanja Daerah per Kapita	53
Grafik 2.22 Perkembangan Surplus APBD Kalimantan Selatan	54
Grafik 3.1 Perkembangan Jumlah Koperasi di	61
Grafik 3.2 Jumlah Tenaga Kerja Koperasi di	63
Grafik 3.3 Perkembangan Aset Koperasi di Kalimantan Selatan (Miliar Rp)	64
Grafik 3.4 Jumlah Usaha koperasi di Kalimantan Selatan	66
Grafik 3.5 Dukungan APBN Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi (Miliar Rp)	67
Grafik 3.6 Dukungan DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (PK2UMK)	68
Grafik 3.7 Dukungan APBD untuk Koperasi	69



DAFTAR TABEL

List Of Tables.

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Inflasi di	9
Tabel 1.2 Perkembangan IPM Kalimantan Selatan	20
Tabel 2.1 I-Account APBN Kalimantan Selatan (Triwulan I)	22
Tabel 2.2 Rincian Pendapatan Perpajakan Per Komponen	23
Tabel 2.3 Realisasi dan Kontribusi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Sektoral	25
Tabel 2.4 Rincian PNBPN per Komponen	27
Tabel 2.5 Analisis Pertumbuhan Kinerja PNBPN BLU	29
Tabel 2.6 Prognosis Kinerja APBN Kalimantan Selatan	29
Tabel 2.7 Rincian Belanja Pemerintah Pusat Per Komponen	31
Tabel 2.8 Belanja Pemerintah Pusat per K/L.....	32
Tabel 2.9 Capaian Output Bidang Infrastruktur.....	35
Tabel 2.10 Capaian Output Bidang Pendidikan	35
Tabel 2.11 Capaian Output Bidang Kesehatan.....	36
Tabel 2.12 Rincian Transfer ke Daerah per Komponen	37
Tabel 2.13 Belanja Negara Per Fungsi	39
Tabel 2.14-I-Account APBD Kalimantan Selatan	43
Tabel 2.15 Rincian Pendapatan Daerah per Komponen	43
Tabel 2.16 Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah.....	44
Tabel 2.17 Rincian Pendapatan Asli Daerah per Kab/Kota	45
Tabel 2.18 Rincian Belanja Daerah per Komponen.....	49
Tabel 2.19 Kontribusi Komponen Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah	50
Tabel 2.20 Belanja Daerah per Fungsi.....	53
Tabel 2.21 Prognosis Kinerja APBD Kalimantan Selatan.....	55
Tabel 2.22 LRA Konsolidasi Kalimantan Selatan	56
Tabel 2.23 Harga Pangan di Kalimantan Selatan	59
Tabel 3.1 Perkembangan Kinerja Koperasi Periode 2021-2024 Provinsi Kalimantan Selatan (dalam Unit).....	60



*Our mind is capable of passing beyond the dividing line
we have drawn for it. Beyond the pairs of opposites of
which the world consists, other, new insights begin.*



Hermann Hess



Selayang Pandang



Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel)

merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berada di pulau Kalimantan. Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kota Banjarbaru sejak tanggal 16 Maret 2022 menggantikan Kota Banjarmasin. Secara geografis, provinsi yang memiliki semboyan "Waja Sampai Kaputing" ini berada di bagian tenggara pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di tengah.

Berikut batas wilayah Kalimantan Selatan:

- Barat: Provinsi Kalimantan Tengah
- Timur: Selat Makassar
- Selatan : Laut Jawa
- Utara: Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 14 Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, yaitu sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan



Pemerintah Kab. Tanah Laut



Pemerintah Kab. Tabalong



Pemerintah Kota Banjarmasin



Pemerintah Kab. Tapin



Pemerintah Kab. Balangan



Pemerintah Kota Banjarbaru



Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan



Pemerintah Kab. Tanah Bumbu



Pemerintah Kab. Banjar



Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah



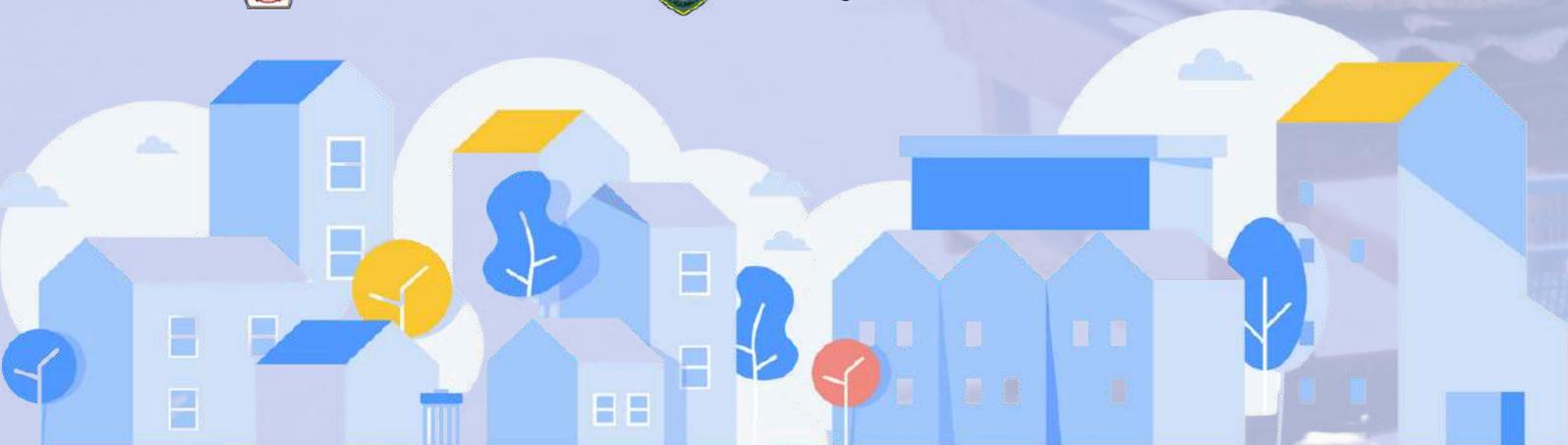
Pemerintah Kab. Kotabaru



Pemerintah Kab. Barito Kuala



Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara



PERKEMBANGAN PROGRAM "Makan Bergizi Gratis" (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) s.d. 22 Mei 2025



13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 10 Kabupaten/Kota

Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kab. Banjar, Kab. Tanah Laut, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Selatan, , Kab. Balangan, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Kotabaru



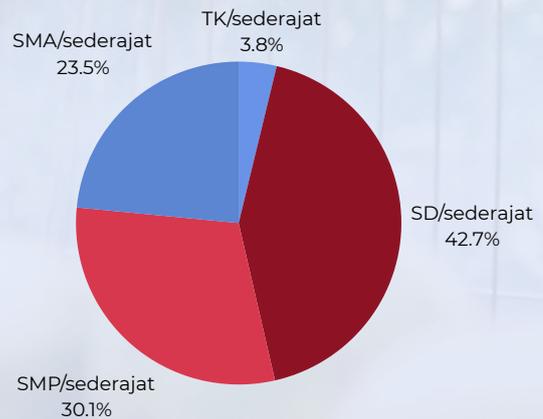
33.915 penerima manfaat

- 1.276 peserta didik jenjang TK/ sederajat
- 14.465 peserta didik jenjang SD/ sederajat
- 10.218 peserta didik jenjang SMP/ sederajat
- 7.956 peserta didik jenjang SMA/ sederajat

Target Penyaluran Program MBG di Kalimantan Selatan

963.320 penerima manfaat

- Total target penerima MBG terkini di Kalsel adalah sebanyak 963.320. Sampai dengan 22 Mei 2025, di Kalsel terdapat 13 SPPG dengan 33.915 penerima
- Apabila 1 SPPG akan menyalurkan MBG kepada 3.000 penerima, maka masih dibutuhkan kurang lebih 304 SPPG/Dapur tambahan di Kalsel



Data Penyaluran Program MBG di Kalsel per Kab/Kota



KINERJA PEREKONOMIAN

PEREKONOMIAN

INDIKATOR MAKRO EKONOMI

PERIODE TRIWULAN I 2025

PERTUMBUHAN EKONOMI



Y-on-Y **4,81%**

Q-to-Q **-5,48%**

C-to-C **4,81%**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PDRB ADHB

Rp70,86 triliun

PDRB ADHK

Rp38,24 triliun

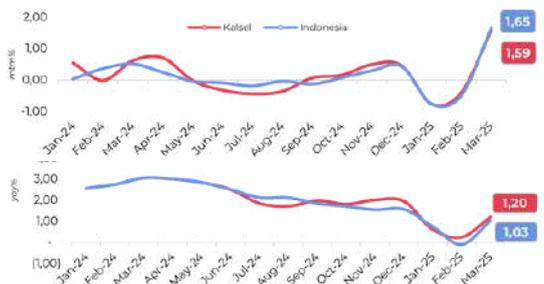
PDRB LAPANGAN USAHA

5 Lapangan Usaha dengan Share PDRB Terbesar



TINGKAT INFLASI

PERIODE MARET 2024



M-to-M **1,59%**

Y-on-Y **1,20%**

Y-to-D **0,43%**

INFLASI DI 5 KAB/KOTA yoy%



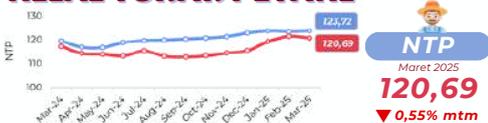
KONTRIBUTOR INFLASI / DEFLASI yoy%



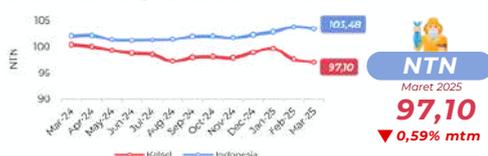
INDIKATOR KESEJAHTERAAN

PERIODE TRIWULAN I 2025

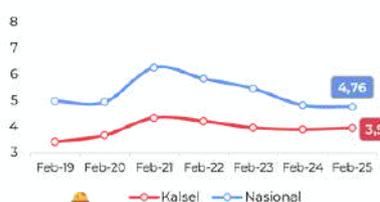
NILAI TUKAR PETANI



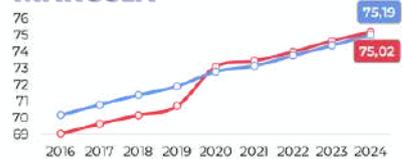
NILAI TUKAR NELAYAN



TINGKAT PENGANGGURAN



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



TINGKAT KEMISKINAN

September 2024

4,02%
180,2 ribu jiwa

Pedesaan **4,46%**
Perkotaan **3,59%**



TINGKAT KETIMPANGAN

September 2024

0,298

Pedesaan **0,259**
Perkotaan **0,326**



KINERJA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT



Jumlah Debitur **+18,10% yoy**

19.187 Debitur

Jumlah Penyaluran **+21,71% yoy**

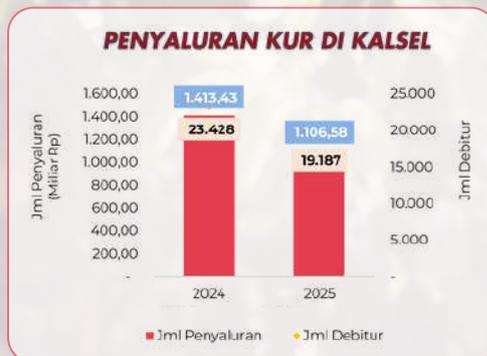
Rp1,11 Triliun

KUR tersalur Rp1,11 T (19,43% dari target Rp5,69 T)

kepada 19.187 debitur oleh 10 Bank dan 1 LKBB Penyalur.

Realisasi tersebut menurun dibandingkan Maret 2024 dengan *negative growth* sebesar -21,71%.

(sumber: SIKP Kemenkeu s.d. Maret 2025)



KINERJA PENYALURAN PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO



Jumlah Debitur **+89,37% yoy**

395 Debitur

Jumlah Penyaluran **+86,94% yoy**

Rp2,23 Miliar

Pembiayaan UMi tersalur Rp2,23 miliar kepada 395

debitur oleh 3 LKBB penyalur. Penyaluran UMi

mengalami penurunan dibandingkan Maret 2024

dengan persentase *negative growth* sebesar -86,94%.

(sumber: SIKP UMi s.d. Maret 2025)



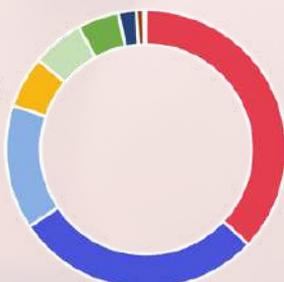
KINERJA PENYALURAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP)

Perkembangan Unit FLPP lingkup Prov. Kalsel Per Tahun



Realisasi FLPP Per Bank

- BTN (36,83%)
- BTN Syariah (28,53%)
- Bank Kalsel Syariah (14,39%)
- BRI (5,94%)
- BNI (5,94%)
- Mandiri (4,78%)
- Bank Kalsel (2,04%)
- BJB (0,79%)
- BSI (0,32%)



- Total unit rumah melalui FLPP se-Prov. Kalsel menduduki posisi terbanyak ke-8 dengan jumlah **2.156 unit** (4,00%), dan **nilai FLPP Rp280,33 M** dari nilai total secara nasional mencapai Rp6,66 T.
- Terdapat **9 Bank penyalur FLPP pada Provinsi Kalimantan Selatan**. Bank dengan penyaluran terbesar adalah **BTN (794 unit / 36,83%)**.
- Jumlah perumahan yang ada di Kalsel mencapai 380 perumahan dengan pengembang sebanyak 258.

(sumber: BP TAPERA s.d. Maret 2025)

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH ▼ 44,72% yoy



s.d. Triwulan I 2024
Realisasi **15,93%**

Rp3.712,49 M

s.d. Triwulan I 2025
Realisasi **9,32%**

Rp2.052,30 M

Penerimaan Perpajakan

Rp1.594,76 M

▼ 49,87% yoy

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp457,54 M

▼ 13,90% yoy

BELANJA NEGARA ▲ 3,10% yoy



s.d. Triwulan I 2024
Realisasi **19,87%**

Rp8.281,18 M

s.d. Triwulan I 2025
Realisasi **22,57%**

Rp8.537,60 M

Belanja Pemerintah Pusat

Rp1.527,23 M

▼ 26,98 yoy

Transfer ke Daerah

Rp7.010,36 M

▲ 13,26% yoy

DEFISIT ANGGARAN ▲ 41,95% yoy



s.d. Triwulan I 2024
Realisasi **24,86%**

-Rp4.568,68 M

s.d. Triwulan I 2025
Realisasi **41,03%**

-Rp6.485,30 M



REALISASI PENDAPATAN

9,32% Rp2.052,30 miliar



PENDAPATAN PERPAJAKAN

77,71%

Pajak Dalam Negeri
Rp1.323,59 miliar
Pajak Perdagangan Internasional
Rp271,17 miliar

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

28,69%

PNBP Lainnya
Rp318,36 miliar
Pendapatan BLU
Rp139,17 miliar

REALISASI BELANJA

22,57% Rp8.537,60 miliar

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

17,88%

Belanja Pegawai
Rp1.105,35 miliar
Belanja Barang
Rp374,55 miliar
Belanja Modal
Rp38,55 miliar
Belanja Sosial
Rp8,78 miliar

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)

82,12%

Transfer ke Daerah
Rp6.299,88 miliar

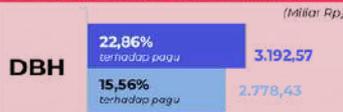
Dana Desa
Rp710,48 miliar

DEFISIT APBN

41,95%

Rp6.485,30 miliar

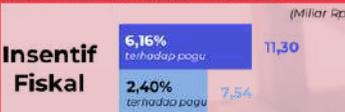
Dana Bagi Hasil | Growth ↑14,91% yoy



Dana Alokasi Umum | Growth ↑5,40% yoy



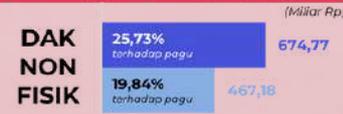
Insentif Fiskal | Growth ↑49,80% yoy



DAK Fisik | Growth ↑100% yoy



DAK Non Fisik | Growth ↑44,70% yoy



Dana Desa | Growth ↑10,72% yoy



TRANSFER KE DAERAH (TKD)

- Sampai 31 Maret 2025, realisasi TKD di Kalimantan Selatan sebesar **Rp7,01 triliun** atau **25,13%** dari Pagu.
- Penyaluran TKD didominasi oleh **DBH** dengan persentase **45,53%** dan **DAU** sebesar **34,49%**.
- Kinerja realisasi TKD bulan Maret 2025 secara *growth* yoy mengalami peningkatan **13,28%**, hal ini dikarenakan adanya perubahan *timeline* penyaluran DBH di tahun 2025.
- Untuk Kepala Daerah memantau kinerja TKD secara mingguan, Kanwil DJPb Kalsel berinovasi melalui aplikasi "SiJaya Unik" yang dapat diakses melalui: s.id/SIJAYAUNIK

KINERJA APBD KALIMANTAN SELATAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Kinerja

PENDAPATAN DAERAH

▲ 19,63% yoy



s.d. Triwulan I 2024
Realisasi **15,18%**

Rp6.863,77 M

s.d. Triwulan I 2025
Realisasi **19,55%**

Rp8.211,38 M

Pendapatan Asli Daerah

Rp1.675,00 M

▲ 38,65% yoy

Pendapatan Transfer

Rp6.388,72 M

▲ 14,94% yoy

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Rp147,67 M

▲ 3.928,53% yoy

BELANJA DAERAH

▲ 29,84% yoy



s.d. Triwulan I 2024
Realisasi **7,97%**

Rp4.082,25 M

s.d. Triwulan I 2025
Realisasi **11,12%**

Rp5.300,51 M

Belanja Operasi

Rp3.742,64 M

▲ 46,72% yoy

Belanja Modal

Rp171,32 M

▼ 22,72% yoy

Belanja Tidak Terduga

Rp1,71 M

▲ 4,19% yoy

Belanja Transfer

Rp1.384,84 M

▲ 5,87% yoy

SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN

▲ 4,65% yoy



s.d. Triwulan I 2024
Realisasi **-46,37%**

Rp2.781,51 M

s.d. Triwulan I 2025
Realisasi **-51,39%**

Rp2.910,87 M

Penerimaan Pembiayaan

Rp2,54 M

▼ 99,99% yoy

Pengeluaran Pembiayaan

Rp106,25 M

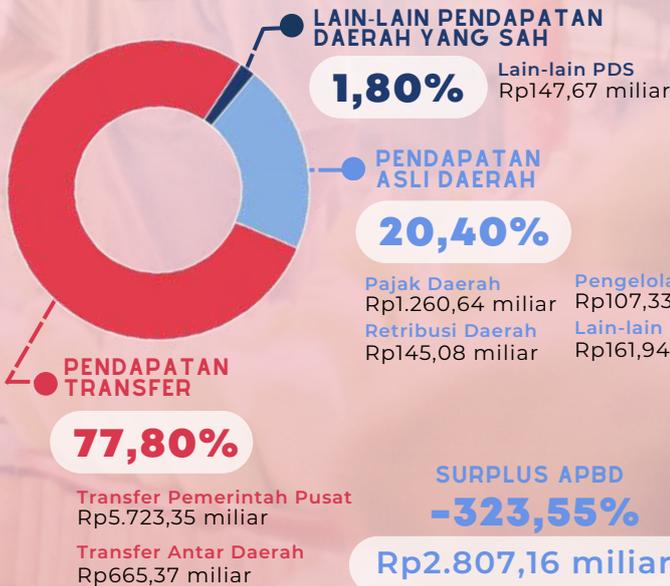
▲ 66,03% yoy



REALISASI PENDAPATAN

19,55%

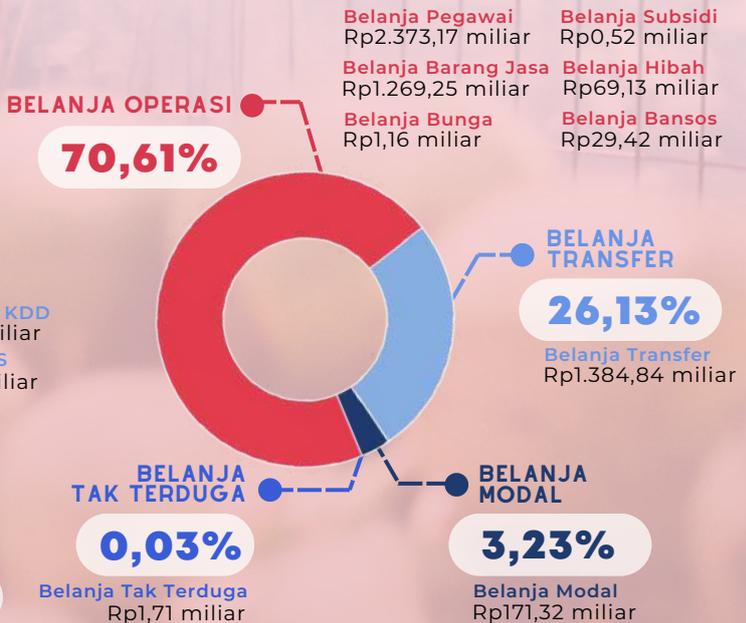
Rp8.211,38 miliar



REALISASI BELANJA

11,12%

Rp5.300,51 miliar



KINERJA PENDAPATAN APBD PER PEMDA S.D. MARET 2024

■ Realisasi s.d. Mar 2025 (Rp M)
● Capaian thdp Target (%)



KINERJA BELANJA APBD PER PEMDA S.D. MARET 2025

■ Realisasi s.d. Mar 2025 (Rp M)
● Capaian thdp Pagu (%)



RINGKASAN

Eksekutif

●● **Perekonomian Regional Kalimantan Selatan**

Pada triwulan I 2025, perekonomian Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 4,81% (yoy), menandakan **ketahanan ekonomi daerah di tengah tantangan global dan nasional**. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang kuat (48,55% dari PDRB), investasi yang meningkat (Rp7,16 triliun), serta kinerja positif sektor industri pengolahan yang tumbuh signifikan (15,67% yoy). Namun, penurunan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar -36,99% dan surplus perdagangan yang terkoreksi 32,24% menunjukkan adanya tekanan dari faktor musiman, normalisasi belanja fiskal, serta ketergantungan tinggi pada komoditas primer seperti batubara dan CPO. Meski harga kedua komoditas ini meningkat, penurunan volume ekspor membatasi kontribusi terhadap perekonomian. Inflasi tercatat sebesar 1,20% (yoy), relatif terkendali secara tahunan namun cukup tinggi secara bulanan (1,59% mtm), dengan tekanan utama berasal dari kelompok perawatan pribadi dan pangan.

Dari sisi kesejahteraan, Kalimantan Selatan mencatat perkembangan positif: angka kemiskinan menurun menjadi 4,02%, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,81%, dan Rasio Gini sebesar 0,298 menunjukkan distribusi pendapatan relatif merata. Nilai Tukar Petani (NTP) tetap menguntungkan di angka 120,69, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) di bawah ambang ideal (97,10), mengindikasikan tekanan biaya produksi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,19, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Ke depan, tantangan utama terletak pada percepatan hilirisasi, penguatan sektor industri pengolahan, optimalisasi belanja publik sejak awal tahun, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya nelayan dan UMKM. Sinergi antara kebijakan fiskal, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan sosial menjadi kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

●● **Kinerja Fiskal Regional Kalimantan Selatan**

Pada Triwulan I 2025, **kinerja fiskal Kalimantan Selatan mencerminkan arah kebijakan yang prudent namun tetap mendukung pengembangan dan pembangunan ekonomi**. Dari sisi pelaksanaan APBN, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.052,3 miliar, mengalami kontraksi sebesar 44,72% (yoy), terutama disebabkan oleh peningkatan restitusi pajak. Meski menekan penerimaan bruto, tingginya restitusi pajak ini menjadi indikasi positif atas peningkatan kepatuhan pemungutan pajak sehingga dapat berperan menjadi instrumen yang memperkuat likuiditas pelaku usaha dan mendukung perputaran ekonomi riil di daerah.

RINGKASAN

Eksekutif

Kinerja Fiskal Regional Kalimantan Selatan

Sementara itu, **belanja negara tetap tumbuh positif** sebesar 3,10% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp8.537,60 miliar. Struktur belanja negara didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp7.010,36 miliar atau tumbuh signifikan 13,26% (yoy), menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung upaya desentralisasi dan pembangunan di daerah. Penurunan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 26,98% (yoy) menjadi Rp1.527,23 miliar dapat terkoreksi oleh tingginya realisasi penyaluran TKD, sehingga secara total belanja APBN tetap ekspansif dan efektif dalam mendorong pembangunan regional.

Di sisi lain, **kinerja APBD Kalimantan Selatan juga menunjukkan tren positif**. Pendapatan daerah tercatat sebesar Rp8.211,38 miliar, tumbuh 19,63% (yoy), mencerminkan potensi ekonomi daerah yang terus berkembang. Belanja daerah meningkat 29,84% (yoy) dengan realisasi Rp5.300,51 miliar, meskipun baru mencakup 11,12% dari total pagu anggaran belanja tahun 2025. Hal ini memberi ruang akselerasi belanja pada triwulan selanjutnya, khususnya untuk pelaksanaan layanan publik dan program startegis pemerintah. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga perlu terus didorong guna memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan sinergi belanja pusat melalui TKD dan kinerja positif APBD, Kalimantan Selatan berada di jalur fiskal yang sehat, adaptif, dan mendukung pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

Perkembangan Program "Makan Bergizi Gratis" di Kalimantan Selatan

Program MBG mulai diimplementasikan di Kalimantan Selatan dengan progres awal yang menjanjikan. Hingga 22 Mei 2025, sebanyak 33.915 jiwa (3,52% dari target 963.320 jiwa) telah menerima manfaat MBG melalui 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Angka ini meningkat signifikan dari 12.028 penerima per akhir Maret 2025. Secara nasional, total realisasi anggaran mencapai Rp1.446,34 miliar, dengan Rp1.052,66 miliar untuk pemenuhan gizi dan Rp393,68 miliar untuk dukungan manajemen.

Meski demikian, pelaksanaan program menghadapi tantangan besar, antara lain kebutuhan penambahan 304 SPPG, keterbatasan infrastruktur dan SDM dapur, skema pembayaran *reimburse* yang membebani mitra UMKM, serta pasokan bahan pangan yang masih tergantung dari luar daerah. Penguatan koordinasi antar instansi, kesiapan BUMDes/UMKM lokal, dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan keberlanjutan program ini ke depan.

RINGKASAN

Eksekutif

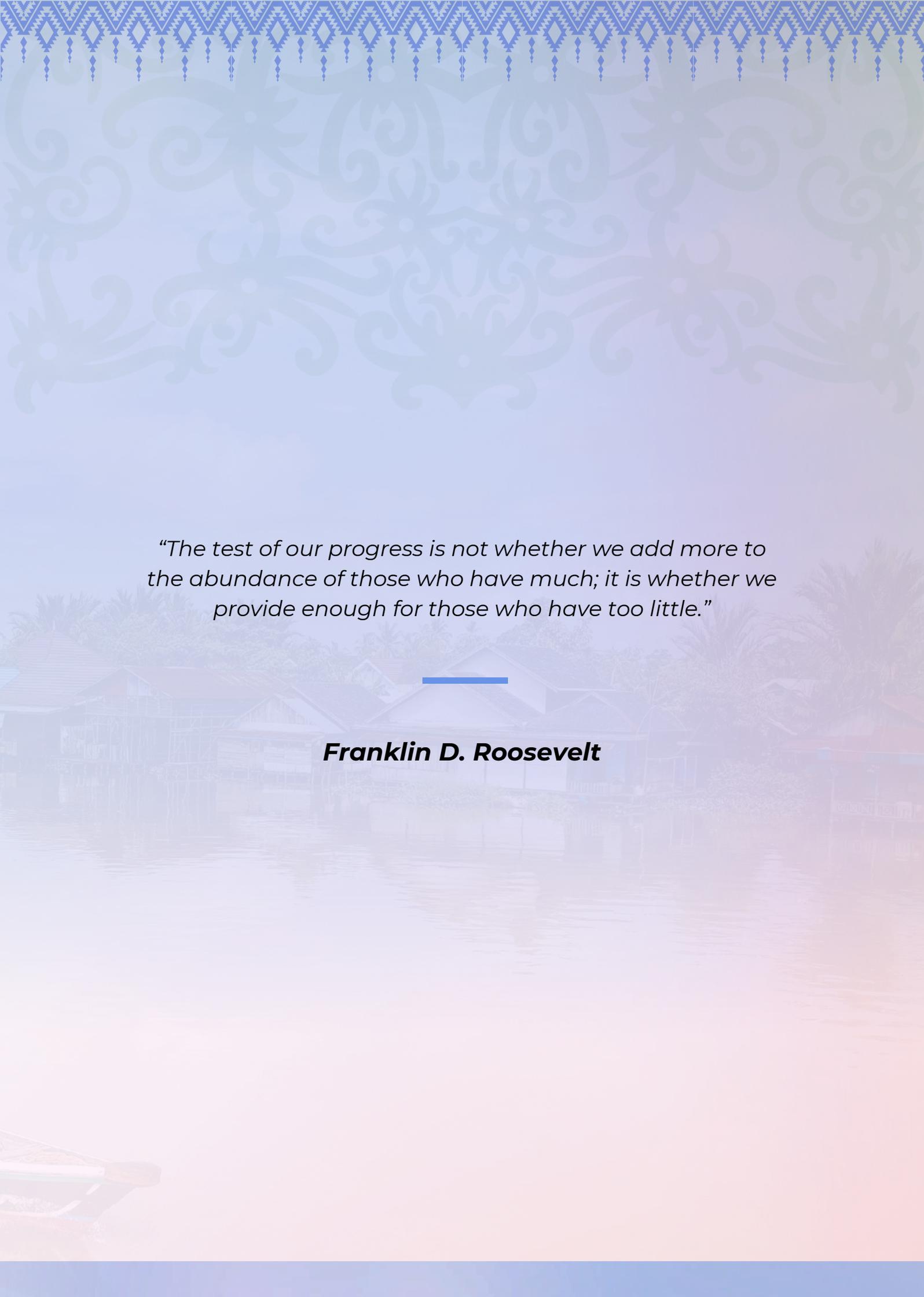
●● **Perkembangan Koperasi di Kalimantan Selatan**

Koperasi desa dan kelurahan di Kalimantan Selatan memiliki potensi besar yang bersumber dari kekayaan lokal pada sektor pertanian, perikanan, industri rumah tangga, perdagangan, dan pariwisata. Namun, pengembangan koperasi masih terkendala oleh keterbatasan modal, sumber daya manusia, dan integrasi kelembagaan. Strategi pengembangan yang diusulkan sesuai karakteristik dan kendala koperasi di Kalimantan Selatan meliputi pemetaan potensi usaha, peningkatan kapasitas SDM, akses pembiayaan, kemitraan strategis, dan digitalisasi. Pendekatan ini bertujuan menjadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, berbagai **upaya pengembangan koperasi di Kalimantan Selatan menghadapi sejumlah tantangan** signifikan, seperti rendahnya literasi digital dan keuangan anggota, kurangnya inovasi bisnis, serta lemahnya tata kelola. Infrastruktur teknologi yang belum merata dan dominasi sistem manual memperlambat digitalisasi, sementara resistensi perubahan dan persaingan dengan *e-commerce* menurunkan daya saing koperasi. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana juga masih menjadi masalah karena minimnya pengawasan dan partisipasi anggota.

Pemerintah memberikan dukungan komprehensif melalui kebijakan regulatif, peningkatan kapasitas SDM, fasilitasi akses pasar dan pembiayaan, serta penguatan tata kelola. Sumber pembiayaan yang meningkat dari APBN, TKD, dan APBD mencerminkan komitmen yang kuat. Di Kalimantan Selatan, pelatihan, sertifikasi, dan program pengembangan koperasi modern dilaksanakan, didukung pula oleh lembaga seperti LPDB untuk memperkuat akses permodalan.

Data periode 2021–2023 menunjukkan adanya peningkatan jumlah koperasi, tenaga kerja, dan aset koperasi. Meski demikian, tingkat koperasi aktif stagnan di sekitar 64% dan jumlah anggota menurun akibat masalah internal seperti manajemen yang lemah dan pelayanan yang kurang, serta tekanan eksternal dari *fintech* dan perubahan perilaku masyarakat. Dengan penguatan manajemen, digitalisasi, peran pemerintah yang lebih aktif, dan diversifikasi usaha, **koperasi di Kalimantan Selatan berpotensi besar untuk tumbuh dan berkontribusi lebih optimal** terhadap ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.



“The test of our progress is not whether we add more to the abundance of those who have much; it is whether we provide enough for those who have too little.”

Franklin D. Roosevelt

BAB 01

Analisis Ekonomi Regional



"Steady growth is not always loud — sometimes, it's the quiet resilience of people, policy, and progress moving in harmony."

Pada awal tahun 2025, perekonomian Kalimantan Selatan menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan indikasi positif dari sisi makroekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, ditopang oleh kinerja sektor pertambangan, industri pengolahan, dan perdagangan. Di sisi lain, dinamika global memengaruhi harga komoditas unggulan dan menekan surplus neraca perdagangan di Kalimantan Selatan. Inflasi tetap terkendali, mencerminkan kestabilan harga kebutuhan pokok di masyarakat. Dari sisi kesejahteraan, Kalimantan Selatan mencatatkan tingkat kemiskinan yang terendah ke-2 secara nasional serta perbaikan pada indikator ketenagakerjaan dan ketimpangan mengindikasikan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.

BAB 01

ANALISIS EKONOMI REGIONAL

1.1 Analisis Indikator Makro Ekonomi

Pada triwulan I 2025, perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif dengan mencatat pertumbuhan sebesar 4,87% (*year-on-year*). Terdapat kenaikan dari triwulan sebelumnya sebesar 5,02% pada triwulan IV 2024. Perlambatan ini dipengaruhi oleh normalisasi belanja pemerintah pasca lonjakan pada akhir tahun serta penurunan ekspor akibat harga komoditas global yang melemah. Selain itu, konsumsi rumah tangga melambat seiring tren inflasi yang relatif stabil namun belum sepenuhnya mendorong daya beli.

Konsumsi Domestik

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap stabil di angka 5,11 Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat yang masih terjaga meskipun ada tekanan inflasi dan ketidakpastian global. Pengeluaran konsumsi publik mengalami perlambatan signifikan, hanya tumbuh 1,4% dibandingkan 19,9% pada triwulan I. Hal ini mungkin terkait dengan penurunan belanja pemerintah pasca puncak kampanye pemilu.

Investasi

Investasi sebesar Rp 465,2 triliun di kuartal I 2025 mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan kapasitas produksi dan modernisasi infrastruktur. Aliran modal ke subsektor industri logam dasar, transportasi, dan telekomunikasi memperkuat rantai nilai manufaktur dan logistik, sehingga menurunkan biaya distribusi dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar ekspor. Di samping itu, serapan tenaga kerja hampir 595 ribu orang memperlebar basis pendapatan rumah tangga, memicu konsumsi domestik, dan menciptakan efek ganda (*multiplier*) yang signifikan: setiap rupiah investasi mendorong pertumbuhan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Bagi Kalimantan Selatan, infusio investasi Rp 7,16 triliun mendorong percepatan pembangunan kawasan industri

dan perumahan serta peningkatan kapasitas jasa penunjang. Penanaman modal domestik yang mendominasi turut menstimulasi UMKM lokal untuk naik kelas, memperkuat linkages dengan sektor pertambangan dan perkebunan, serta mendorong tumbuhnya ekosistem logistik di Balikpapan–Banjarmasin. Meskipun kontribusi PMA masih terbatas, kehadiran proyek-proyek besar telah merangsang transfer teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja setempat. Dengan insentif kebijakan yang tepat, efek akumulasi ini dapat memacu keterpaduan antarwilayah, menurunkan disparitas, dan memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan.

Perdagangan Internasional

Sampai dengan Maret 2025, surplus neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan masih berada di wilayah positif, namun mencatat koreksi yang cukup signifikan: dari US\$1.050,47 juta pada Maret 2024 menjadi hanya US\$710,72 juta pada Maret 2025, atau turun sebesar 32,24 % secara tahunan. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, surplus juga terkoreksi 14,17 %, dari US\$828,03 juta pada Februari 2025 menjadi US\$710,72 juta, karena nilai ekspor yang menyusut sementara impor justru meningkat. Pelemahan ekspor terutama disebabkan oleh turunnya volume pengapalan dua komoditas unggulan, Minyak Kelapa Sawit dan Batubara HS 2701, yang pada Maret menyumbang lebih dari 60 % total ekspor Kalsel. Di sisi lain, nilai impor membengkak akibat meningkatnya pembelian minyak petroleum dan sarana logistik kelautan, seperti kapal feri, kapal kargo, dan tongkang, untuk mendukung distribusi antarpulau dan kebutuhan energi lokal.

Kendati demikian, faktor harga internasional memberikan dinamika tersendiri. Harga batubara acuan melonjak 12,05 % (dari US\$109,90/ton menjadi US\$123,00/ton), sementara harga referensi CPO naik 19,48 % (dari US\$798,90/MT menjadi US\$954,50/MT), sehingga secara nilai ekspor kedua komoditas ini masih mampu menahan tekanan volume. Berbeda dengan itu, harga minyak mentah Brent justru turun 12,00 %

(dari US\$85,41/barel menjadi US\$75,16/barel), yang meski menurunkan biaya impor BBM, tidak menghalangi kenaikan total impor pada Maret 2025 karena kebutuhan stok menjelang puasa dan musim mudik. Dengan kondisi ini, upaya hilirisasi batubara dan CPO melalui briket, *oleochemical*, atau biodiesel serta pengembangan kilang lokal, menjadi kunci agar nilai tambah ekspor Kalimantan Selatan tetap terjaga di tengah fluktuasi harga komoditas global.

Sektor-Sektor Kunci

Sektor-sektor utama seperti pertanian, manufaktur, dan perdagangan, yang berkontribusi besar terhadap PDB menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Di sisi lain, sektor-sektor kecil seperti transportasi, pertambangan, dan listrik mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi, membantu menyeimbangkan penurunan pada sektor utama.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di masa mendatang, pemerintah perlu mengambil beberapa langkah strategis sebagai berikut:

a) Revitalisasi Sumber Pertumbuhan

Kalimantan Selatan perlu menempatkan hilirisasi komoditas primer sebagai motor baru produktivitas. Di tengah dominasi batubara, yang menyumbang lebih dari 60 % total ekspor pada Maret 2025, pengembangan fasilitas pengolahan briket dan pembangkit listrik skala menengah terbukti mampu meningkatkan nilai tambah lokal sekaligus menyerap tenaga kerja. Sementara itu, investasi pada *smelter* CPO dan pabrik *oleochemical* akan membuka ruang bagi produk turunannya, seperti metil ester, gliserin, dan sabun industri, untuk diekspor dengan margin lebih tinggi. Dukungan insentif fiskal bagi pemanfaatan teknologi rendah karbon, misalnya CO₂ capture pada PLTU batubara dan digitalisasi proses kebun sawit, semakin krusial agar produktivitas naik tanpa menambah beban lingkungan.

b) Peningkatan Daya Saing Ekspor

Melonjaknya harga batubara acuan sebesar 12,05 % yoy dan kenaikan harga referensi CPO 19,48 % yoy pada Maret 2025 merupakan kesempatan penting untuk

memperkuat posisi Kalimantan Selatan di pasar global. Diversifikasi pasar melalui perjanjian perdagangan preferensial—baik CEPA, RCEP, maupun kesepakatan bilateral dengan negara-negara Asia Selatan dan Timur Tengah, dapat memperluas jangkauan komoditas lokal. Di saat yang sama, penerapan sertifikasi keberlanjutan (seperti ISPO dan kepatuhan EUDR) akan membuka akses ke Uni Eropa dan Amerika Utara, sekaligus meminimalkan risiko hambatan non-tarif. Untuk menghadapi fluktuasi harga, pemerintah dan pelaku usaha juga perlu merangkul instrumen lindung nilai di bursa domestik dan memfasilitasi kontrak *forward* yang menstabilkan pendapatan eksportir.

c) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Ketergantungan yang tinggi pada impor minyak petroleum dan kapal antarpulau mengindikasikan potensi besar untuk memberdayakan komunitas lokal. Pelatihan teknis dan digital bagi pelaku UKM agro, seperti pengepul nira dan pengrajin kopi Loksado, akan memacu pengembangan nilai tambah desa. Program padat karya infrastruktur hijau, misalnya perbaikan dermaga dan instalasi listrik tenaga surya di wilayah terpencil, tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menurunkan biaya logistik dan energi. Di samping itu, skema kredit mikro berbunga rendah yang terintegrasi dengan BI, OJK, dan perbankan daerah dapat memperkuat basis permodalan UKM, sehingga pelaku lokal memiliki daya tahan lebih baik menghadapi fluktuasi pasar.

d) Optimalisasi teknologi dan sumber ekonomi baru

Melemahnya harga minyak mentah Brent sebesar 12 % yoy pada Maret 2025 menegaskan perlunya pilar ekonomi alternatif. Pengembangan ekonomi kreatif dan digital lewat *co-working space* di Banjarmasin akan menjadi inkubator bagi startup lokal, misalnya platform fintech untuk petani sawit atau marketplace UMKM daerah. Di sektor logistik, *platform gig economy* untuk jasa bongkar muat dan pengoperasian kapal tongkang atau feri bisa meningkatkan efisiensi sekaligus membuka peluang pendapatan baru bagi operator lokal. Terakhir, penyusunan kebijakan fiskal yang mendukung riset dan pengembangan,

seperti *tax holiday* atau *super deduction* untuk inovasi di pengolahan mineral-abu batu dan biofuel kelapa sawit, akan menyiapkan fondasi bagi pertumbuhan berbasis teknologi jangka panjang.

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh stabil meskipun menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Pemerintah perlu terus memonitor perkembangan ekonomi dan menyesuaikan kebijakan secara responsif untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

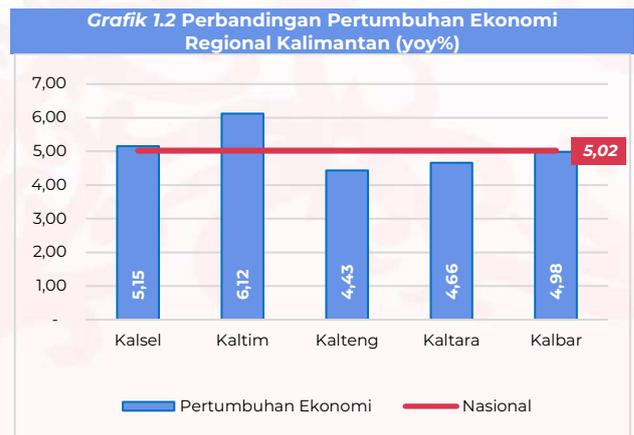
1.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Diolah)

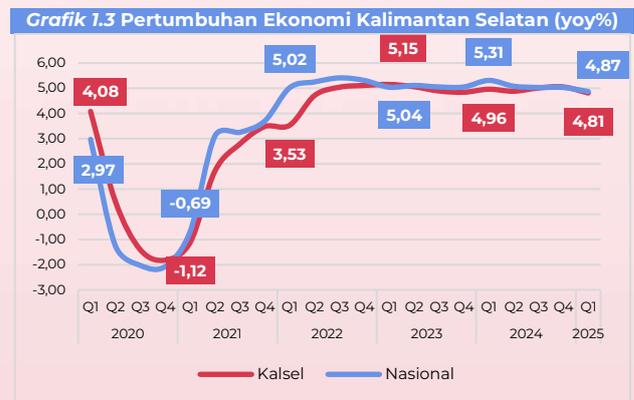
Ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan I tahun 2025 tumbuh sebesar 4,81% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mencerminkan ketahanan ekonomi daerah yang tetap terjaga di tengah berbagai tekanan global dan domestik, termasuk normalisasi harga komoditas unggulan dan masih berlangsungnya penyesuaian sektor-sektor ekonomi pasca pandemi. Kinerja ini juga mencerminkan berlanjutnya pemulihan konsumsi masyarakat serta stabilnya permintaan domestik, yang didukung oleh belanja pemerintah dan investasi yang tetap bergeliat.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan, capaian Kalimantan Selatan lebih tinggi dibanding Kalimantan Timur (4,08%), Kalimantan Tengah (4,04%), dan Kalimantan Utara (4,06%), serta hanya sedikit lebih rendah dari Kalimantan Barat (5,00%).



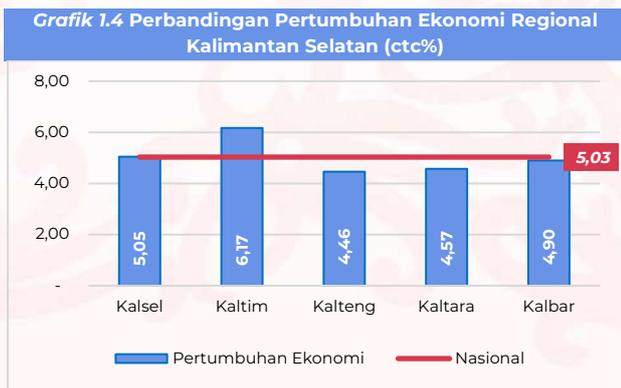
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Diolah)

Dengan demikian, Kalimantan Selatan menempati posisi kedua tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan. Namun, bila disejajarkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 4,87%, posisi Kalimantan Selatan sedikit di bawah rata-rata nasional, dengan selisih tipis sebesar 0,06 poin persentase, menunjukkan bahwa kinerja ekonomi daerah ini tetap kompetitif secara nasional.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Diolah)

Sementara itu, dari sisi pertumbuhan ekonomi triwulanan, Kalimantan Selatan juga menunjukkan performa yang stabil dengan pertumbuhan sebesar 4,81% (ctc) dibandingkan triwulan IV tahun 2024. Ini mencerminkan adanya aktivitas ekonomi yang menguat pada awal tahun, termasuk dari sisi belanja rumah tangga yang mulai naik menjelang Ramadhan, serta peningkatan permintaan sektor-sektor jasa dan perdagangan.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Diolah)

Dibandingkan provinsi lain di Kalimantan, pertumbuhan triwulanan Kalimantan Selatan juga menempati posisi atas, berada di atas Kalimantan Timur (4,08%), Kalimantan Tengah (4,04%), dan Kalimantan Utara (4,06%). Kalimantan Barat kembali mencatatkan pertumbuhan tertinggi secara ctc sebesar 5,00%, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional triwulanan tercatat di angka 4,87%. Artinya, secara *quarter-to-quarter*, Kalimantan Selatan masih berada sedikit di bawah nasional namun tetap berada dalam jajaran provinsi dengan kinerja terbaik di regional Kalimantan.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Diolah)

Dalam tren jangka menengah, perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Selatan menunjukkan konsistensi. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) terus meningkat dari Rp39,64 triliun pada Q1 2018 menjadi Rp70,86 triliun pada Q1 2025, sementara PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tumbuh dari Rp29,76 triliun menjadi Rp38,24 triliun di periode yang sama. Kenaikan yang terjadi pada keduanya mencerminkan bahwa

pertumbuhan yang berlangsung bukan hanya nominal, tetapi juga riil, mencerminkan peningkatan volume produksi barang dan jasa di Kalimantan Selatan.

Dari sisi nilai, PDRB Kalimantan Selatan atas dasar harga konstan meningkat dari Rp36,48 triliun pada triwulan I 2024 menjadi Rp38,24 triliun pada triwulan I 2025. Dalam nominal, peningkatannya bahkan lebih signifikan, dari Rp65,17 triliun menjadi Rp70,86 triliun. Artinya, tak hanya aktivitas ekonomi yang tumbuh secara riil, tetapi juga secara nilai pasar, yang turut mencerminkan peningkatan daya beli serta penguatan harga komoditas unggulan.

Kontribusi pertumbuhan masih didominasi oleh sektor pertambangan, perkebunan, serta transportasi dan pergudangan yang kian strategis dalam menopang aktivitas ekspor dan logistik domestik. Namun demikian, sektor industri pengolahan masih belum menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat untuk mendongkrak hilirisasi komoditas secara signifikan. Hal ini menjadi catatan penting bagi para pemangku kebijakan untuk terus mendorong penguatan kluster industri berbasis sumber daya lokal, seperti hilirisasi kelapa sawit menjadi oleokimia, pemanfaatan batubara untuk industri petrokimia, maupun industri pengolahan makanan dari sektor pertanian dan perikanan.

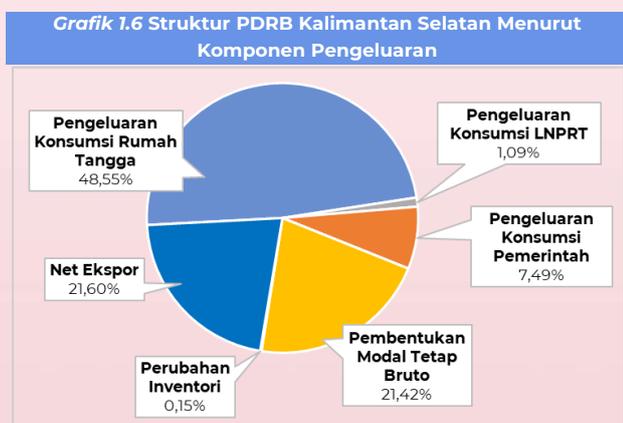
Tantangan dan Arah Kebijakan Publik

Meskipun secara tahunan pertumbuhan ekonomi tetap positif, kontraksi kuartalan yang konsisten tiap awal tahun menunjukkan bahwa perekonomian Kalimantan Selatan masih sangat dipengaruhi oleh faktor musiman dan pola realisasi fiskal. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah mengakselerasi penyaluran belanja pemerintah sejak awal tahun anggaran, khususnya pada program padat karya dan infrastruktur dasar. Skema penjadwalan ulang tender dini, penguatan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan proyek nasional, serta percepatan hibah barang dan jasa kepada masyarakat dapat menjadi solusi konkret.

Tak kalah penting adalah penguatan sistem perlindungan sosial dan pemberdayaan UMKM yang produktif. Meningkatnya harga kebutuhan pokok akibat inflasi berbasis komoditas memicu tekanan terhadap daya beli masyarakat. Oleh karena itu, belanja negara dan daerah perlu diarahkan secara lebih terukur pada kelompok yang paling rentan. Program seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), subsidi bunga KUR, dan program padat karya tunai bisa menjadi bantalan penting untuk menjaga permintaan domestik dan konsumsi rumah tangga.

Ke depan, tantangan utama Kalimantan Selatan terletak pada upaya untuk keluar dari ketergantungan terhadap komoditas primer. Meskipun sektor ini menjadi motor utama, fluktuasi harga global membuat struktur ekonomi rawan guncangan. Diversifikasi perlu diarahkan pada pengembangan sektor ekonomi kreatif, pariwisata berbasis budaya dan alam, ekonomi digital, dan industri pengolahan yang bernilai tambah tinggi.

Struktur PDRB Menurut Komponen Pengeluaran

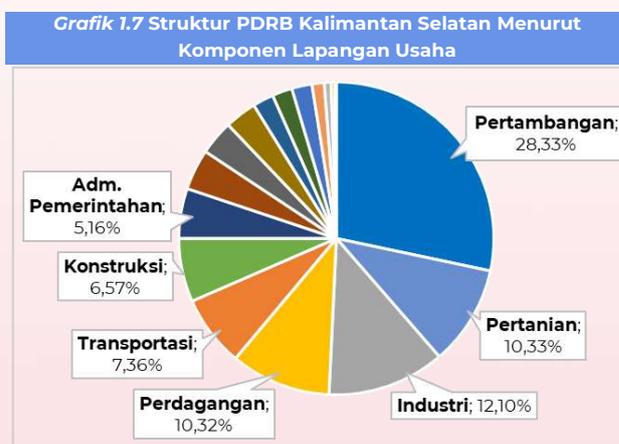


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Diolah)

Pada triwulan pertama tahun 2025, struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Selatan menurut komponen pengeluaran masih didominasi oleh **Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga** yang mencapai hampir setengah dari total PDRB, yaitu sebesar **48,55%**. Komponen ini juga mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar **5,49%** dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menjadi motor

utama penggerak ekonomi daerah. Di sisi lain, **Pengeluaran Konsumsi Pemerintah** mengalami kontraksi tajam sebesar **36,99%**, yang menjadi perhatian karena berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Komponen lain seperti **Pembentukan Modal Tetap Bruto** dan **Net Ekspor** juga memberikan kontribusi signifikan, masing-masing sebesar 21,42% dan 21,60%, meskipun keduanya mengalami penurunan nilai absolut dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pengeluaran konsumsi LNPRT dan perubahan inventori memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap struktur PDRB.

Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha



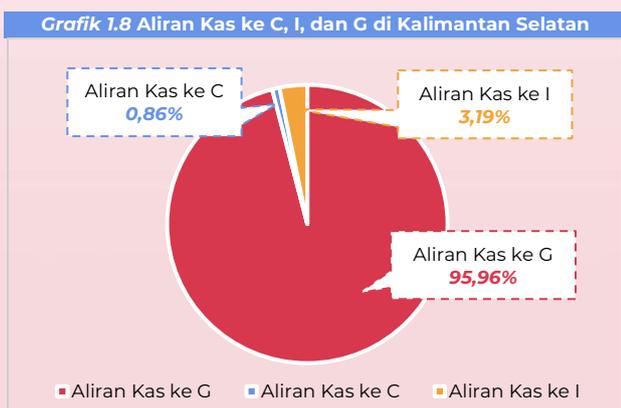
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Diolah)

Dari sisi lapangan usaha, struktur PDRB Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 masih didominasi oleh sektor **Pertambangan** dengan porsi terbesar sebesar **28,33%**. Disusul oleh sektor **Industri Pengolahan** yang menyumbang **12,10%** dan sektor **Pertanian** sebesar **10,33%**. Ketiga sektor ini bersama-sama memberikan kontribusi sebesar lebih dari setengah perekonomian daerah, yaitu **50,75%**. Seluruh lapangan usaha menunjukkan pertumbuhan positif, dengan sektor **Industri Pengolahan** mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar **15,67%** yoy, diikuti oleh sektor pertanian dan perdagangan yang juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa sektor seperti konstruksi dan transportasi mengalami penurunan nilai

absolut, meskipun secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi tetap positif.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan pertama tahun 2025 mencapai 4,81% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB, serta performa kuat dari sektor industri pengolahan yang mencatat pertumbuhan signifikan. Kontraksi pengeluaran pemerintah yang cukup besar menjadi tantangan yang perlu diwaspadai karena dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi ke depan. Sektor pertambangan tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah dengan porsi terbesar dalam struktur PDRB, sementara sektor pertanian dan perdagangan juga berperan penting dalam menopang pertumbuhan. Penurunan pada ekspor, impor, serta beberapa sektor seperti konstruksi dan transportasi perlu menjadi fokus perhatian untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan.

1.1.1.2 Kontribusi Fiskal (Pengeluaran Pemerintah) terhadap Pembentukan PDRB



Sumber: ALCo Regional Kalimantan Selatan (Diolah)

Kontribusi fiskal atau pengeluaran pemerintah memegang peran strategis dalam mendorong pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui berbagai komponen pengeluaran, pemerintah dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah, memperkuat sektor

produktif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang tersedia, kontribusi fiskal terhadap PDRB mencakup tiga komponen utama: Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (G), Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (C), dan Investasi Pemerintah (I).

Dominasi Belanja Pemerintah sebagai Motor Pertumbuhan

Di Kalimantan Selatan, belanja konsumsi pemerintah telah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025. Dengan porsi mencapai hampir 96 % dari total pengeluaran riil meliputi gaji ASN, operasional instansi, dan belanja barang/jasa fiskal daerah mampu menjaga laju output tetap positif meski sektor swasta masih “tertidur.” Alokasi ini menjamin kelancaran layanan publik dan menstimulasi permintaan terhadap produk lokal, dari kertas kantor hingga layanan logistik, sehingga berdampak langsung pada pelaku usaha dan pekerja di rantai pasok pemerintahan.

Efektivitas Bansos dalam Mengerek Konsumsi Rumah Tangga

Meskipun kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap total permintaan wilayah masih kurang dari 1 %, hampir setengah nilai pembelanjaan rumah tangga itu datang dari program bantuan sosial. Skema bansos yang terarah berhasil meningkatkan daya beli kelompok rentan, mendorong belanja kebutuhan pokok, dan menahan laju kemiskinan ekstrem. Untuk memperkuat efek berganda, perlu dipadukan dengan pelatihan kewirausahaan dan akses pembiayaan mikro agar bantuan tunai juga mendorong aktivitas usaha kecil dan menciptakan *multiplier* non-pokok yang lebih luas.

Lonjakan Belanja Modal sebagai Sinyal Percepatan Infrastruktur

Penyerapan belanja modal pemerintah meningkat dramatis, dari Rp 54,4 triliun pada Februari menjadi Rp 205,3 triliun pada Maret, menandakan akselerasi pembangunan infrastruktur. Proyek perbaikan jalan dan fasilitas publik lain kini memasuki fase eksekusi masif, memacu output sektor

konstruksi serta permintaan *cement*, baja, dan peralatan teknik. Ke depan, keberhasilan infrastruktur ini akan menciptakan konektivitas antarpulau yang lebih efisien, mengurangi biaya logistik, dan membuka akses pasar baru bagi komoditas lokal.

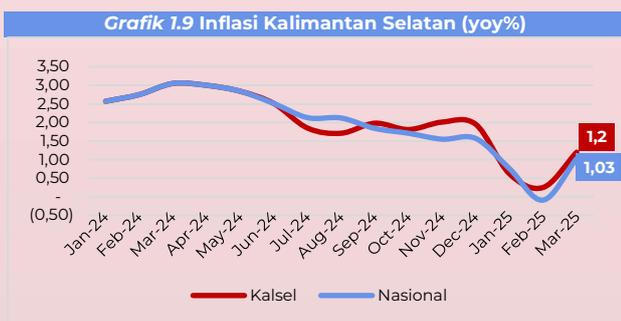
Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan

Meski belanja pemerintah telah menghantar pertumbuhan, struktur fiskal perlu disesuaikan agar efek *multiplicative* semakin optimal. Pergeseran sebagian anggaran dari belanja konsumsi ke belanja produktif, melalui insentif *capex* untuk proyek padat karya, dapat menstimulasi partisipasi swasta. Integrasi program bansos dengan pelatihan dan pembiayaan UKM akan memperluas permintaan non-pokok dan menciptakan sumber pendapatan alternatif. Terakhir, skema kemitraan publik-swasta (KPBU) dan kontrak berbasis kinerja harus diperkuat agar infrastruktur strategis tidak hanya terbangun, tetapi juga terawat dan memberikan manfaat berkelanjutan.

Melalui sinergi antara konsumsi pemerintah, investasi, dan konsumsi masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai. Dengan demikian, pengelolaan fiskal yang tepat sasaran tidak hanya mendorong PDRB, tetapi juga menciptakan dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

1.1.2 Inflasi

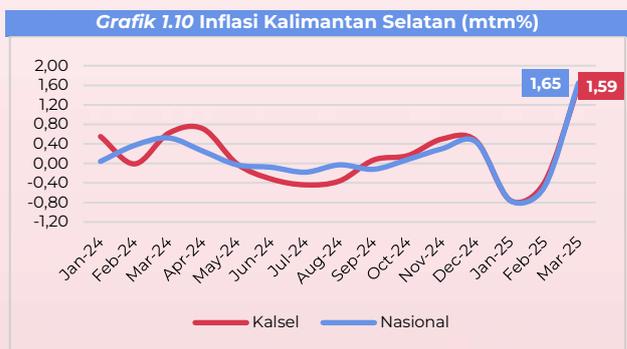
Inflasi merupakan fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Terjadinya inflasi tidak dapat dihindari, namun dapat dikendalikan dari sisi permintaan atau penawaran.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Diolah)

Menjaga Stabilitas Harga di Tengah Dinamika Ekonomi, Potret Inflasi Kalimantan Selatan sampai dengan Maret 2025

Inflasi tetap menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi suatu wilayah. Di Kalimantan Selatan (Kalsel), perkembangan inflasi pada Maret 2025 mencerminkan dinamika harga yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor musiman, regulasi pemerintah, hingga kondisi pasokan komoditas pangan dan energi. Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik dan analisis Kementerian Keuangan, tercatat bahwa inflasi *year-on-year* (yoy) Provinsi Kalimantan Selatan berada di angka 1,20%, sedikit lebih tinggi dari inflasi nasional yang sebesar 1,03%. Sementara itu, inflasi *month-to-month* (mtm) Kalsel mencapai 1,59%, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) berada di level 107,60, naik dari posisi 106,32 pada bulan yang sama tahun sebelumnya.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Diolah)

Angka-angka tersebut mengindikasikan bahwa meskipun tekanan inflasi di Kalsel relatif terkendali secara tahunan, terdapat lonjakan harga yang cukup tinggi dalam skala bulanan. Hal ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah, pelaku pasar, dan masyarakat untuk terus mewaspadai potensi gejolak harga di bulan-bulan mendatang, terutama menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pertengahan tahun yang biasanya diikuti peningkatan konsumsi rumah tangga.

Komoditas dan Kelompok Penyumbang Inflasi

Jika menilik lebih dalam, inflasi tahunan (yoy) di Kalimantan Selatan didorong oleh kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, terutama kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang melonjak hingga 12,79% dengan andil sebesar 0,90% terhadap total inflasi. Kenaikan harga emas perhiasan menjadi pemicu utama dari lonjakan ini, merefleksikan tidak hanya naiknya harga emas global tetapi juga meningkatnya permintaan domestik, khususnya menjelang musim perayaan dan acara keluarga seperti pernikahan.

Selain itu, kelompok transportasi mencatat inflasi sebesar 2,60%, terutama didorong oleh penyesuaian tarif kendaraan dan parkir, serta naiknya pajak pertambahan nilai (PPN). Kelompok makanan dan minuman jadi juga memberi andil cukup besar, dengan inflasi 2,56%, seiring naiknya biaya operasional restoran dan bahan baku makanan.

Menariknya, di tengah tren kenaikan harga, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar justru mengalami deflasi tajam hingga -7,17%, menyumbang koreksi hingga -1,05% terhadap total inflasi tahunan. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan tarif listrik rumah tangga hingga -26,46% secara tahunan. Kebijakan ini menunjukkan efektivitas penyesuaian subsidi energi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi di sektor rumah tangga.

Secara bulanan (*mtm*), tekanan inflasi datang dari komoditas pangan segar seperti bawang merah, cabai rawit, dan jagung manis, yang lazim bergejolak menjelang musim tanam baru. Tarif listrik juga mengalami penyesuaian yang ikut menyumbang inflasi bulanan. Sementara itu, penurunan harga pada sejumlah sayuran daun seperti bayam, sawi hijau, kangkung, serta kacang panjang dan angkutan udara menjadi penyumbang deflasi dalam jangka pendek, menunjukkan adanya dinamika harga musiman dan kebijakan pengendalian tarif yang cukup efektif.

Perbandingan dengan Wilayah Kalimantan dan Nasional

Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Pulau Kalimantan, Kalimantan Selatan mencatatkan inflasi yoy 1,20%, lebih tinggi dari Kalimantan Barat (0,94%) dan jauh di atas Kalimantan Utara yang justru mencatatkan deflasi -0,49%. Namun, inflasi Kalsel masih berada di bawah Kalimantan Timur (1,36%) dan Kalimantan Tengah (1,33%). Perbandingan ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi di Kalimantan cukup beragam, mencerminkan kondisi struktural yang berbeda, baik dari sisi infrastruktur distribusi, pola konsumsi, hingga ketahanan pasokan di masing-masing provinsi.

Bahkan di dalam Provinsi Kalsel sendiri, disparitas inflasi antar daerah cukup mencolok. Kabupaten Tanah Laut mencatat inflasi yoy tertinggi sebesar 2,52%, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan inflasi hanya 0,74%. Disparitas ini menegaskan perlunya kebijakan inflasi yang bersifat spasial dan terdesentralisasi, mengingat karakteristik konsumsi dan ketersediaan barang sangat bergantung pada kondisi geografis dan akses distribusi.

Respons dan Kebijakan Pengendalian

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah merespons dengan cukup cepat. Sepanjang Maret 2025, telah dilaksanakan Gerakan Pasar Murah (GPM) di 99 titik pada berbagai kabupaten/kota. Selain itu, panen raya serentak di delapan kabupaten yang mencakup sekitar 20 ribu hektare lahan turut membantu menjaga pasokan dan menstabilkan harga pangan.

Dari sisi kelembagaan, Bank Indonesia Kalsel meluncurkan kajian BUMD pangan sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan daerah. BUMD ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara petani dan pasar, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah. Pemerintah juga mengintensifkan sinergi antara TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

(TP2DD) untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam pengendalian inflasi.

Meskipun tekanan inflasi saat ini masih dalam kategori moderat, sejumlah tantangan ke depan perlu diwaspadai. Pertama, potensi kenaikan harga energi global dan bahan pangan impor dapat memberikan tekanan tambahan. Kedua, ketergantungan pada pasokan luar untuk beberapa komoditas strategis (seperti beras dan cabai) membuat Kalsel rentan terhadap gangguan pasok.

Langkah-langkah pengendalian inflasi terus dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah serta berbagai instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Selatan untuk menjaga kestabilan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Dalam penanganan inflasi di Kalimantan Selatan, APBN sebagai instrumen fiskal juga turut berkontribusi dalam mengendalikan inflasi harga dari berbagai sisi. Berikut pagu dan realisasi belanja APBN untuk pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan s.d. 31 Maret 2025.

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Inflasi di Kalimantan Selatan

Nama K/L	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
BAPANAS	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	434,81	-	0,00%
	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	50,00	-	0,00%
BPS	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	870,64	112,82	12,96%
KEMENHUB	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	9.150,25	452,13	4,94%
	Pelayanan Transportasi Laut	11.962,49	4.281,67	35,79%
	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	2.700,00	-	0,00%
KEMANTAN	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	250,00	-	0,00%
	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	4.266,39	-	0,00%
	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	6.156,38	1.293,58	21,01%
PU	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	67.113,34	1.960,88	2,92%
	Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non Padi	48.947,43	-	0,00%
	Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	18.280,21	1.938,39	10,60%
	Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku	1.500,00	-	0,00%

Sumber: SINTESA (Diolah)

Optimalisasi Belanja APBN untuk Pengendalian Inflasi di Kalimantan Selatan

Pada triwulan pertama tahun 2025, realisasi belanja APBN di Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang beragam dan masih jauh dari target optimal, terutama pada sektor-sektor yang berperan penting dalam pengendalian inflasi. Data yang diperoleh dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah mengindikasikan bahwa beberapa program strategis yang berkaitan dengan stabilisasi harga dan pasokan kebutuhan pokok belum terealisasi secara maksimal, sehingga berpotensi memperberat tekanan inflasi di wilayah tersebut.

Sektor pangan, yang menjadi tulang punggung pengendalian inflasi, justru menunjukkan realisasi anggaran yang sangat minim bahkan nihil pada beberapa kegiatan utama. Kementerian Pangan dan Stabilitas Harga (BAPANAS) belum merealisasikan anggaran sama sekali untuk kegiatan pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan serta pengendalian kerawanan pangan. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan mengingat fluktuasi harga pangan merupakan salah satu faktor utama yang memicu inflasi di Kalimantan Selatan. Ketidakstabilan pasokan pangan akibat minimnya realisasi anggaran dapat menyebabkan kenaikan harga yang signifikan dan berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) berhasil merealisasikan sekitar 13% dari anggaran untuk penyediaan dan pengembangan statistik harga, yang merupakan langkah penting dalam pemantauan inflasi dan pengambilan kebijakan berbasis data. Namun, realisasi untuk infrastruktur konektivitas transportasi darat masih sangat rendah, hanya sekitar 5%. Keterlambatan pembangunan infrastruktur ini berpotensi menghambat kelancaran distribusi barang, memperpanjang rantai pasokan, dan meningkatkan biaya logistik yang pada akhirnya turut mendorong kenaikan harga barang.

Kementerian Perhubungan (KEMENHUB) menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan pada pelayanan transportasi laut dengan realisasi hampir 36%. Transportasi laut yang efisien sangat penting bagi Kalimantan Selatan yang memiliki wilayah kepulauan dan daerah terpencil, karena memudahkan distribusi barang dan menekan biaya logistik. Namun, pembangunan infrastruktur transportasi udara belum terealisasi sama sekali, sehingga menjadi kendala dalam percepatan distribusi barang dan penanganan inflasi secara menyeluruh.

Sektor pertanian juga menunjukkan hasil yang kurang merata. Realisasi anggaran untuk penguatan pendidikan vokasi pertanian mencapai 21%, menandakan adanya investasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dapat mendukung ketahanan pangan jangka panjang. Namun, kegiatan lain seperti pengelolaan alat mesin pertanian dan pelatihan pertanian belum terealisasi, yang dapat menghambat peningkatan produktivitas pertanian di tengah tekanan inflasi yang tinggi.

Sementara itu, sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperlihatkan realisasi yang bervariasi. Pengembangan bendungan dan bangunan penampung air lainnya mencapai realisasi sekitar 10,6%, yang penting untuk mendukung irigasi dan ketahanan air di musim kemarau. Namun, sebagian besar kegiatan lain seperti pengembangan jaringan irigasi permukaan, rawa, dan non-padi serta operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air masih sangat rendah realisasinya, di bawah 4%. Kondisi ini dapat menghambat ketahanan air dan mitigasi bencana, yang pada akhirnya juga berdampak pada stabilitas harga pangan dan inflasi.

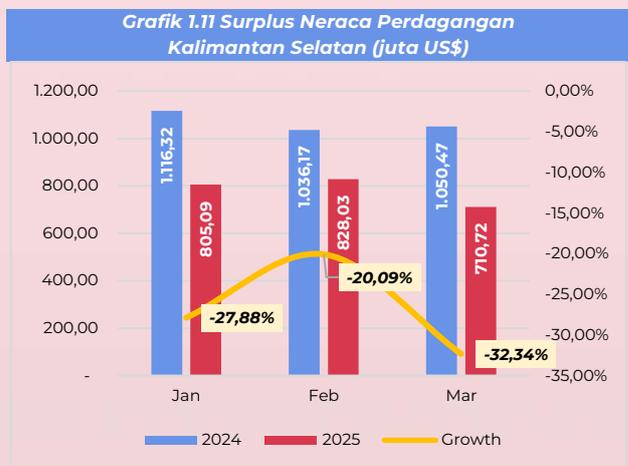
Secara keseluruhan, realisasi belanja APBN di Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 masih jauh dari target, terutama di sektor-sektor yang sangat berpengaruh terhadap inflasi seperti pangan, transportasi

udara, dan irigasi. Keterlambatan realisasi ini berpotensi memperburuk tekanan inflasi yang sudah ada, mengingat peran vital sektor-sektor tersebut dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok. Meskipun terdapat capaian positif di sektor transportasi laut dan pendidikan vokasi pertanian, hal ini belum cukup untuk mengimbangi kebutuhan mendesak dalam stabilisasi harga dan pasokan.

Oleh karena itu, percepatan realisasi anggaran di sektor-sektor kunci menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko inflasi yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Langkah strategis seperti mempercepat pemantapan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan, meningkatkan infrastruktur transportasi udara dan darat, serta memprioritaskan pengembangan jaringan irigasi dan sarana prasarana air harus segera dilakukan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran perlu diperketat agar dapat segera diambil tindakan korektif jika terjadi keterlambatan.

Dengan upaya yang terkoordinasi dan fokus pada sektor-sektor strategis tersebut, diharapkan realisasi belanja APBN di Kalimantan Selatan dapat lebih optimal dan berkontribusi signifikan dalam menekan inflasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.

1.1.3 Neraca Perdagangan



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Diolah)

Ketergantungan Komoditas dan Upaya Diversifikasi dari Perspektif Neraca Perdagangan Kalimantan Selatan

Surplus neraca perdagangan Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 32,24% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jika dilihat secara bulanan, surplus ini juga menurun sekitar 14,17%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya nilai ekspor sebesar 36,7% yang dipicu oleh berkurangnya volume ekspor dua komoditas utama, yaitu minyak kelapa sawit dan batubara. Menariknya, meskipun volume ekspor menurun, harga kedua komoditas tersebut justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dengan harga batubara naik sekitar 12,05% dan harga CPO (*Crude Palm Oil*) naik 19,48%. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan volume ekspor menjadi faktor utama melemahnya nilai ekspor secara keseluruhan.

Di sisi lain, nilai impor justru meningkat tajam sebesar 53,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan impor ini didorong oleh kebutuhan yang meningkat terhadap minyak petroleum serta kapal dan kendaraan air seperti kapal feri, kapal kargo, dan kapal tongkang. Kenaikan impor minyak petroleum ini juga sejalan dengan turunnya harga minyak mentah Brent sebesar 12%, yang mungkin mendorong peningkatan konsumsi energi di wilayah ini.

Dari sisi komoditas, batubara menjadi penyumbang terbesar ekspor Kalimantan Selatan dengan kontribusi mencapai lebih dari 60% dari total ekspor, diikuti oleh lignit dan minyak kelapa sawit. Sementara itu, impor didominasi oleh minyak petroleum yang menyumbang lebih dari 70% dari total impor, diikuti oleh mesin pengangkat dan kapal atau kendaraan air.

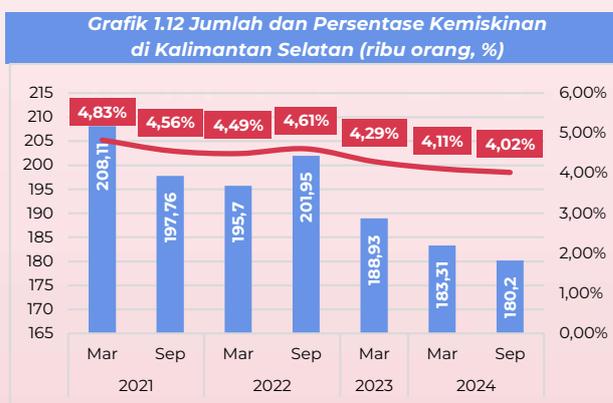
Penurunan surplus neraca perdagangan ini memberikan gambaran adanya tantangan dalam menjaga volume ekspor meskipun harga komoditas utama naik. Peningkatan impor terutama di sektor energi dan transportasi juga mencerminkan adanya

peningkatan aktivitas ekonomi domestik yang membutuhkan pasokan lebih besar. Ketergantungan yang tinggi pada ekspor batubara membuat neraca perdagangan Kalimantan Selatan rentan terhadap fluktuasi harga dan volume komoditas ini. Oleh karena itu, diversifikasi ekspor menjadi langkah strategis yang sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Selain itu, pengelolaan impor yang efisien juga perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan defisit perdagangan yang berlebihan, sekaligus mendukung kebutuhan energi dan infrastruktur yang terus berkembang. Secara keseluruhan, meskipun surplus neraca perdagangan Kalimantan Selatan masih positif, penurunan yang terjadi harus menjadi perhatian serius bagi para pemangku kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang.

1.2 Analisis Indikator Kesejahteraan

1.2.1 Tingkat Kemiskinan



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Diolah)

Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan positif dalam upaya pengentasan kemiskinan hingga September 2024. Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan, persentase penduduk miskin di wilayah ini tercatat sebesar **4,02%**, mengalami penurunan sebesar **0,09 poin%** dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 4,11%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, Maret 2023 (4,29%), penurunan ini bahkan lebih signifikan, mencapai **0,27 poin%**. Penurunan ini juga

tercermin dari jumlah penduduk miskin yang berkurang menjadi **180,20 ribu orang**, turun sebanyak **3,1 ribu orang** dari Maret 2024 dan berkurang **8,73 ribu orang** dibandingkan Maret 2023.

Meski demikian, tantangan besar masih membayangi, terutama terkait dengan kenaikan garis kemiskinan (GK) yang mencapai **Rp644.107 per kapita per bulan** pada September 2024. Angka ini meningkat sebesar **Rp266.677** dibandingkan Maret 2016, yang menunjukkan bahwa biaya hidup di Kalimantan Selatan semakin tinggi. Kenaikan garis kemiskinan ini dipengaruhi oleh inflasi yang berlangsung selama sembilan tahun terakhir serta dampak pandemi Covid-19 yang mulai terasa sejak Maret 2020 hingga Maret 2021.

Garis kemiskinan tersebut terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu **GK Makanan** sebesar Rp464.917 per kapita per bulan dan **GK Non-Makanan** sebesar Rp 179.190 per kapita per bulan. Artinya, untuk memenuhi kebutuhan dasar, rata-rata satu orang dalam rumah tangga miskin harus mengeluarkan sekitar Rp644 ribu setiap bulan.

Melihat tren perkembangan kemiskinan sejak 2016, persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan memang sempat mengalami fluktuasi, dengan puncak tertinggi pada September 2020 sebesar 4,83%. Namun, sejak saat itu, terjadi penurunan yang cukup konsisten hingga mencapai angka 4,02% pada September 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Meski demikian, kenaikan garis kemiskinan yang signifikan menandakan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin menurun, beban hidup bagi mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan semakin berat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pengurangan jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada pengendalian inflasi dan peningkatan daya beli masyarakat, terutama

dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-pangan.

Khususnya, dengan garis kemiskinan makanan yang jauh lebih besar dibanding non-makanan, program bantuan pangan dan peningkatan produktivitas sektor pertanian harus menjadi prioritas utama. Langkah ini penting agar masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan lebih baik dan terhindar dari risiko kemiskinan yang lebih dalam.

Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran bahwa Kalimantan Selatan sedang berada di jalur yang tepat dalam mengurangi kemiskinan, namun masih menghadapi tantangan besar terkait biaya hidup yang terus meningkat. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan di daerah ini.

Untuk mengatasi tantangan ini, Kalimantan Selatan perlu menerapkan kebijakan diversifikasi ekspor, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor-sektor utama. Pengendalian impor dan mendorong penggunaan produk dalam negeri juga penting untuk memperbaiki neraca perdagangan dan memastikan bahwa penurunan angka kemiskinan dapat terus berlanjut. Strategi yang komprehensif ini diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan tetap inklusif, sehingga mampu mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah provinsi.

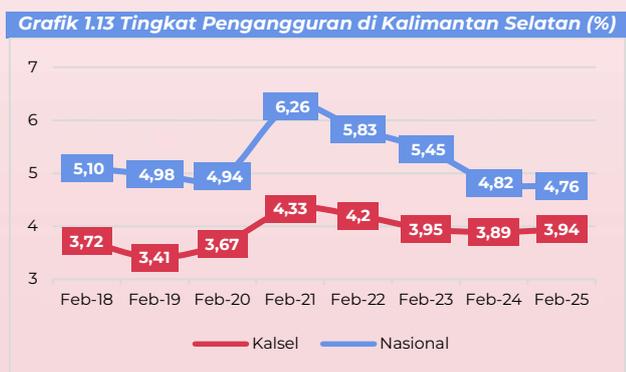
Dalam mengurangi tingkat kemiskinan serta menjaga kemampuan dan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, yang di antaranya sebagai berikut:

1. Pembentukan peraturan terkait pengentasan kemiskinan, misalnya Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 76 Tahun 2022 tentang

Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

2. Pemberian bantuan sosial telah disalurkan pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Sembako.
3. Program-program tertentu seperti pemberian dana permodalan bagi masyarakat penghasilan rendah.
4. program Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah pusat, infrastruktur di pedesaan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum diperbaiki. Ini membantu mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, meningkatkan aksesibilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
5. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dan Gerakan Peningkatan Produktivitas Perikanan.
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas (PMBK), yang melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti usaha mikro dan kecil.

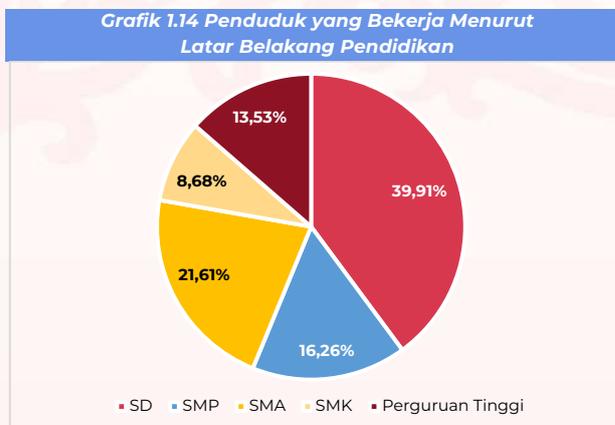
1.2.2 Tingkat Pengangguran



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Diolah)

Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang cukup positif dalam sektor ketenagakerjaan pada Februari 2025. Data terbaru mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi ini mengalami penurunan menjadi 3,81%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 4,20%. Meskipun demikian, jumlah pengangguran

tercatat sebanyak 88,5 ribu orang, dengan peningkatan sekitar 3.586 orang dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan tantangan tersendiri dalam penyerapan tenaga kerja.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Diolah)

Dari sisi pendidikan, sekitar 13,53% penduduk yang bekerja memiliki latar belakang pendidikan tinggi (perguruan tinggi). Namun, mayoritas tenaga kerja masih berasal dari kelompok pendidikan SD ke bawah yang mencapai 39,91%, diikuti oleh lulusan SMA sebesar 21,61% dan SMP sebesar 16,26%. Menariknya, tingkat pengangguran tertinggi justru ditemukan pada lulusan SMP, yaitu sebesar 7,73%, yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk peningkatan keterampilan dan peluang kerja bagi lulusan jenjang ini. Sebaliknya, tingkat pengangguran terendah berada pada lulusan perguruan tinggi dengan angka hanya 1,72%.

Struktur ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan juga menunjukkan dinamika yang menggembirakan. Penduduk usia kerja mencapai 3,19 juta orang, dengan angkatan kerja sebanyak 2,24 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,15 juta orang telah terserap dalam dunia kerja, mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 56.559 orang selama setahun terakhir. Penyerapan ini terdiri dari 1,31 juta pekerja penuh waktu, 0,66 juta pekerja paruh waktu, dan 0,18 juta setengah pengangguran yang masih aktif mencari pekerjaan tambahan.

Partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan, dari 69,53% pada Februari 2023 menjadi 70,41% pada Februari 2025. Peningkatan ini lebih dominan terjadi pada laki-laki, yang mencapai 84,95%, dibandingkan perempuan yang sebesar 55,66%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi perempuan dalam angkatan kerja terus meningkat, kesenjangan gender dalam dunia kerja masih perlu menjadi perhatian.

Namun, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi fokus pemerintah dan pemangku kepentingan. Peningkatan tingkat pengangguran pada lulusan SMP menjadi sinyal perlunya program pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih inklusif bagi kelompok ini. Selain itu, meskipun TPT menurun secara keseluruhan, jumlah pengangguran yang masih cukup besar menuntut upaya berkelanjutan dalam memperkuat sektor ketenagakerjaan.

Secara keseluruhan, data ketenagakerjaan Kalimantan Selatan pada Februari 2025 menunjukkan tren positif dengan penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan partisipasi angkatan kerja. Namun, tantangan seperti disparitas pendidikan dan gender serta kebutuhan peningkatan kualitas tenaga kerja tetap menjadi agenda penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

1.2.3 Ketimpangan (Rasio Gini)

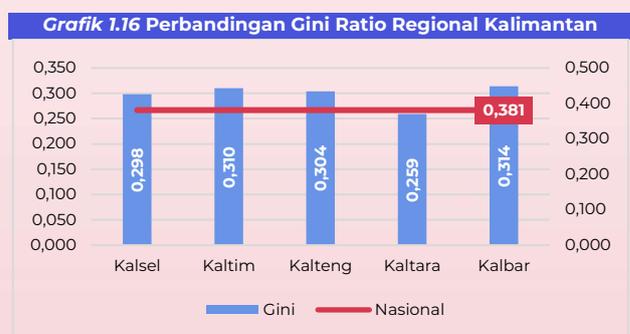


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Diolah)

Rasio Gini (*Gini Ratio*) menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk secara menyeluruh. Kalimantan Selatan

menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dalam hal pemerataan pendapatan, yang tercermin dari nilai Rasio Gini sebesar 0,298 pada September 2024. Angka ini berada di bawah rata-rata nasional Indonesia yang sebesar 0,381, menandakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi ini relatif lebih terkendali dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia. Sebagai perbandingan, DKI Jakarta mencatatkan Rasio Gini tertinggi sebesar 0,431, sementara Kepulauan Bangka Belitung memiliki nilai terendah yaitu 0,235.

Tren penurunan Rasio Gini di Kalimantan Selatan juga terlihat jelas dari data historis sejak Maret 2016 hingga September 2024. Pada Maret 2024, nilai Rasio Gini tercatat sebesar 0,302 dan menurun menjadi 0,298 pada September 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk semakin menyempit, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Diolah)

Kalimantan secara keseluruhan menunjukkan performa yang lebih baik dalam hal pemerataan pendapatan dibandingkan dengan rata-rata nasional Indonesia. Berdasarkan data terbaru per September 2024, rata-rata Rasio Gini nasional tercatat sebesar 0,381, sementara provinsi-provinsi di Kalimantan mencatat nilai yang lebih rendah, dengan Kalimantan Selatan berada di angka 0,298. Hal ini menandakan bahwa distribusi pendapatan di Kalimantan relatif lebih merata dibandingkan dengan banyak wilayah lain di

Indonesia, termasuk daerah-daerah dengan ketimpangan yang lebih tinggi seperti DKI Jakarta.

Provinsi-provinsi lain di Kalimantan juga menunjukkan angka Rasio Gini yang menggembirakan, seperti Kalimantan Barat (0,314), Kalimantan Timur (0,310), Kalimantan Tengah (0,304), dan Kalimantan Utara yang mencatat nilai terendah di wilayah ini yaitu 0,259. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerataan ekonomi di Kalimantan yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional, sekaligus menunjukkan potensi wilayah ini untuk terus mengembangkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Namun, tantangan tetap ada untuk menjaga dan memperkuat tren positif ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Kalimantan Selatan telah melaksanakan sejumlah program strategis untuk mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di antaranya adalah pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja yang bertujuan meningkatkan daya saing dan membuka peluang kerja yang lebih luas. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih difokuskan pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi untuk membuka akses ekonomi yang lebih merata. Sinergi antara pemerintah provinsi dan pusat juga menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan program pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan manusia. Pendekatan pembangunan berbasis klaster juga diterapkan, menyesuaikan program dengan kebutuhan spesifik wilayah, seperti bantuan ekonomi langsung untuk daerah miskin dan program jangka panjang untuk penguatan pendidikan dan kesehatan.

Untuk memperkuat dan mempercepat pengentasan ketimpangan, beberapa rekomendasi kebijakan penting perlu diperhatikan. Pertama, penguatan program pemberdayaan ekonomi dengan memperluas akses modal dan pelatihan bagi pelaku UMKM serta mendorong inovasi usaha di kalangan

masyarakat berpendapatan rendah. Kedua, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas, terutama di daerah perdesaan dan wilayah tertinggal, agar kesenjangan sosial dapat terus diperkecil. Ketiga, pengembangan infrastruktur wilayah yang lebih merata guna membuka peluang ekonomi baru dan mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan. Keempat, pemantauan dan evaluasi berkala terhadap indikator ketimpangan dan efektivitas program agar kebijakan dapat disesuaikan secara tepat waktu. Terakhir, penguatan sistem data dan informasi ketimpangan dan kemiskinan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih akurat.

1.2.4 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah indikator penting yang mengukur kesejahteraan petani dengan membandingkan harga yang diterima petani dari hasil produksi dengan harga yang dibayarkan untuk biaya produksi. Pada Maret 2025, NTP Kalimantan Selatan tercatat sebesar 120,69, yang berarti petani secara umum masih memperoleh pendapatan yang lebih besar dibandingkan biaya produksi. Angka ini menunjukkan kondisi yang relatif menguntungkan, karena nilai NTP di atas 100 menandakan petani mendapatkan keuntungan.

Faktor pendukung utama NTP ini meliputi kenaikan harga hasil pertanian seperti cabai rawit, tomat, gabah, dan karet yang menjadi komoditas penyumbang utama. Namun, kenaikan biaya produksi juga signifikan, terutama pada tarif listrik, cabai rawit, bawang merah, dan solar. Kenaikan biaya produksi ini menyebabkan tekanan pada kesejahteraan petani meskipun harga hasil panen juga naik. Idealnya, NTP yang baik atau ideal berada di atas angka 100 dengan jarak yang cukup lebar antara harga terima dan harga bayar, sehingga petani dapat memperoleh keuntungan yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan dan investasi produksi.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Jika dilihat dari tren selama tiga tahun terakhir, NTP di Kalimantan Selatan menunjukkan pola kenaikan yang cukup stabil dan positif. Pada tahun 2023, NTP bergerak dari angka sekitar 108 di awal tahun dan terus meningkat hingga mencapai puncak di atas 120 pada awal 2025. Data bulanan menunjukkan bahwa setiap tahun NTP mengalami kenaikan yang konsisten, misalnya pada Januari 2023 NTP berada di angka 107,94, naik menjadi 114,11 pada Januari 2024, dan mencapai 119,19 pada Januari 2025. Tren ini mengindikasikan adanya perbaikan pendapatan petani yang lebih cepat dibandingkan kenaikan biaya produksi dalam jangka panjang.

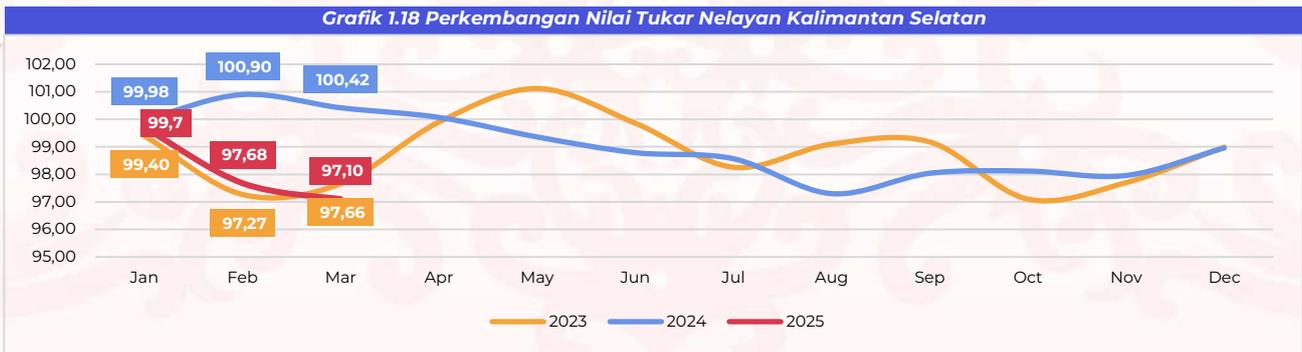
Namun, pada Maret 2025 terjadi penurunan tipis sebesar 0,55% dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 121,36. Penurunan ini dipengaruhi oleh kenaikan biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga hasil pertanian, terutama pada subsektor tanaman pangan, peternakan, dan perikanan yang masing-masing mengalami penurunan NTP sebesar 2,00%, 1,64%, dan 0,54%. Komoditas utama yang berkontribusi pada NTP adalah cabai rawit, gabah, tomat, dan karet, sementara biaya utama yang meningkat adalah tarif listrik, cabai rawit, bawang merah, dan solar. Untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan petani, diperlukan langkah-langkah seperti pengendalian biaya produksi, peningkatan akses pasar, diversifikasi produk, serta penguatan subsektor pertanian melalui teknologi dan infrastruktur.

Untuk meningkatkan NTP dan kesejahteraan petani di Kalimantan Selatan, beberapa ruang perbaikan dan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pemerintah perlu memberikan subsidi atau bantuan langsung untuk komoditas biaya produksi utama seperti listrik, bahan bakar, pupuk, dan pakan agar beban biaya dapat ditekan.
2. Mendorong akses pasar yang lebih baik dan stabil bagi petani agar harga hasil produksi dapat meningkat sesuai dengan biaya produksi.
3. Meningkatkan infrastruktur transportasi dan penyimpanan hasil pertanian untuk mengurangi kerugian pasca panen dan biaya distribusi.
4. Memberikan pelatihan dan akses teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi.
5. Mendorong diversifikasi usaha pertanian untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pendapatan.

1.2.5 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah indikator yang mencerminkan kesejahteraan nelayan dengan membandingkan pendapatan yang diterima dari hasil tangkapan ikan dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Pada Maret 2025, NTN Kalimantan Selatan tercatat sebesar 97,10, yang berarti nelayan masih menghadapi tekanan biaya produksi yang cukup signifikan karena nilai NTN berada di bawah angka ideal yaitu 100.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini adalah kenaikan Indeks Harga Bayar Nelayan (Ib) sebesar 1,02%, yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga Terima Nelayan (It) sebesar 0,42%. Kenaikan biaya produksi ini dipengaruhi oleh beberapa komoditas utama seperti bensin, umpan, obat dan pakan, serta biaya transportasi yang semakin meningkat. Sementara itu, harga hasil tangkapan seperti ikan gabus, ikan patin, udang, dan cumi mengalami kenaikan yang relatif lebih kecil.

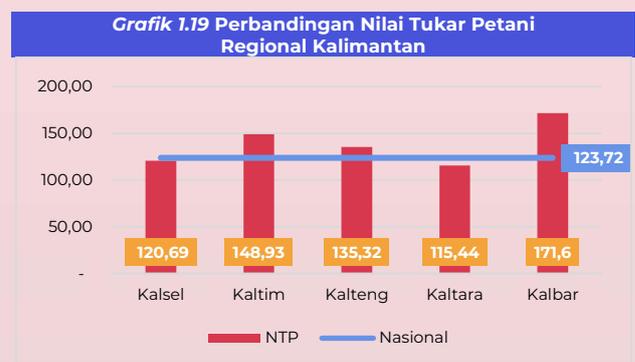
Tren NTN selama tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, NTN bergerak di kisaran 97 hingga 101, dengan puncak tertinggi di Mei 2023 sebesar 101,12. Pada tahun 2024, nilai NTN relatif stabil di kisaran 98 hingga 100, namun pada awal 2025 kembali menurun hingga mencapai 97,10 pada Maret 2025. Data bulanan menunjukkan bahwa nilai NTN pada Januari 2023 adalah 99,40, naik sedikit menjadi 99,98 pada Januari 2024, namun turun kembali menjadi 99,70 pada Januari 2025.

Penurunan NTN pada Maret 2025 disebabkan oleh kenaikan biaya produksi (Ib) yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga terima nelayan (It). Kenaikan biaya ini terutama dipicu oleh indeks KRT (bahan bakar) yang naik 1,71% dan BPPBM (biaya pakan dan obat) naik 0,22%. Subkelompok penangkapan di laut mengalami kenaikan harga terima sebesar 0,54%, namun subkelompok penangkapan perairan umum mengalami penurunan sebesar 0,06%. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, diperlukan pengendalian biaya produksi terutama bahan bakar dan pakan, diversifikasi

usaha perikanan, peningkatan akses pasar dan teknologi penangkapan yang efisien, serta penguatan kelembagaan nelayan melalui koperasi dan kelompok usaha. Untuk meningkatkan NTN dan kesejahteraan nelayan di Kalimantan Selatan, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memberikan subsidi atau bantuan untuk bahan bakar, umpan, obat, pakan, dan transportasi agar biaya produksi dapat ditekan.
2. Meningkatkan akses pasar dan stabilitas harga hasil tangkapan agar nelayan mendapatkan harga yang lebih baik.
3. Meningkatkan fasilitas pelabuhan, penyimpanan, dan transportasi hasil tangkapan untuk mengurangi kerugian dan biaya distribusi.
4. Memberikan pelatihan dan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi penangkapan dan budidaya.
5. Mendorong diversifikasi usaha nelayan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pendapatan.

1.2.6 Perbandingan NTP dan NTN di Regional Kalimantan



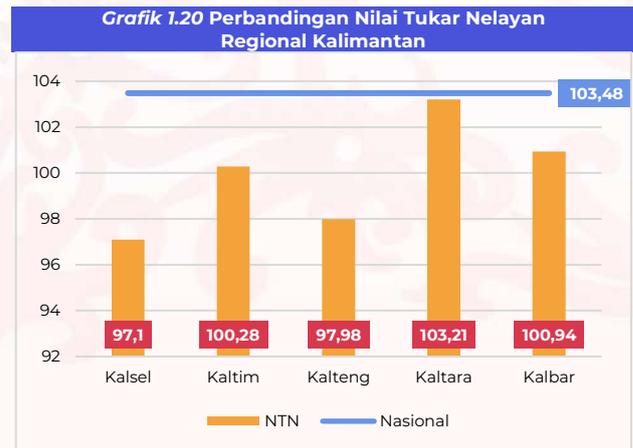
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Diolah)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator penting yang mencerminkan kesejahteraan petani dengan membandingkan harga yang diterima petani dari hasil produksi dengan harga yang dibayarkan untuk biaya produksi. Pada Maret 2025, NTP di Kalimantan Selatan tercatat sebesar 120,69, sedikit di bawah nilai nasional yang berada di angka 123,72. Angka ini menunjukkan bahwa petani di Kalimantan Selatan masih menikmati kondisi yang relatif menguntungkan, meskipun ada ruang untuk peningkatan agar bisa menyamai atau melampaui rata-rata nasional.

Jika kita melihat gambaran regional Kalimantan secara keseluruhan, terdapat variasi yang cukup signifikan. Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat menonjol dengan NTP masing-masing sebesar 148,93 dan 171,6, jauh di atas rata-rata nasional, yang menandakan kesejahteraan petani di wilayah tersebut lebih baik. Sementara itu, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara berada di bawah nilai nasional, dengan NTP masing-masing 135,32 dan 115,44.

Tren NTP di Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang stabil, dari sekitar 108 pada 2023, naik ke 114 pada 2024, dan mencapai 120,69 pada 2025. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam produktivitas dan harga hasil pertanian, meskipun masih ada tantangan dalam pengendalian biaya produksi.

Menurut laporan dari Kementerian Pertanian dan media nasional seperti Kompas dan Antara News, peningkatan NTP di beberapa wilayah Kalimantan didorong oleh kebijakan pemerintah yang mendukung harga hasil pertanian dan subsidi input produksi. Namun, wilayah seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara masih perlu mendapat perhatian khusus untuk mengatasi kendala biaya produksi dan meningkatkan akses pasar agar kesejahteraan petani dapat lebih optimal.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Diolah)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) menggambarkan kesejahteraan nelayan dengan membandingkan pendapatan dari hasil tangkapan dengan biaya produksi. Pada Maret 2025, nilai NTN nasional tercatat sebesar 103,48, yang menunjukkan nelayan secara umum masih memperoleh keuntungan, meskipun tidak terlalu besar.

Di Kalimantan Selatan, NTN tercatat sebesar 97,10, yang berarti nelayan di wilayah ini masih menghadapi tekanan biaya produksi yang cukup berat sehingga nilai NTN berada di bawah angka ideal 100. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan nelayan belum sepenuhnya mampu menutupi biaya produksi secara optimal. Secara regional, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat menunjukkan nilai NTN yang lebih baik, masing-masing 100,28 dan 100,94, sedikit di atas angka 100, menandakan nelayan di wilayah ini relatif lebih sejahtera. Kalimantan Tengah memiliki NTN sebesar 97,98, masih di bawah nasional, sedangkan Kalimantan Utara justru mencatat NTN tertinggi di Kalimantan, yaitu 103,21, sedikit di atas nilai nasional.

Tren NTN di Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir relatif fluktuatif, dengan nilai sekitar 99 pada 2023, naik ke 100 pada 2024, namun kembali turun ke 97,10 pada 2025. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar, pakan, dan obat-obatan yang menekan kesejahteraan nelayan.

Berita dari Bisnis Indonesia dan Republika pada kuartal pertama 2025 menyoroti bahwa kenaikan biaya operasional menjadi faktor utama yang menekan NTN di beberapa daerah, termasuk Kalimantan Selatan. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengupayakan subsidi bahan bakar dan peningkatan teknologi penangkapan untuk membantu nelayan meningkatkan efisiensi dan pendapatan.

Dari data dan tren yang ada, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan petani di Kalimantan secara umum cukup baik dan sebagian besar berada di atas rata-rata nasional, terutama di Kalimantan Timur dan Barat. Namun, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara masih perlu perhatian khusus untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengendalian biaya produksi dan peningkatan produktivitas.

Sementara itu, kesejahteraan nelayan di Kalimantan lebih beragam dan beberapa wilayah, termasuk Kalimantan Selatan dan Tengah, masih menghadapi tekanan biaya produksi yang cukup berat sehingga nilai NTN berada di bawah angka nasional. Upaya pengendalian biaya produksi dan peningkatan efisiensi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Dukungan kebijakan pemerintah seperti subsidi, pelatihan teknologi, dan penguatan kelembagaan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini dan mendorong ketahanan pangan serta ekonomi regional yang lebih baik.

1.2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Grafik 1.21 Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Selatan



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Diolah)

Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Selatan mencapai 75,19, mengalami peningkatan sebesar 0,71% dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 74,66. Dengan capaian ini, Kalimantan Selatan masuk dalam kategori IPM "tinggi" dan berhasil melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 75,02, menandakan progres pembangunan manusia yang lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi lain di Indonesia. IPM dibangun dari tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, yang menunjukkan perkembangan sebagai berikut:

- a. **Dimensi Kesehatan**
Umur Harapan Hidup di Kalimantan Selatan mencapai 74,18 tahun, mencerminkan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Dimensi umur panjang dan hidup sehat mengalami pertumbuhan sebesar 0,28% dibanding tahun sebelumnya.
- b. **Dimensi Pendidikan**
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 8,62 tahun, mencerminkan peningkatan partisipasi pendidikan formal di masyarakat. Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 12,87 tahun, menunjukkan ekspektasi meningkatnya akses pendidikan bagi generasi mendatang. Dimensi pengetahuan mengalami pertumbuhan sebesar 0,69%, yang kemungkinan didorong oleh peningkatan akses pendidikan dan program literasi di daerah.
- c. **Dimensi Standar Hidup Layak**
Pengeluaran per kapita mencapai 13,39 juta rupiah, menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dimensi standar hidup layak mengalami peningkatan signifikan sebesar 3,44%, mencerminkan peningkatan pendapatan masyarakat dan daya beli yang lebih baik.

Tren IPM Kalimantan Selatan dalam Perspektif Nasional

Dalam lima tahun terakhir (2019-2024), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, mencerminkan perbaikan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Berikut adalah perkembangan IPM Kalimantan Selatan dibandingkan dengan IPM nasional dalam periode tersebut:

Tahun	IPM Kalimantan Selatan	Growth (%)	IPM Nasional	Growth (%)
2019	72,91	0,81	71,92	0,73
2020	73,16	0,34	72,29	0,51
2021	73,78	0,85	72,72	0,59
2022	74,22	0,6	73,05	0,45
2023	74,66	0,59	74	1,3
2024	75,19	0,71	75,02	1,38

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Diolah)

Analisis Tren 5 Tahun Terakhir (2019-2024)

Selama periode 2019-2024, IPM Kalimantan Selatan rata-rata tumbuh sekitar 0,65% per tahun, menunjukkan perbaikan yang cukup konsisten meskipun sempat melambat pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19.

Sementara itu, IPM nasional mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata 0,82% per tahun, di mana kenaikan signifikan terjadi pada 2023 dan 2024 akibat pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Selama enam tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan menunjukkan tren yang konsisten meningkat, meskipun sempat melambat akibat pandemi COVID-19. Tahun 2020 menjadi titik perlambatan dengan pertumbuhan hanya 0,34%, mencerminkan dampak pandemi terhadap akses pendidikan, layanan kesehatan, dan daya beli masyarakat.

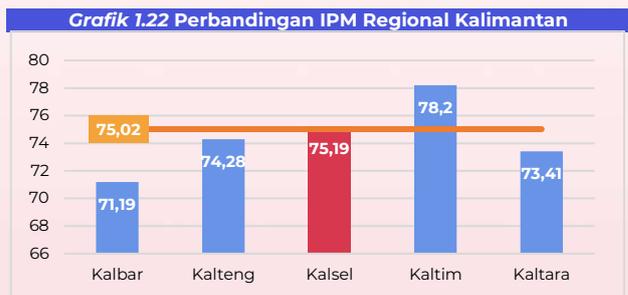
Pemulihan mulai terlihat pada 2021 dengan pertumbuhan IPM meningkat menjadi 0,85%, melampaui pertumbuhan IPM nasional. Tren positif ini terus berlanjut hingga 2024 dengan pertumbuhan stabil di atas 0,5% setiap tahunnya. Puncaknya, pada tahun 2024, IPM Kalimantan Selatan mencapai 75,19 dan untuk pertama kalinya melampaui IPM

nasional (75,02), menunjukkan daya saing pembangunan manusia yang semakin kuat.

Secara umum, IPM Kalimantan Selatan sejak 2019 selalu berada di atas rata-rata nasional. Keunggulan ini ditopang oleh dimensi kesehatan dan standar hidup yang relatif lebih baik, dengan Umur Harapan Hidup mencapai 74,18 tahun dan pengeluaran per kapita yang terus meningkat. Namun, tantangan masih ada pada aspek pendidikan, khususnya Rata-rata Lama Sekolah yang masih di bawah 9 tahun.

Ke depan, upaya pemerataan peningkatan IPM di seluruh wilayah, khususnya melalui perbaikan akses dan kualitas pendidikan, perlu menjadi prioritas agar capaian pembangunan manusia semakin inklusif dan berkelanjutan.

Analisis IPM Regional Kalimantan Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Diolah)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan menunjukkan variasi yang cukup mencolok antarprovinsi. Beberapa provinsi mencatatkan angka di atas rata-rata nasional, sementara yang lain masih tertinggal. Secara keseluruhan, IPM nasional berada pada angka 75,02, menjadi tolok ukur utama dalam analisis ini.

Dari lima provinsi di Kalimantan, Kalimantan Timur mencatatkan IPM tertinggi dengan angka 78,2, jauh di atas rata-rata nasional. Hal ini mencerminkan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih maju, didukung oleh akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik. Sebaliknya, Kalimantan Barat memiliki IPM terendah, yakni 71,19, yang menunjukkan masih adanya tantangan signifikan dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang perlu segera diatasi.

Kalimantan Selatan mencatatkan IPM sebesar 75,19, sedikit di atas rata-rata nasional. Posisi ini mencerminkan kemajuan yang telah dicapai dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, meskipun menunjukkan pencapaian yang relatif baik, masih terdapat ruang untuk perbaikan guna memastikan pertumbuhan yang lebih merata di seluruh wilayah provinsi.

Sementara itu, Kalimantan Tengah mencatatkan IPM sebesar 74,28, sedikit di bawah rata-rata nasional. Meskipun mengalami kemajuan, provinsi ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalimantan Utara, dengan IPM 73,41, juga berada di bawah rata-rata nasional, tetapi memiliki potensi besar untuk pertumbuhan lebih lanjut dalam pembangunan manusia.

Dari perspektif regional, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antarprovinsi di Kalimantan dalam hal IPM. Kalimantan Timur, dengan angka tertinggi, menjadi contoh keberhasilan pembangunan, sementara Kalimantan Barat masih memerlukan perhatian lebih dalam berbagai aspek pembangunan. Untuk mengatasi disparitas ini, diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi, terutama dalam meningkatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan penguatan ekonomi di daerah yang masih tertinggal.

Secara khusus, Kalimantan Selatan memiliki posisi yang cukup strategis dalam konteks IPM di Kalimantan. Dengan berada sedikit di atas rata-rata nasional, provinsi ini menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan manusia yang lebih baik dibandingkan beberapa provinsi lain di wilayah tersebut. Keunggulan relatif ini didukung oleh pencapaian dalam sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan dan kualitas tenaga pendidik, serta perbaikan fasilitas dan layanan kesehatan.

Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa pembangunan manusia di Kalimantan masih menghadapi tantangan

besar, terutama terkait dengan kesenjangan antarprovinsi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan agar seluruh wilayah di Kalimantan dapat mencapai standar kesejahteraan yang lebih baik.

Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan tahun 2024 mencapai 75,19 dan berada dalam kategori "tinggi", masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar pertumbuhan IPM lebih merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kebijakan strategis yang berfokus pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan:

- Perluasan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, peningkatan layanan kesehatan preventif, serta optimalisasi program jaminan kesehatan akan berkontribusi pada peningkatan angka harapan hidup dan kualitas hidup masyarakat.
- Digitalisasi pendidikan, penguatan pendidikan vokasi, serta peningkatan kapasitas guru diperlukan untuk mendorong peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, sehingga SDM Kalimantan Selatan lebih kompetitif.
- Pengembangan sektor berbasis potensi lokal, hilirisasi industri, serta pemberdayaan UMKM akan meningkatkan daya saing ekonomi, mendorong peningkatan pengeluaran per kapita, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
- Pemanfaatan data yang terintegrasi dalam perumusan kebijakan serta inovasi dalam tata kelola pemerintahan akan memastikan program pembangunan lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan IPM secara menyeluruh.



Halaman ini sengaja dikosongkan.

BAB 02

Analisis Fiskal Regional



"Fiscal resilience is not about having more, but doing better with less — building smarter systems, not just bigger budgets."

Kinerja fiskal regional Kalimantan Selatan, baik dari sisi APBN maupun APBD tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional dan global. Komponen pendapatan dan belanja negara dikelola dengan responsif dan *prudent* agar lebih tepat sasaran dan berdaya ungkit tinggi terhadap pembangunan. Penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) diakselerasi guna memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program prioritas sejak awal tahun. Tingkat defisit APBN tetap terjaga dalam batas aman, mencerminkan pengelolaan fiskal yang hati-hati dan kredibel. APBN dan APBD sebagai bagian dari *government spending* tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas, daya beli masyarakat, serta memperkuat daya tahan ekonomi di daerah.

BAB 02

ANALISIS EKONOMI REGIONAL

2.1. Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen fiskal yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. APBN pada tahun 2025 memiliki tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang merupakan dasar transformasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Selatan pada awal tahun 2025 menghadapi tantangan besar baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara. Capaian penerimaan APBN s.d. 31 Maret 2025 di Kalimantan Selatan

menunjukkan perlambatan yang disebabkan oleh gejolak perekonomian global yang mengakibatkan penurunan harga pada beberapa komoditas utama Indonesia, antara lain batubara, minyak mentah, dan nikel. Selain itu, terdapat pembaharuan sistem perpajakan digital menggunakan Coretax yang implementasinya masih belum optimal sehingga menghambat proses administrasi perpajakan secara nasional. Di sisi lain, belanja APBN s.d. 31 Maret 2025 juga terkoreksi negatif disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Komponen belanja yang mengalami efisiensi anggaran antara lain pada belanja barang dan/jasa serta belanja modal.

Berikut disajikan data *I-Account* APBN Kalimantan Selatan Triwulan I 2025.

Tabel 2.1 I-Account APBN Kalimantan Selatan Triwulan I 2025 (Miliar Rp)

I-Account (Miliar Rupiah)	s.d. Triwulan I 2024			s.d. Triwulan I 2025			Growth (%)
	PAGU	REALISASI	%REAL	PAGU	REALISASI	%REAL	
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	23.310,74	3.712,49	15,93	22.017,68	2.052,30	9,32	(44,72)
Penerimaan Perpajakan	21.858,57	3.181,12	14,55	20.623,36	1.594,76	7,73	(49,87)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.452,17	531,38	36,59	1.394,31	457,54	32,81	(13,90)
Hibah	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA NEGARA	41.686,43	8.281,18	19,87	37.824,09	8.537,60	22,57	3,10
BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BPP)	10.044,14	2.091,54	20,82	9.923,97	1.527,23	15,39	(26,98)
Belanja Pegawai	4.042,78	1.007,93	24,93	3.912,61	1.105,35	28,25	9,67
Belanja Barang	4.725,84	972,57	20,58	4.908,11	374,55	7,63	(61,49)
Belanja Modal	1.257,94	103,12	8,20	1.084,34	38,55	3,56	(62,61)
Belanja Bantuan Sosial	17,59	7,93	45,08	18,91	8,78	46,42	10,74
TRANSFER KE DAERAH (TKD)	31.642,29	6.189,64	19,56	27.900,11	7.010,36	25,13	13,26
Dana Transfer Umum (DTU)	26.378,39	5.073,24	19,23	22.811,27	5.611,19	24,60	10,60
Dana Alokasi Umum	8.525,78	2.294,81	26,92	8.842,87	2.418,62	27,35	5,40
Dana Bagi Hasil	17.852,61	2.778,43	15,56	13.968,40	3.192,57	22,86	14,91
Dana Transfer Khusus (DTK)	3.420,39	467,18	13,66	3.419,23	677,39	19,81	45,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	1.065,95	-	-	796,73	2,62	0,33	-
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	2.354,44	467,18	19,84	2.622,50	674,77	25,73	44,44
Insentif Fiskal	314,61	7,54	2,40	183,41	11,30	-	49,80
Insentif Fiskal	314,61	7,54	2,40	183,41	11,30	6,16	49,80
Dana Desa	1.514,40	641,68	42,37	1.486,20	710,48	47,81	10,72
Dana Desa	1.514,40	641,68	42,37	1.486,20	710,48	47,81	10,72
Hibah Daerah	14,50	-	-	-	-	-	-
Hibah Daerah	14,50	-	-	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT	(18.375,69)	(4.568,68)	24,86	(15.806,41)	(6.485,30)	41,03	41,95
PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	(18.375,69)	(4.568,68)	24,86	(15.806,41)	(6.485,30)	41,03	41,95

Sumber: OM SPAN (Diolah)

2.2.1 Pendapatan Negara

Memasuki triwulan pertama tahun 2025, kinerja penerimaan negara di wilayah Kalimantan Selatan mengalami tekanan yang cukup signifikan. Total penerimaan negara dan hibah tercatat sebesar Rp2,05 triliun, atau hanya 9,32% dari target anggaran sebesar Rp22,02 triliun. Angka ini menurun tajam jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana realisasi mencapai Rp3,71 triliun atau 15,93% dari target. Secara *year-on-year*, capaian penerimaan negara di Kalimantan Selatan mengalami kontraksi sebesar 44,72%.

Penurunan terbesar terjadi pada komponen penerimaan perpajakan. Hingga akhir Maret 2025, realisasi penerimaan perpajakan hanya mencapai Rp1,59 triliun, atau 7,73% dari target tahunan, jauh lebih rendah dibandingkan penerimaan perpajakan pada triwulan pertama 2024 yang mencapai 14,55% dari target atau secara nominal terealisasi sebesar Rp3,18 triliun. Komponen penerimaan perpajakan mengalami kontraksi 49,87% yoy, yang mencerminkan adanya tantangan dan tekanan yang signifikan, baik dari sisi ekonomi domestik maupun mancanegara. Penurunan ini sebagian besar dipengaruhi oleh restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menyebabkan penerimaan perpajakan dari PPN masih tercatat negatif sampai dengan Maret 2025. Selain itu, ketegangan geopolitik global menyebabkan penurunan harga komoditas unggulan seperti batubara dan kelapa sawit yang turut menopang perekonomian Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami penurunan, meskipun tidak sedalam komponen penerimaan yang berasal dari perpajakan. Hingga Triwulan I 2025, realisasi PNBP mencapai Rp457,54 miliar, turun sekitar 13,90% dari capaian tahun sebelumnya sebesar Rp531,38 miliar. Namun, jika dilihat dari rasio realisasi terhadap target, PNBP masih menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik, dengan tingkat realisasi sebesar 32,81%,

hanya sedikit di bawah realisasi tahun lalu yang mencapai 36,59%.

Berikut disajikan perkembangan realisasi pendapatan negara yang disajikan rinci per jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2.2.1.1. Pendapatan Perpajakan

Berikut disajikan data pendapatan perpajakan yang meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebagai berikut.

Tabel 2.2 Rincian Pendapatan Perpajakan Per Komponen
(Miliar Rp)

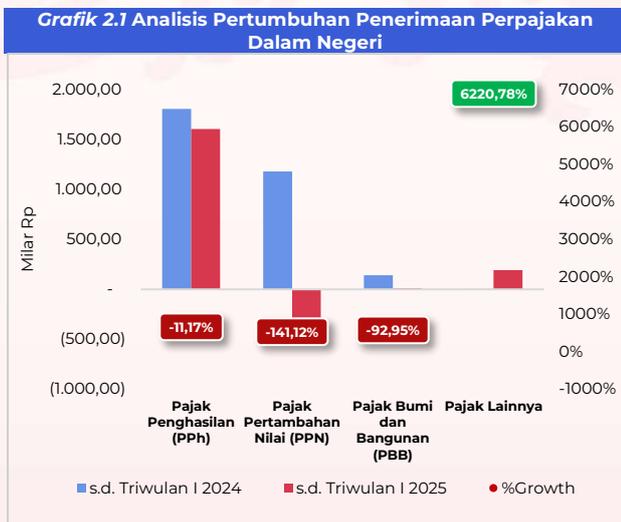
Komponen Pendapatan		Triwulan I 2025		Persentase (%)
		Target	Realisasi	
Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri	Pajak Penghasilan (PPh)	10.366,34	1.606,83	15,50%
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	9.694,09	(485,49)	-5,01%
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	281,21	9,99	3,55%
	Pajak Lainnya	20,58	192,26	934,21%
Total Penerimaan Pajak Dalam Negeri		20.362,22	1.323,59	6,50%
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	Bea Masuk	34,24	11,00	32,12%
	Bea Keluar/Pungutan Ekspor	225,53	259,69	115,15%
	Cukai	1,37	0,48	35,22%
Total Penerimaan Pajak Dalam Negeri		261,14	271,17	103,84%
Total Penerimaan Perpajakan		20.623,36	1.594,76	7,73%

Sumber: OM SPAN, DJP, DJBC (Diolah)

Pada triwulan I tahun 2025, total penerimaan perpajakan di Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp1.594,76 miliar dari pagu sebesar Rp20.623,36 miliar, atau setara 7,73% dari target. Apabila dibandingkan per jenis komponen pendapatan, komponen pajak lainnya mencatatkan capaian persentase tertinggi, mencapai 934,21% dari pagu yang ditetapkan. Di sisi lain, komponen PPN (Pajak Pertambahan Nilai) justru mencatatkan realisasi negatif sebesar -5,01%, yang disebabkan oleh tingginya restitusi PPN pada awal tahun dan menjadi faktor negasi terhadap total penerimaan pajak dalam negeri.

Sementara itu, bea keluar atau pungutan ekspor juga menunjukkan kinerja sangat positif dengan realisasi mencapai 115,15%, melebihi pagu yang ditetapkan sebesar Rp225,53 miliar. Hal ini menunjukkan capaian aktivitas ekspor komoditas unggulan Kalimantan Selatan yang cukup memuaskan karena tingginya harga referensi komoditas yang menjadi dasar penetapan tarif Bea Keluar di tengah dinamika dan gejolak geopolitik global.

Untuk melihat lebih jelas komparasi kinerja perpajakan dalam negeri secara yoy, tren, dan komposisinya, berikut disajikan grafik penerimaan perpajakan dalam negeri Kalimantan Selatan untuk periode triwulan I 2025.



Sumber: OM SPAN, DJP(Diolah)

Hingga triwulan I 2025, penerimaan perpajakan dalam negeri di Kalimantan Selatan mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi pada pos-pos utama yang menjadi *backbone* penerimaan pajak negara secara regional, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara komponen penerimaan Pajak Lainnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berikut disajikan detail analisis perkembangan penerimaan perpajakan dalam negeri per komponen:

a) Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) tercatat sebesar Rp1.606,83 miliar, turun 11,17% dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.808,87 miliar. Penurunan ini mencerminkan melemahnya aktivitas usaha dan investasi di Kalimantan Selatan, terutama pada sektor-sektor unggulan seperti pertambangan, perdagangan, dan jasa, yang secara historis menyumbang porsi besar terhadap PPh, baik dari sektor badan maupun orang pribadi (PPh 21).

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kontraksi paling signifikan terjadi pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 141,12% yoy. Secara nominal, realisasi PPN justru mencatatkan angka negatif sebesar -Rp485,49 miliar yang disebabkan oleh adanya restitusi (pengembalian pajak) dalam jumlah besar. Tingginya restitusi pajak pada awal tahun 2025 disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain turunnya harga komoditas yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak pada tahun sebelumnya, implementasi insentif pajak (PPN DTP) untuk pembelian beberapa barang seperti rumah tapak dan rumah susun, kendaraan listrik dan *hybrid*, dan pembelian tiket pesawat domestik, serta kebijakan stimulus berupa pengembalian PPN yang dipercepat untuk wajib pajak tertentu, antara lain eksportir dan wajib pajak pada sektor strategis. Diharapkan dengan berbagai insentif dan stimulus kebijakan fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat segera memulihkan kondisi perekonomian domestik, sehingga tren restitusi yang tinggi dapat diimbangi oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat, sehingga kedepannya penerimaan PPN diharapkan dapat kembali tumbuh positif guna mendukung kestabilan APBN secara keseluruhan.

c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga mengalami penurunan tajam sebesar 95,92%, dari Rp141,78 miliar pada Triwulan I 2024 menjadi hanya sebesar Rp9,99 miliar pada Triwulan I 2025. Salah satu faktor utama penurunan penerimaan PBB adalah perpindahan wajib pajak cabang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak pusat terdaftar. Hal ini mengakibatkan setoran PBB yang seharusnya diterima oleh KPP di Kalimantan Selatan tidak tercatat dalam wilayah tersebut.

d) Pajak Lainnya

Di sisi lain, penerimaan perpajakan dari komponen Pajak Lainnya menunjukkan lonjakan signifikan sebesar 6220,78%, naik dari Rp3,04 miliar pada Triwulan I 2024 menjadi Rp192,26 miliar pada Triwulan I 2025.

Kenaikan ini berasal dari pos penerimaan baru berupa deposit pajak. Deposit pajak merupakan setoran pajak yang dilakukan di muka atau sebelum kewajiban pajaknya jatuh tempo dan sepenuhnya teradministrasi. Dalam konteks APBN, deposit pajak belum dapat langsung diidentifikasi atau diklasifikasikan ke dalam jenis pajak tertentu (seperti PPh atau PPN), sehingga sementara waktu dicatat dalam pos "Pajak Lainnya".

Untuk mengetahui besaran pajak yang diterima dari sektor-sektor ekonomi tertentu, berikut disajikan data penerimaan perpajakan dalam negeri di Kalimantan Selatan secara sektoral.

Tabel 2.3 Realisasi dan Kontribusi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Sektoral

No.	Nama Sektor	Realisasi (Miliar Rp)		Growth	Kontribusi thd Total Penerimaan	
		2024	2025		2024	2025
1	Pengangkutan dan Pergudangan	629,46	486,30	-22,74%	20,08%	36,74%
2	Administrasi Pemerintah	251,00	295,23	17,62%	8,01%	22,31%
3	Perdagangan Besar dan Eceran	434,52	252,60	-41,87%	13,86%	19,08%
4	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	124,72	114,92	-7,86%	3,98%	8,68%
5	Aktivitas Penyewaan dan SGU	105,94	100,56	-5,07%	3,38%	7,60%
6	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	83,26	68,82	-17,34%	2,66%	5,20%
7	Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan	60,76	58,15	-4,30%	1,94%	4,39%
8	Real Estate	44,45	52,38	17,84%	1,42%	3,96%
9	Pertambangan Penggali	1.057,57	32,73	-96,91%	33,74%	2,47%
10	Industri Pengolahan	170,80	(262,45)	-253,66%	5,45%	-19,83%
11	Sektor Lainnya	171,84	124,36	-27,63%	5,48%	9,40%

Sumber: OM SPAN, DJP (Diolah)

Data penerimaan pajak sektoral di atas menunjukkan pergeseran signifikan pada beberapa sektor utama. Sektor Pengangkutan dan Pergudangan menjadi penyumbang terbesar terhadap total penerimaan pajak sampai dengan Maret 2025 dengan kontribusi sebesar 36,74%, meskipun capaiannya secara nominal mengalami kontraksi -22,74% dibanding tahun sebelumnya. Sektor Administrasi Pemerintahan mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 17,62% dengan kontribusi yang juga meningkat menjadi 22,31% pada tahun 2025. Sebaliknya, sektor Pertambangan dan Penggalian yang sebelumnya mendominasi penerimaan perpajakan Kalimantan Selatan dengan kontribusi sebesar 33,74% di tahun 2024, mengalami

penurunan yang signifikan hingga -96,91% sehingga hanya dapat berkontribusi sebesar 2,47% pada tahun 2025. Di sisi lain, sektor Industri Pengolahan bahkan mencatatkan realisasi negatif sebesar -Rp262,45 miliar. Angka tersebut mencerminkan kontraksi tajam sebesar -253,66%, dibandingkan capaian tahun lalu serta memberikan dampak negatif terhadap total penerimaan pajak Kalimantan Selatan tahun 2025 dengan kontribusi -19,83%.

Fenomena *shifting* penerimaan pajak sektoral di Kalimantan Selatan merupakan sinyal penting yang menunjukkan bahwa struktur ekonomi regional sedang mengalami perubahan. Peralihan kontribusi dari sektor ekstraktif dan *resource-based* seperti pertambangan ke sektor lain seperti pengangkutan, administrasi pemerintahan, dan perdagangan menandakan adanya dinamika baru dalam sumber-sumber penerimaan pajak. Dengan berfokus pada pada sektor-sektor yang tumbuh relatif stabil, diversifikasi basis pajak dapat didorong agar penerimaan negara tidak lagi bergantung pada sektor yang volatil seperti pertambangan dan penggalian. Melalui penguatan sektor-sektor baru ini, diharapkan struktur penerimaan pajak Kalimantan Selatan menjadi lebih inklusif, *sustainable* dan resilien terhadap gejolak ekonomi.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Untuk melihat lebih jelas komparasi kinerja penerimaan perpajakan secara yoy, tren, dan komposisinya, berikut disajikan grafik penerimaan kepabeanan dan cukai di wilayah Kalimantan Selatan untuk periode triwulan I 2025.



Sumber: OM SPAN, DJBC (Diolah)

Lain halnya dengan perpajakan dalam negeri yang cenderung menurun, komponen penerimaan kepabeanan dan cukai justru mencatatkan performa yang relatif stabil, bahkan mengalami peningkatan pada beberapa pos penerimaan, yaitu Bea Masuk dan Bea Keluar. Sementara kinerja penerimaan negara dari Cukai mengalami perlambatan pada awal tahun 2025 ini. Berikut adalah analisis perkembangan penerimaan kepabeanan dan cukai per komponennya.

a) Bea Masuk

Bea Masuk tercatat tumbuh sebesar 9,51%, dari Rp10,04 miliar pada Triwulan I 2024 menjadi Rp11,00 miliar pada periode yang sama tahun 2025. Meskipun tidak terlalu tinggi, pertumbuhan realisasi Bea Masuk mengindikasikan peningkatan aktivitas ekonomi dan permintaan domestik. Pertumbuhan Bea Masuk juga berbanding lurus dengan aktivitas impor di wilayah Kalimantan Selatan yang didominasi oleh komoditas minyak bumi dan olahannya (*HS code 2710*). Kalimantan Selatan memiliki sejumlah sektor industri yang masih bergantung pada energi fosil seperti pembangkit listrik, transportasi, dan manufaktur. Selain itu, berbagai alat berat pertambangan seperti *excavator*, *dump truck*, *bulldozer*, dan *wheel loader* juga menggunakan bahan bakar solar (*diesel fuel*) yang merupakan produk olahan dari minyak bumi. Sebagai salah satu daerah penghasil batubara terbesar di Indonesia, tingginya impor minyak bumi di Kalimantan Selatan disebabkan oleh tingginya kebutuhan bahan bakar solar untuk mendukung aktivitas pertambangan.

b) Bea Keluar / Pungutan Ekspor

Sementara itu, Bea Keluar atau Pungutan Ekspor mengalami lonjakan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 629,97%, dari hanya Rp35,58 miliar pada Triwulan I 2024 menjadi sebesar Rp259,69 miliar pada Triwulan I 2025. Peningkatan yang signifikan ini didorong oleh peningkatan ekspor komoditas unggulan Kalimantan Selatan seperti batubara dan kelapa sawit (CPO). Selain itu, kebijakan tarif

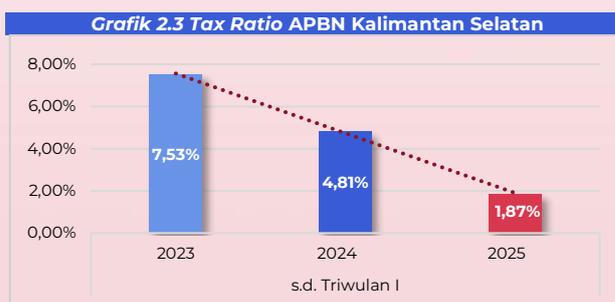
ekspor progresif yang diberlakukan pemerintah untuk menyeimbangkan pasar domestik dan internasional turut meningkatkan pungutan ekspor yang dikenakan pada komoditas tertentu.

c) Cukai

Berbeda dengan dua pos penerimaan sebelumnya, penerimaan negara dari Cukai justru mengalami penurunan tajam sebesar 59,60%, dari Rp1,19 miliar pada Triwulan I 2024 menjadi Rp0,48 miliar pada Triwulan I 2025. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti menurunnya konsumsi barang kena cukai (terutama rokok dan *vape*), berkurangnya distribusi barang kena cukai di wilayah Kalimantan Selatan, serta upaya peningkatan pengawasan terhadap peredaran produk ilegal yang menyebabkan berkurangnya penjualan produk kena cukai secara resmi.

Analisis Kinerja Penerimaan Perpajakan berdasarkan Tax Ratio

Tax ratio adalah rasio atau perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi sektor perpajakan terhadap total aktivitas ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu.



Sumber: OM SPAN, DJP, DJBC, BPS (Diolah)

Tax Ratio di Kalimantan Selatan yang dihitung berdasarkan pendapatan pajak APBN yang diterima pada periode Triwulan I 2023 sampai dengan Triwulan I 2025 menunjukkan tren yang menurun secara signifikan. Pada Triwulan I, *tax ratio* turun dari 7,53% pada tahun 2023, menjadi 4,81% pada tahun 2024, dan kembali merosot tajam menjadi hanya sebesar 1,87% pada tahun

2025. Penurunan *tax ratio* memberikan implikasi yang serius terhadap kemampuan fiskal pemerintah. Ketika *tax ratio* menurun, artinya penerimaan pajak tumbuh lebih lambat dibanding pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan kontraksi penerimaan perpajakan pada triwulan I 2025 yang utamanya disebabkan oleh lonjakan restitusi pajak serta penurunan penerimaan dari sektor dominan seperti pertambangan.

Di sisi lain, fenomena penurunan *tax ratio* ini perlu menjadi perhatian karena memberikan sinyal kepada pemerintah terkait adanya kemungkinan potensi penerimaan pajak yang bocor atau belum dapat digali dengan optimal. Untuk itu, diperlukan suatu reformasi kebijakan yang dapat mendorong penerimaan perpajakan, seperti digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik, penguatan basis data perpajakan, dan lain-lain.

Ke depan, penguatan *tax ratio* Kalimantan Selatan menjadi harapan penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memperkuat basis data pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan potensi sektor-sektor unggulan, Kalimantan Selatan memiliki peluang besar untuk kembali meningkatkan kontribusi pajaknya terhadap perekonomian. Melalui upaya kolektif ini, diharapkan *tax ratio* Kalsel tidak hanya kembali meningkat secara bertahap, tetapi juga mencerminkan sistem fiskal yang lebih sehat dan responsif dalam mendukung kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

2.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam rangka memperkuat struktur penerimaan negara dan meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan, Pemerintah terus mengoptimalkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai salah satu sumber pendapatan yang strategis. PNBP berperan penting dalam mendukung keberlangsungan kegiatan operasional pemerintahan serta penyediaan

layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Berikut disajikan data PNBP yang meliputi PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU sebagai berikut.

Tabel 2.4 Rincian PNBP per Komponen

Komponen Pendapatan	Realisasi PNBP (Miliar Rp)		Growth (%)	% thdp Total PNBP
	TW I 2024	TW I 2025		
Pendapatan PNBP Lainnya	399,76	318,36	-20,36%	69,58%
Pengelolaan BMN	5,75	5,78	0,37%	1,26%
Administrasi dan Penegakan Huk	52,04	51,51	-1,01%	11,26%
Keslinsos dan Keagamaan	30,63	17,67	-42,31%	3,86%
Dikbudristek	29,96	31,66	5,67%	6,92%
Jasa Transportasi dan Kominfo	202,43	181,44	-10,37%	39,66%
Jasa Lainnya	0,31	0,38	21,64%	0,08%
Bunga dan Pengelolaan Keuanga	7,07	3,23	-54,39%	0,71%
Denda	13,00	1,30	-90,03%	0,28%
Lain-lain	58,57	25,40	-56,63%	5,55%
Pendapatan BLU	131,61	139,17	5,74%	30,42%
Pendapatan Jasa Layanan Umum	118,36	129,35	9,28%	28,27%
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	11,78	7,90	-32,98%	1,73%
Pendapatan BLU Lainnya	1,47	1,92	31,03%	0,42%
TOTAL	531,38	457,54	-13,90%	100,00%

Sumber: OM SPAN (Diolah)

Pada triwulan I tahun 2025, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Kalimantan Selatan mencatatkan realisasi sebesar Rp457,54 miliar dari total target Rp1.394,32 miliar, atau setara dengan 32,83% dari target tahunan. Secara umum, capaian ini mencerminkan tren yang cukup positif untuk awal tahun, mengingat realisasi PNBP telah mencapai hampir sepertiga dari target.

Jika dilihat per komponennya, PNBP Lainnya memberikan kontribusi terbesar dengan realisasi mencapai Rp318,36 miliar dari target Rp980,83 miliar, atau sekitar 32,46%. Sementara itu, pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU) juga mencatatkan capaian yang positif, yaitu Rp139,17 miliar dari target Rp413,49 miliar dengan persentase 33,65%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PNBP lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa satuan kerja BLU telah mampu mengelola layanan publik secara efisien dan berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara sejak awal tahun.

Untuk melihat lebih jelas komparasi kinerja PNBP secara yoy, tren, dan komposisinya, berikut disajikan grafik penerimaan perpajakan dalam negeri Kalimantan Selatan untuk periode triwulan I 2025.



Sumber: OM SPAN (Diolah)

Pada Triwulan I 2025, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut di Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp457,53 miliar, menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp531,37 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya PNBP Lainnya dari Rp399,76 miliar menjadi Rp318,36 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 20,37%. Sementara itu, Pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU) justru menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari Rp131,61 miliar menjadi Rp139,17 miliar atau tumbuh sebesar 5,73%. Peningkatan ini menandakan perbaikan kualitas layanan dan efisiensi kinerja institusi BLU di daerah, terutama dari satuan kerja seperti rumah sakit atau perguruan tinggi.

a) PNBP Lainnya

PNBP Lainnya adalah komponen dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencakup pendapatan-pendapatan di luar komponen utama seperti pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). PNBP Lainnya merupakan kelompok pendapatan yang sangat beragam sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, antara lain meliputi pendapatan pengelolaan BMN (misalnya: sewa aset, lelang barang sitaan, dll), pendapatan dari administrasi dan penegakan hukum (misalnya: biaya administrasi, denda pelanggaran, hasil tilang), pendapatan dari transportasi, informasi dan komunikasi (misalnya: layanan radio frekuensi, penggunaan fasilitas pelabuhan), pendapatan dari kegiatan sosial keagamaan (misalnya: pendapatan dari penyelenggaraan haji, pelatihan keagamaan, dll).

Sampai dengan triwulan I 2025, pendapatan dari PNBP Lainnya di Kalimantan

Selatan mengalami perlambatan sebesar 20,36%. Berdasarkan data pada tabel di atas, terdapat beberapa subkomponen yang menjadi faktor utama penurunan PNBP Lainnya, antara lain:

- Pendapatan Jasa Transportasi, dan Komunikasi Informasi sebagai kontributor terbesar dalam PNBP (39,66%) mengalami penurunan sebesar 10,37%.
- Pendapatan dari sektor Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan turun signifikan sebesar 42,31%.
- Pendapatan Lain-lain serta Pendapatan dari Denda mencatat kontraksi tajam masing-masing sebesar 56,63% dan 90,03%.
- Pendapatan Bunga dan Pendapatan Pengelolaan Keuangan juga melemah sebesar 54,39%.

Namun demikian, beberapa sektor masih menunjukkan performa yang positif. Misalnya, pendapatan dari sektor Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dikbudristek) tumbuh 5,67%, dan Pendapatan Jasa Lainnya naik 21,64%.

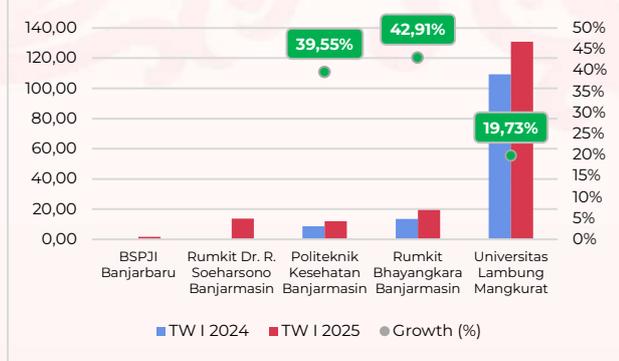
b) PNBP Badan Layanan Umum (BLU)

Sementara itu, Pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU) tetap menunjukkan tren positif dengan yang didorong oleh peningkatan Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar 9,28% dengan kontribusi dominan sebesar 28,27% terhadap total PNBP. Pendapatan BLU lainnya juga tumbuh kuat hingga 31,03% meskipun persentasenya relatif kecil terhadap total PNBP. Namun demikian, perlu diwaspadai penurunan pada pendapatan hasil Kerjasama BLU yang menyusut 32,98% sehubungan dengan berakhirnya kerjasama dengan lembaga/badan usaha dan pemerintah daerah terkait sewa dan pemanfaatan aset, kerja sama operasional, kontrak layanan, dll.

Saat ini, di Kalimantan Selatan terdapat 5 BLU aktif, yaitu Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banjarbaru, Rumkit TK. III Dr. R. Soeharsono Banjarmasin, Politeknik Kesehatan (Poltekkes)

Banjarmasin, Rumkit Bhayangkara Banjarmasin, dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Apabila PNBP dibandingkan berdasarkan kinerja keuangan satuan kerja BLU nya,

Tabel 2.5 Analisis Pertumbuhan Kinerja PNBP BLU



Sumber: OM SPAN (Diolah)

Kontributor PNBP BLU terbesar pada awal tahun 2025 ini adalah Universitas Lambung Mangkurat (ULM), dengan realisasi mencapai Rp130,87 miliar, naik 19,73% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh pendapatan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) sehubungan dengan awal perkuliahan semester genap tahun 2024/2025 yang jatuh pada bulan Januari dan Februari. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan tinggi tetap menjadi andalan dalam struktur penerimaan BLU di daerah.

Sementara itu, Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin juga mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi, dari Rp13,61 miliar menjadi Rp19,45 miliar, atau meningkat sekitar 42,91%. Kinerja ini mencerminkan peningkatan aktivitas layanan kesehatan kepada masyarakat, baik melalui pelayanan umum, rawat inap, maupun tindakan medis lainnya. Politeknik Kesehatan Banjarmasin juga menunjukkan kinerja yang positif dengan peningkatan sebesar 39,55%, menandakan bahwa pendidikan vokasi dan layanan pelatihan kesehatan semakin diminati.

Di sisi lain, terdapat dua satuan kerja BLU baru yang ditetapkan pada tahun 2024 lalu dan telah mencatatkan realisasi pada Triwulan I 2025 ini, yaitu BSPJI Banjarbaru dan Rumkit Dr. R. Soeharsono Banjarmasin, masing-masing dengan kontribusi pendapatan sebesar Rp1,71 miliar dan Rp13,83 miliar.

Kehadiran satuan kerja tersebut menambah variasi sumber penerimaan dari PNBP sekaligus mencerminkan ekspansi peran BLU dalam mendukung pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Selatan.

2.2.1.3. Prognosis / Outlook Kinerja Pendapatan Negara

Berikut disajikan data prognosis / outlook kinerja APBN di Kalimantan Selatan sebagai berikut.

Tabel 2.6 Prognosis Kinerja APBN Kalimantan Selatan (Miliar Rp)

No	Uraian	Pagu/Target APBN 2025	Realisasi	Proyeksi 2025				Total
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Pendapatan	22.017,68	2.052,30	6.034,93	5.591,24	8.931,26	22.609,74	
	Penerimaan Pajak Dalam Negeri	20.362,23	1.323,59	5.717,92	5.183,41	8.268,07	20.493,00	
	Penerimaan Kepabebean dan Cukai	261,14	271,17	59,62	68,85	68,35	467,99	
	PNBP dan Hibah	1.394,31	457,54	257,39	338,98	594,84	1.648,75	
2	Belanja Negara	37.824,08	8.537,59	7.674,86	10.685,96	9.478,22	36.376,64	
	Belanja K/L	9.923,97	1.527,23	1.879,58	1.957,57	3.536,20	8.900,57	
	TKD	27.900,11	7.010,36	5.795,28	8.728,40	5.942,03	27.476,07	
3	Surplus/Defisit Regional (1-2)	(15.806,40)	(6.485,29)	(1.639,93)	(5.094,72)	(546,96)	(13.766,90)	

Sumber: OM SPAN, DJP, DJBC, ARIMA (Diolah)

Berdasarkan proyeksi tahun 2025, penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp22.609,74 miliar, melampaui target dalam APBN sebesar Rp22.017,68 miliar. Kelebihan sebesar Rp592,06 miliar ini menunjukkan potensi capaian fiskal yang positif meskipun terdapat tantangan dalam realisasi awal tahun. Secara umum, seluruh komponen penerimaan negara, termasuk Penerimaan Pajak Dalam Negeri yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Penerimaan Kepabebean dan Cukai yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah diproyeksikan mengalami peningkatan, baik secara nominal maupun capaian terhadap pagu tahunan.

Grafik 2.5 Trendline Prognosis Kinerja Penerimaan Negara Kalimantan Selatan



Sumber: OM SPAN, DJP, DJBC, ARIMA (Diolah)

Pada Triwulan I tahun 2025, total realisasi penerimaan negara tercatat sebesar Rp2.052,30 miliar atau hanya sekitar 9,3% dari target APBN. Realisasi tersebut menunjukkan capaian yang masih rendah di awal tahun. Faktor musiman seperti aktivitas ekonomi yang cenderung melambat di awal tahun dan penyesuaian administrasi anggaran menjadi penyebab utama lambatnya penerimaan. Komponen penerimaan yang paling signifikan adalah dari penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp1.323,59 miliar, diikuti oleh PNBP sebesar Rp457,54 miliar, dan DJBC sebesar Rp271,17 miliar.

Memasuki Triwulan II dan III, penerimaan diperkirakan akan meningkat signifikan, masing-masing sebesar Rp6.034,93 miliar dan Rp5.591,24 miliar. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi pasca-lebaran, masa pelaporan SPT tahunan, dan penguatan belanja pemerintah yang mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif. Pada periode ini, kontribusi terbesar tetap berasal dari penerimaan pajak dalam negeri, diikuti oleh penerimaan kepabeanan dan cukai, serta PNBP. Pemulihan harga komoditas, peningkatan konsumsi masyarakat, serta stabilitas makroekonomi menjadi faktor pendukung peningkatan penerimaan.

Sementara itu, pada Triwulan IV, penerimaan negara diproyeksikan mencapai puncaknya dengan capaian sebesar Rp8.931,26 miliar, mencerminkan hampir 40% dari total penerimaan tahunan. Peningkatan signifikan pada periode ini merupakan pola umum tahunan yang didorong oleh penyetoran pajak korporasi akhir tahun, penyesuaian PNBP, serta realisasi bea dan cukai atas ekspor dan impor akhir tahun. Dengan pola capaian triwulanan ini, pemerintah perlu menjaga konsistensi kinerja penerimaan di tengah risiko perlambatan global serta memperkuat reformasi perpajakan dan PNBP agar realisasi akhir tahun tetap sejalan dengan proyeksi dan menopang keberlanjutan fiskal.

2.2.1.4. Rekomendasi Kebijakan Pendapatan

Dalam merespons tren penurunan pendapatan negara, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, diperlukan kebijakan yang fokus pada penguatan basis penerimaan dan perbaikan tata kelola perpajakan. Salah satu langkah prioritas adalah optimalisasi penerimaan perpajakan melalui perluasan basis pajak (tax base), terutama dengan mendorong kepatuhan wajib pajak di sektor informal dan sektor unggulan daerah seperti pertambangan, perkebunan, dan industri pengolahan. Digitalisasi sistem perpajakan serta penguatan fungsi pengawasan dan pemeriksaan juga menjadi kunci dalam menekan potensi kebocoran penerimaan.

Selain itu, pemerintah perlu mengakselerasi reformasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), termasuk mendorong badan layanan umum (BLU) untuk meningkatkan inovasi layanan yang bernilai ekonomis. Pemanfaatan aset negara secara produktif, termasuk kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), juga dapat menjadi sumber pendapatan alternatif yang menjanjikan. Di sektor sumber daya alam, kebijakan penyesuaian tarif atau royalti berbasis harga komoditas dunia secara berkala dapat meningkatkan penerimaan DBH secara adil dan proporsional.

Langkah kebijakan lainnya adalah memperkuat sinergi fiskal antara pusat dan daerah dalam rangka mendorong potensi pajak daerah dan retribusi yang belum tergali secara optimal. Pemerintah daerah perlu diberikan dukungan teknis dan regulasi agar mampu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan secara akuntabel. Dengan kombinasi kebijakan struktural, tata kelola yang baik, dan pengawasan yang kuat, optimalisasi pendapatan negara dapat diwujudkan untuk menopang pembangunan dan menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.

2.2.2 Belanja Negara

Pada triwulan I tahun 2025, belanja negara di Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp8.537,60 miliar, meningkat tipis 3,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp8.281,18 miliar. Realisasi tersebut mencapai 22,57% dari pagu belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp37.824,09 miliar. Meski secara agregat terjadi peningkatan, namun terdapat perubahan signifikan dalam struktur komponen belanja. Terlihat bahwa Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mengalami penurunan, sementara Transfer Ke Daerah (TKD) tumbuh cukup solid.

Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Kalimantan Selatan hingga triwulan I 2025 mencerminkan dinamika yang cukup kontras antar komponen. Secara umum, realisasi BPP mengalami kontraksi sebesar 26,98% dibandingkan periode yang sama tahun 2024, dengan nilai mencapai Rp1.527,23 miliar dari total pagu sebesar Rp9.923,97 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal, masing-masing sebesar 61,49% dan 62,61%.

Sebaliknya, Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial mengalami pertumbuhan positif. Belanja Pegawai tumbuh 9,67% dan menjadi komponen belanja terbesar pemerintah pusat dengan porsi realisasi 28,25% dari pagu. Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial tumbuh 10,74%, dengan tingkat penyerapan yang cukup tinggi mencapai 46,42% dari pagu. Kenaikan Belanja Bantuan Sosial mencerminkan perhatian pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi seperti inflasi pangan, ketidakpastian, dan gejolak geopolitik global.

Adapun peningkatan total belanja negara lebih banyak dikontribusikan oleh pertumbuhan Transfer ke Daerah (TKD) yang meningkat sebesar 13,26%. Sampai dengan Triwulan I 2025, komponen belanja TKD telah direalisasikan sebesar Rp7.010,36 miliar, atau sebesar 25,13% dari pagu belanja TKD Rp27.900,11 miliar. Seluruh komponen utama TKD menunjukkan tren positif, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yang tumbuh 44,44%, Dana Desa yang naik 10,72%, serta Insentif Fiskal yang melonjak hampir

50%. Kinerja ini menunjukkan bahwa meskipun BPP mengalami kontraksi sebagai imbas kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah pusat tetap mendorong distribusi fiskal ke daerah untuk memperkuat pelayanan publik dan pembangunan di daerah.

2.1.2.1 Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

Berikut disajikan data perkembangan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada Triwulan I 2025 di Kalimantan Selatan.

Tabel 2.7 Rincian Belanja Pemerintah Pusat Per Komponen

Komponen Belanja		Triwulan I 2025 (Miliar Rp)		%
		Pagu	Realisasi	
Belanja Pemerintah Pusat	Belanja Pegawai	3.912,61	1.105,35	28,25%
	Belanja Barang	4.908,11	374,55	7,63%
	Belanja Modal	1.084,34	38,55	3,56%
	Belanja Bantuan Sosial	18,91	8,78	46,42%
Total Belanja Pemerintah Pusat		9.923,97	1.527,23	15,39%

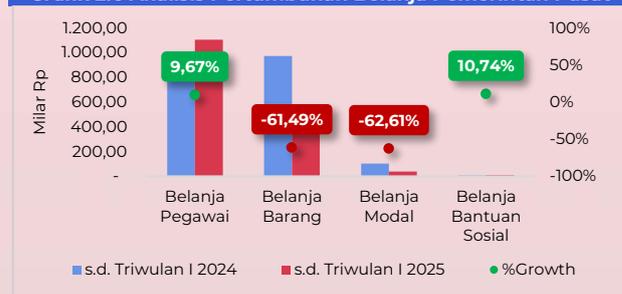
Sumber: OM SPAN (Diolah)

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Kalimantan Selatan mencapai Rp1.527,23 miliar atau sebesar 15,39% dari pagu anggaran Rp9.923,97 miliar. Dari seluruh komponen belanja, Belanja Bantuan Sosial mencatatkan capaian persentase tertinggi, yaitu sebesar 46,42% dari total pagunya. Di sisi lain, Belanja Modal mencatatkan realisasi paling rendah, hanya 3,56% dari total pagu sebesar Rp1,08 triliun. Belanja Pegawai menjadi komponen dengan nilai realisasi terbesar yaitu sebesar Rp1,11 triliun atau 28,25% dari pagunya. Angka ini relatif tinggi dibandingkan komponen belanja lainnya karena sifatnya yang rutin.

Belanja Pemerintah Pusat Per Jenis

Untuk melihat lebih jelas komparasi kinerja BPP secara yoy, tren, dan komposisinya, berikut disajikan grafik BPP Kalimantan Selatan untuk periode triwulan I 2025.

Grafik 2.6 Analisis Pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat



Sumber: OM SPAN (Diolah)

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada Triwulan I 2025 tercatat mengalami penurunan tajam sebesar 26,98%. Penurunan ini terutama bersumber dari kontraksi Belanja Barang sebesar 61,49% dan Belanja Modal sebesar 62,61%. Sampai dengan Maret 2025, Belanja Barang tercatat sebesar Rp374,55 miliar sedangkan Belanja Modal tercatat lebih rendah sebesar Rp38,55 miliar. Penurunan realisasi belanja pada awal tahun 2025 bukan semata terjadi karena perlambatan kegiatan oleh K/L, melainkan merupakan bagian dari langkah efisiensi belanja yang sejalan dengan arahan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Adanya kebijakan efisiensi anggaran ini diharapkan dapat mengurangi pemborosan dengan menekan belanja yang sifatnya tidak esensial dan tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sehingga pemerintah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih produktif, efektif dan efisien untuk program-program prioritas nasional.

Selain itu, penyebab turunnya realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal karena belum adanya realisasi oleh satuan kerja dengan pagu terbesar, yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang akan digunakan untuk membiayai berbagai program kegiatan yang berkaitan dengan swasembada pangan. Penurunan Belanja Barang terutama dikontribusikan oleh turunnya Belanja Barang Non Operasional,

Di sisi lain, realisasi Belanja Pegawai meningkat 9,67% dengan nominal realisasi sebesar Rp1.105,35 miliar dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar Rp1.007,93. Dari sisi persentase terhadap total BPP, Belanja Pegawai menyumbang porsi terbesar yaitu sebesar 28,25%, jauh melampaui belanja barang, belanja modal, maupun belanja bantuan sosial. Peningkatan belanja pegawai. Peningkatan belanja pegawai pada awal tahun ini disebabkan oleh rapelan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS pada Kementerian Agama dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikTi), kenaikan gaji pokok pegawai, serta peningkatan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Apabila

dibreakdown berdasarkan komponen penyusun belanja pegawai, diketahui peningkatan belanja pegawai disebabkan oleh peningkatan belanja gaji dan tunjangan sebesar 8,72%, peningkatan belanja tunjangan kinerja sebesar 14,64%, dan peningkatan belanja honorarium dan lembur sebesar 20,21%.

Di sisi lain, belanja bantuan sosial justru mengalami peningkatan, dari Rp7,93 miliar menjadi Rp8,78 miliar. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli dan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat, terutama di tengah dinamika dan tekanan perekonomian. Pada awal 2025, ekonomi nasional diwarnai oleh fluktuasi harga pangan, dampak lanjutan dari fenomena El Niño terhadap sektor pertanian, serta tekanan eksternal akibat ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi mitra dagang utama. Dalam konteks tersebut, bansos menjadi instrumen penting untuk menjaga kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Belanja Pemerintah Pusat Per Kementerian/Lembaga

Tabel 2.8 Belanja Pemerintah Pusat per K/L

Kementerian/ Lembaga	PAGU (Miliar Rp)			Trendline Pagu	REALISASI (Miliar Rp)			Trendline Realisasi	Growth '24-'25
	2023	2024	2025		2023	2024	2025		
KEMENTERIAN AGAMA	1.501,74	1.560,61	1.630,78		263,53	398,00	427,33		7,37%
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.301,44	1.273,24	1.352,29		254,32	330,23	314,76		-4,69%
KEMENTERIAN PERTAHANAN	575,57	677,61	649,41		127,95	191,39	175,27		-8,43%
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	757,40	955,59	787,39		102,07	172,83	149,51		-13,50%
MAHKAMAH AGUNG	256,75	226,83	260,73		42,11	59,55	63,67		6,93%
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	159,91	171,00	200,13		29,08	40,74	49,28		20,97%
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	1.185,98	1.179,68	985,88		181,16	132,04	41,77		-68,82%
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN BEMASYARAKATAN	-	-	213,61		-	-	39,35		N/A
KEMENTERIAN BERHUBUNGAN	266,08	302,61	195,58		34,92	54,97	31,59		-42,54%
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	130,43	142,85	126,56		20,11	29,58	27,12		-8,33%
KOMISI PEMILIHAN UMUM	231,62	418,64	185,23		63,59	324,73	26,00		-91,99%
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	88,47	89,64	102,45		16,68	23,44	23,70		1,11%
BADAN PUSAT STATISTIK	150,52	103,47	110,95		20,78	21,92	22,72		3,63%
KEMENTERIAN KESEHATAN	179,17	141,54	157,03		20,16	24,45	22,64		-7,38%
KEMENTERIAN PERTANIAN	257,94	434,61	2.275,16		26,48	30,22	15,63		-48,28%
KEMENTERIAN KEHUTANAN	146,15	150,81	118,32		14,45	19,41	13,36		-31,17%
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	163,14	210,94	25,80		40,13	93,91	11,05		-88,23%

Sumber: OM SPAN (Diolah)

Belanja Pemerintah Pusat berdasarkan organisasi/sektoral dialokasikan kepada Kementerian/ Lembaga (K/L). Pada Triwulan I tahun 2025, kinerja belanja berdasarkan Kementerian/ Lembaga (K/L) di Kalimantan Selatan menunjukkan dinamika yang bervariasi, baik dari sisi pagu anggaran, realisasi, maupun pertumbuhannya dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, terdapat beberapa K/L yang menjadi *highlight* berdasarkan nominal pagu, capaian realisasi, dan tingkat pertumbuhannya.

Kementerian Agama (Kemenag) menjadi instansi dengan pagu tertinggi di wilayah Kalimantan Selatan, yaitu sebesar Rp1.630,78 miliar pada 2025. Sampai dengan Triwulan I 2025, Kemenag juga mencatatkan nominal realisasi tertinggi sebesar Rp427,33 miliar, naik 7,37% dari tahun sebelumnya. Besarnya pagu dan realisasi ini tidak terlepas dari karakteristik Kemenag sebagai penyelenggara layanan pendidikan keagamaan dan haji yang memiliki cakupan operasional luas hingga ke daerah.

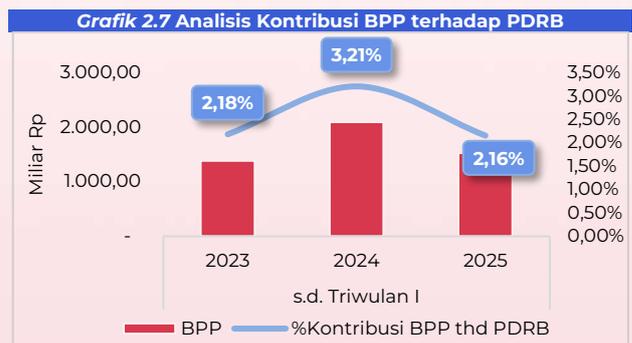
Pertumbuhan realisasi belanja tertinggi dicatat oleh Kejaksaan RI, yang meningkat 20,97% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan penguatan peran penegakan hukum, termasuk program peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur kejaksaan di daerah. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami penurunan paling tajam sebesar 91,99%, sejalan dengan berakhirnya fase puncak Pemilu 2024, sehingga kebutuhan belanja operasional dan logistik menurun drastis. Pada tahun 2025.

Selain KPU, penurunan tajam juga terlihat pada Kementerian Pekerjaan Umum dengan kontraksi 68,82%. Hal ini dapat dikaitkan dengan perlambatan penyerapan belanja modal dan infrastruktur, yang biasanya terealisasi lebih besar di semester II. Kementerian Pertanian juga menunjukkan penurunan drastis dari sisi realisasi sebesar 48,28%, meskipun pagunya meningkat signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor teknis seperti penjadwalan distribusi bantuan atau pelaksanaan program yang bersifat *seasonal*.

Analisis Kontribusi Belanja Pemerintah Pusat terhadap Perekonomian

Belanja Pemerintah Pusat memiliki peran strategis sebagai salah satu penggerak utama roda perekonomian, terutama melalui fungsinya dalam mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya beli masyarakat. Kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian terlihat dari perannya dalam mengisi kekosongan permintaan agregat, terutama saat aktivitas swasta melambat. Belanja negara melalui berbagai program pembangunan infrastruktur, subsidi, bantuan sosial, dan gaji pegawai, langsung maupun tidak langsung meningkatkan konsumsi dan investasi.

Berikut disajikan data yang memuat kontribusi BPP terhadap perekonomian di Kalimantan Selatan yang tercermin melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nya.



Sumber: OM SPAN, BPS (Diolah)

Pada triwulan I 2025, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Kalimantan Selatan mencapai Rp1.527,23 miliar, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar Rp2.091,54 miliar. Penurunan tersebut turut memengaruhi tingkat kontribusi BPP terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang tercatat hanya sebesar 2,16%, atau menurun dibanding capaian tahun sebelumnya yang mencapai 3,21%. Ini menunjukkan bahwa peran belanja pusat dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah di awal tahun 2025 masih relatif terbatas.

Meski demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang kontribusinya sebesar 2,18%, capaian di 2025 masih berada pada level yang mendekati, mengindikasikan potensi akselerasi belanja yang lebih optimal. Dalam konteks fiskal di daerah, BPP

merupakan instrumen penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama melalui belanja modal, belanja sosial, serta belanja operasional yang dapat menggerakkan sektor-sektor prioritas. Oleh karena itu, percepatan dan efisiensi realisasi belanja sangat diperlukan agar dampak fiskalnya terhadap perekonomian daerah lebih signifikan.

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) per kapita merupakan indikator penting untuk melihat seberapa besar alokasi belanja negara yang dinikmati oleh setiap individu di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan kemampuan fiskal pemerintah dalam memberikan layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata antar penduduk. Semakin tinggi BPP per kapita, maka semakin besar pula potensi dampak belanja negara terhadap kesejahteraan masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial. Berikut disajikan data BPP per kapita di Kalimantan Selatan.



Sumber: OM SPAN, BPS (Diolah)

Berdasarkan data hingga triwulan I 2025, BPP per kapita di Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp353.253,62, menurun cukup tajam dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai Rp489.432,35. Penurunan ini sebesar -27,82% terjadi meskipun jumlah penduduk terus meningkat dari 4,27 juta jiwa di 2024 menjadi 4,32 juta jiwa di 2025. Sementara itu, pada 2023 BPP per kapita hanya sebesar Rp332.104,44. Artinya, setelah lonjakan belanja per kapita di tahun 2024, terjadi kontraksi kembali di 2025. Implikasi dari penurunan ini menunjukkan bahwa belanja negara per individu menjadi lebih rendah, yang dapat berpengaruh terhadap efektivitas stimulus fiskal pada perekonomian daerah serta akses masyarakat terhadap layanan publik.

Penurunan BPP per kapita ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penurunan realisasi belanja di awal tahun akibat kebijakan efisiensi anggaran, keterlambatan juknis atau keterlambatan pengiriman kelengkapan dokumen sebagai syarat penyaluran anggaran, perubahan *timeline* program dan kegiatan, serta perubahan prioritas anggaran. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengakselerasi belanja dengan pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memastikan distribusi anggaran yang lebih merata dan tepat sasaran guna menjaga kontribusi fiskal terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di Kalimantan Selatan.

Capaian Output Sektoral dan/atau Program-program Strategis Pemerintah

Capaian output sektoral dan program-program strategis pemerintah menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan fiskal dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Capaian output sektoral mencerminkan realisasi fisik dan kinerja dari belanja negara di berbagai bidang seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan perlindungan sosial. Pemantauan capaian output ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dibelanjakan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Evaluasi atas capaian ini juga menjadi landasan dalam perumusan kebijakan anggaran ke depan agar lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan.

Berikut disajikan data capaian output pada beberapa bidang pengeluaran / belanja negara:

a) Capaian Output Bidang Infrastruktur

Capaian output infrastruktur hingga triwulan I 2025 mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama di sektor sumber daya air dan transportasi. Realisasi belanja infrastruktur tercatat tersebar pada sejumlah program strategis, dengan alokasi tertinggi dialokasikan pada *National Urban Flood Resilience Project* (NUFReP) yang mencapai Rp26,21 miliar.

Tabel 2.9 Capaian Output Bidang Infrastruktur

Output	Realisasi (Miliar Rp)	Capaian Output		
		% Progres Capaian Fisik	Volume	Satuan
National Urban Flood Resilience	26,21	25,35%	6	Unit
Operasi dan pemeliharaan prasarana daerah irigasi	2,39	2,34%	2298	Km2
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	1,94	4,97%	315	Km2
Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	1,18	1,02%	871	Km2
Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	0,52	2,19%	5	Kegiatan
Riam Kiwa Multipurpose Dam Construction Project yang dilaksanakan	0,50	10,60%	1	Kegiatan
Dokumen teknis bidang sungai dan pantai	0,34	1,63%	5	Dokumen
Operasi dan pemeliharaan bendung irigasi	0,29	6,10%	10	Kegiatan
Pemeliharaan sungai	0,22	4,13%	1	Kegiatan
Operasi dan pemeliharaan bendungan	0,18	2,74%	1	Kegiatan

Sumber: OM SPAN (Diolah)

Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan kawasan perkotaan terhadap risiko banjir melalui pembangunan enam unit infrastruktur pengendali banjir, dengan progres fisik sebesar 25,35%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar pada pengurangan risiko bencana dan perlindungan masyarakat kota dari dampak perubahan iklim.

Selain itu, kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana daerah irigasi menjadi salah satu output signifikan dengan alokasi sebesar Rp2,39 miliar untuk cakupan area seluas 2.298 km². Meski progres fisik masih tergolong rendah (2,34%), kegiatan ini sangat penting dalam menjaga produktivitas sektor pertanian, khususnya untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Sementara itu, preservasi jalan melalui program padat karya juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus menjaga konektivitas antarwilayah, meskipun progres fisiknya baru 1,02%.

Secara umum, arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik baru, tetapi juga pada pemeliharaan dan peningkatan ketahanan infrastruktur eksisting, termasuk di sektor sungai, bendungan, dan irigasi. Dengan capaian ini, terlihat bahwa pemerintah mulai menggeser fokus dari ekspansi masif ke manajemen aset dan keberlanjutan layanan infrastruktur, yang lebih adaptif terhadap

tantangan lingkungan dan sosial. Ke depan, percepatan pelaksanaan fisik perlu menjadi perhatian agar manfaat pembangunan infrastruktur dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.

b) Capaian Output Bidang Pendidikan

Selain sektor infrastruktur, pemerintah juga menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam belanja negara, khususnya pada perguruan tinggi dan peningkatan kualitas pembelajaran. Capaian output sektor pendidikan hingga triwulan I 2025 memperlihatkan fokus pemerintah dalam mendorong layanan pendidikan tinggi yang inklusif dan berkualitas melalui berbagai bentuk dukungan operasional, tunjangan tenaga pendidik, serta penguatan sarana dan prasarana.

Tabel 2.10 Capaian Output Bidang Pendidikan

Output	Realisasi (Miliar Rp)	Capaian Output		
		% Progres Capaian Fisik	Volume	Satuan
Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)	26,17	21,83%	42112	Unit
Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	11,52	15,90%	1824	Orang
Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU)	9,78	13,70%	1500	Unit
PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN)	4,76	18,86%	3	Lembaga
Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)	1,08	4,14%	7	Unit
PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN)	0,95	2,04%	5	Lembaga
PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)	0,27	0,97%	3	Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)	0,10	0,34%	1100	Kegiatan
Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	0,02	0,32%	161	Lembaga
Peta Kebinekaan Bahasa dan Sastra	0,01	5,63%	1	Paket

Sumber: OM SPAN (Diolah)

Realisasi belanja tertinggi tercatat pada layanan pendidikan berbasis PNBP/BLU sebesar Rp26,17 miliar, dengan capaian fisik mencapai 21,83% dan mencakup lebih dari 42.000 unit layanan pendidikan. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan layanan akademik di kampus-kampus tetap berjalan optimal, terutama pada perguruan tinggi negeri berbadan layanan umum yang memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan. Program ini menjadi tulang punggung dalam mendukung kegiatan pembelajaran rutin di institusi pendidikan tinggi.

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik melalui program tunjangan profesi bagi dosen non-PNS, yang telah terealisasi sebesar Rp11,52 miliar dengan mencakup 1.824 dosen penerima manfaat. Selain itu, dukungan operasional pembelajaran sebesar Rp9,78 miliar dan bantuan operasional kepada perguruan tinggi (BOPTN) menunjukkan langkah konkret untuk memperkuat tata kelola dan pelayanan pendidikan di tingkat lembaga.

Melalui berbagai output ini, terlihat bahwa arah kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada peningkatan akses pendidikan, tetapi juga pada peningkatan mutu pendidikan tinggi, baik melalui penguatan kapasitas dosen, layanan operasional, hingga fasilitas penunjang pembelajaran. Fokus ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing lulusan dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pembangunan nasional.

c) Capaian Output Bidang Kesehatan

Tabel 2.11 Capaian Output Bidang Kesehatan

Output	Realisasi (Miliar Rp)	Capaian Output		
		% Progres Capaian Fisik	Volume	Satuan
Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	0,93	86,77%	32	Model
Bantuan Pendidikan Poltekkes Kemenkes	0,48	29,48%	376	Orang
Penyediaan Reagen dan BMHP Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	0,43	16,05%	8	Paket
Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset	0,31	54,04%	42	Kelompok
Pengujian Kalibrasi Alat (RF-15)	0,24	29,36%	160	Unit
Penelitian Dosen Pemula (PDP)	0,19	15,69%	33	Model
Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi	0,18	60,00%	11	Model
Layanan deteksi dini dan respon kejadian penyakit menular	0,08	3,01%	20	Layanan
Pengadaan alat dan bahan kekarantina kesehatan di pintu masuk (HS)	0,03	3,87%	11	Paket
Operasional dan Pemeliharaan UPT Non BLU (RF-15)	0,02	3,04%	7	Paket

Sumber: OM SPAN (Diolah)

Selain infrastruktur dan pendidikan, pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian serius pemerintah sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat. Belanja negara dalam sektor kesehatan diarahkan tidak hanya untuk layanan kuratif, tetapi juga menyentuh aspek preventif, edukatif, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Hal ini tercermin dari capaian

output program-program kesehatan hingga triwulan I 2025 yang menunjukkan adanya orientasi pemerintah pada penguatan riset, layanan laboratorium kesehatan, dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

Realisasi belanja tertinggi tercatat pada Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi sebesar Rp0,93 miliar, dengan progres capaian fisik sangat tinggi yaitu 86,77% untuk 32 model riset. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memprioritaskan pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi di bidang kesehatan, yang dapat menjadi dasar untuk kebijakan dan teknologi kesehatan ke depan, serta menjawab tantangan penyakit menular maupun tidak menular secara ilmiah dan berkelanjutan.

Selain itu, perhatian pada pembangunan SDM kesehatan ditunjukkan melalui program Bantuan Pendidikan Poltekkes Kemenkes dengan realisasi Rp0,48 miliar, mencakup 376 mahasiswa penerima bantuan. Ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah untuk menyiapkan tenaga kesehatan profesional dan kompeten di berbagai daerah, khususnya untuk memperkuat layanan primer hingga pelosok. Di sisi lain, program penyediaan reagen dan bahan habis pakai laboratorium kesehatan masyarakat juga menegaskan dukungan terhadap fungsi laboratorium sebagai garda depan dalam deteksi dan pengendalian penyakit.

Secara umum, arah kebijakan pemerintah dalam belanja sektor kesehatan tahun ini memperkuat dimensi riset, edukasi, dan sistem respons kesehatan masyarakat. Meskipun sebagian besar capaian fisik pada beberapa output masih relatif rendah, namun komitmen untuk membangun fondasi sistem kesehatan yang kuat dan adaptif terhadap ancaman kesehatan publik telah terlihat jelas dari alokasi dan fokus belanjanya. Hal ini diharapkan mampu menciptakan sistem kesehatan yang lebih tangguh dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.1.2.2 Transfer ke Daerah (TKD)

Salah satu aspek penting dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terefleksi dalam *intergovernmental fiscal relations*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota serta pembagian urusan pemerintah antar pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. TKD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan yang kemudian ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. Perkembangan TKD di Kalimantan Selatan secara rinci disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.12 Rincian Transfer ke Daerah per Komponen (Miliar Rp)

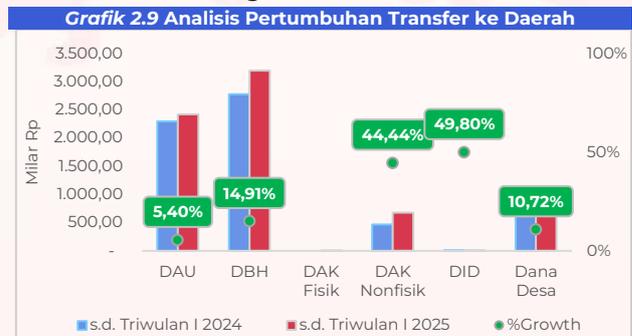
Komponen Transfer	Triwulan I 2025		(%)	
	Pagu	Realisasi		
Transfer ke Daerah	Dana Alokasi Umum	8.842,87	2.418,62	-72,65%
	Dana Bagi Hasil	13.968,40	3.192,57	-77,14%
	DAK Fisik	796,73	2,62	N/A
	DAK Nonfisik	2.622,50	674,77	-74,27%
	Insentif Fiskal	183,41	11,30	-93,84%
	Dana Desa	1.486,20	710,48	-52,19%
Total Tranfer ke Daerah	27.900,11	7.010,36	25,13%	

Sumber: OM SPAN (Diolah)

Transfer ke Daerah merupakan bagian dari belanja negara dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yang terdiri dari Dana Transfer Umum, Dana Transfer Khusus, Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, serta Dana Desa. Kontribusi TKD masih menjadi tumpuan utama pendapatan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanjanya.

Pemerintah terus berkomitmen memperkuat sinergi fiskal antara pusat dan daerah melalui penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) secara tepat waktu, transparan, dan

akuntabel. Hingga akhir Triwulan I 2025, realisasi TKD telah mencapai Rp7.010,36 miliar atau 25,13% dari total pagu sebesar Rp27.900,11 miliar. Capaian ini mencerminkan langkah awal yang positif dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di daerah. Perkembangan TKD pada triwulan I 2025 adalah sebagai berikut.



Sumber: OM SPAN (Diolah)

a) Dana Alokasi Umum

Realisasi DAU mencapai Rp2.418,62 miliar atau 27,35% dari pagu sebesar Rp8.842,87 miliar. Capaian ini meningkat 5,40% dibandingkan tahun lalu. DAU merupakan dana transfer yang sifatnya *block grant* yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan umum pemerintahan daerah, seperti pembayaran gaji pegawai, operasional layanan dasar, serta belanja publik lainnya. Realisasi ini menunjukkan tren penyaluran yang cukup stabil di awal tahun, dan faktor-faktor penyebab pertumbuhan DAU antara lain disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk gaji dan tunjangan ASN daerah, kenaikan gaji, dan rekrutmen ASN dan PPPK baru. Meskipun capaiannya meningkat, namun daerah masih perlu mempercepat pemutakhiran data formasi ASN sebagai salah satu syarat utama penyaluran DAU yang bersifat *earmarked* untuk pembayaran gaji ASN daerah.

b) Dana Bagi Hasil

Sampai dengan Triwulan I 2025, realisasi DBH di Kalimantan Selatan mencapai Rp3.192,57 miliar atau 22,86% dari pagu Rp13.968,40 miliar. Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi *resource-based* penghasil komoditas batubara dan kelapa sawit. Kedua komoditas tersebut berkontribusi sangat besar terhadap

penerimaan negara, sehingga Kalimantan Selatan sebagai daerah penghasil juga mendapatkan DBH dengan nominal yang sepadan dan cukup besar dari sektor sumber daya alam (SDA). Pertumbuhan DBH yang cukup signifikan sebesar 14,91% dibandingkan capaian tahun lalu mengindikasikan peningkatan penerimaan nasional dari sektor pajak dan sumber daya alam, khususnya dari sektor-sektor strategis yang dibagihasilkan sehingga meningkatnya kapasitas pemerintah pusat dalam menyalurkan dana ke daerah secara lebih cepat.

c) Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

DAK Fisik baru tersalurkan sebesar Rp2,62 miliar atau 0,33% dari pagu Rp796,73 miliar pada awal tahun 2025. Dibandingkan dengan capaian Triwulan I 2024 yang belum terealisasi sama sekali, realisasi DAK Fisik pada Triwulan I 2025 menandakan akselerasi penyaluran DAK Fisik. Pada umumnya, DAK Fisik tidak disalurkan pada periode triwulan I karena pemerintah daerah masih harus menunggu terbitnya petunjuk teknis penyaluran DAK Fisik. Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan), penyaluran DAK Fisik tahap I biasanya dijadwalkan mulai Triwulan II, yaitu mulai bulan April sampai dengan bulan Juni. Percepatan penyaluran DAK Fisik pada Triwulan I 2025 menunjukkan adanya peningkatan kapasitas tata kelola fiskal dan komitmen percepatan pembangunan oleh pemerintah daerah. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain, sekaligus memberikan dorongan positif terhadap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur sejak awal tahun anggaran.

d) DAK Non Fisik

Realisasi DAK Nonfisik mencapai Rp674,77 miliar atau 25,73% dari pagu Rp2.622,50 miliar. Capaian tersebut naik signifikan sebesar 44,44% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kinerja ini menunjukkan bahwa kegiatan layanan dasar seperti pendidikan (BOS), kesehatan, dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tetap berjalan baik di awal tahun. Penyaluran yang meningkat menandakan efisiensi dalam

proses administrasi, serta komitmen pemerintah untuk memastikan kelancaran pelayanan publik melalui pendanaan non infrastruktur. Efisiensi dalam proses penyaluran DAK Nonfisik antara lain inovasi penyaluran langsung TPG ke rekening masing-masing guru penerima. Hal ini turut berkontribusi dalam mempercepat penyaluran DAK Nonfisik pada Triwulan I 2025 sebab berpotensi mengurangi keterlambatan akibat administrasi berjenjang sehingga tunjangan dapat diterima tepat waktu dan juga tepat sasaran.

e) Insentif Fiskal

Insentif Fiskal mencapai Rp11,30 miliar atau 6,16% dari pagu Rp183,41 miliar. Capaian ini mengalami pertumbuhan positif sebesar dibanding periode yang sama tahun lalu. Insentif Fiskal diberikan kepada daerah dengan kinerja yang baik dalam bidang pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan pengendalian inflasi. Pada awal tahun 2025, terdapat dua kabupaten di Kalimantan Selatan yang mendapatkan Insentif Fiskal, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Barito Kuala yang mendapatkan insentif atas kinerja pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar, dukungan fokus kebijakan nasional, dan sinergi kebijakan pemerintah tahun sebelumnya.

f) Dana Desa

Pada Triwulan I 2025, Dana Desa di Kalimantan Selatan telah tersalurkan sebesar Rp710,48 miliar atau 47,81% dari total pagu Rp1.486,20 miliar, meningkat 10,72% dibanding Triwulan I 2024. Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta mendorong percepatan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat desa. Capaian Dana Desa ini menunjukkan tingkat serapan tertinggi di antara komponen TKD lainnya. Beberapa faktor yang menyebabkan percepatan penyaluran Dana Desa antara lain mekanisme penyaluran Dana Desa yang lebih sederhana dan langsung, serta berbasis kebutuhan desa (padat karya, BLT, dan pembangunan sarana), sehingga mampu

mendongkrak realisasi sejak awal tahun. Kenaikan ini juga didorong oleh percepatan pelaporan penggunaan tahun sebelumnya oleh pemerintah desa.

Belanja Negara per Fungsi

Pada Triwulan I 2025, belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi menunjukkan beragam dinamika yang mencerminkan prioritas kebijakan dan kesiapan pelaksanaan program masing-masing sektor. Berikut ini adalah perkembangan belanja negara per fungsi.

Tabel 2.13 Belanja Negara Per Fungsi

Belanja per Fungsi	PAGU (Miliar Rp)			Trendline Pagu	REALISASI (Miliar Rp)			Trendline Realisasi	Growth '24-'25
	Triwulan I				Triwulan I				
	2023	2024	2025		2023	2024	2025		
PELAYANAN UMUM	23.967,77	30.019,58	#####		5.365,01	6.650,48	7.099,04		6,74%
PERTAHANAN	575,57	677,61	649,41		127,95	191,39	175,27		-8,43%
KETERBITAN DAN KEAMANAN	1.990,66	1.955,13	2.112,84		381,19	491,57	475,93		-3,18%
EKONOMI	1.642,97	1.857,97	3.649,10		211,46	201,02	120,08		-40,26%
LINGKUNGAN HIDUP	228,87	250,21	151,40		29,51	41,80	27,27		-34,76%
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	96,47	206,08	20,31		18,85	27,00	1,31		-95,16%
KESEHATAN	282,18	252,92	253,90		40,09	52,77	48,09		-8,88%
PARIWISATA DAN BUDAYA	1,39	1,43	-		-	0,01	-		0,00%
AGAMA	239,96	241,64	292,55		52,59	63,06	68,61		8,81%
PENDIDIKAN	2.211,95	2.364,54	2.247,50		358,85	533,36	517,84		-2,91%
PERLINDUNGAN SOSIAL	41,06	40,65	41,33		6,12	6,90	5,43		-21,32%

Sumber: OM SPAN, BPS (Diolah)

Secara umum, fungsi Pelayanan Umum menempati posisi teratas baik dari sisi pagu maupun realisasi belanja. Dengan alokasi pagu sebesar Rp28.405,50 miliar dan realisasi mencapai Rp7.099,04 miliar, fungsi ini tumbuh sebesar 6,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Porsi besar ini wajar mengingat fungsi ini mencakup berbagai belanja rutin kementerian/lembaga, termasuk belanja pegawai, operasional, serta layanan manajerial pemerintahan yang bersifat administratif.

Sementara itu, fungsi Agama mencatatkan pertumbuhan realisasi tertinggi sebesar 8,81%. Kinerja ini ditopang oleh percepatan pelaksanaan program layanan keagamaan, seperti persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan penguatan pendidikan keagamaan di bawah Kementerian Agama. Kenaikan tersebut menunjukkan efektivitas eksekusi anggaran sejak awal tahun, didorong oleh karakteristik program yang sudah terjadwal secara rutin seperti penyelenggaraan haji dan bantuan pendidikan madrasah.

Di sisi lain, beberapa fungsi mengalami perlambatan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum menjadi yang terendah dalam hal pertumbuhan realisasi, mengalami penurunan drastis sebesar 95,16%. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada pagu yang dialokasikan, eksekusi program pada fungsi ini masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh masih berlangsungnya proses persiapan teknis proyek-proyek infrastruktur dasar seperti pembangunan rumah susun, fasilitas umum, atau pengadaan lahan yang biasanya baru berjalan pada paruh kedua.

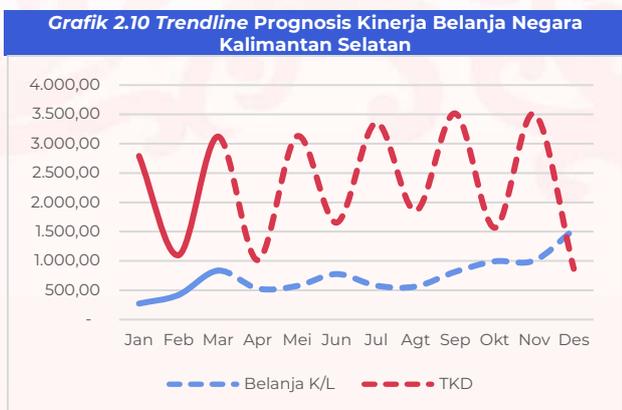
Fungsi Ekonomi mengalami kenaikan signifikan dari sisi pagu, yaitu dari Rp1.857,97 miliar pada Triwulan I 2024 menjadi Rp3.649,10 miliar di periode yang sama tahun 2025. Namun demikian, realisasi justru mengalami penurunan sebesar 40,26%. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dorongan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui belanja, kesiapan pelaksanaan program atau proyek ekonomi seperti pembangunan infrastruktur pertanian, dukungan UMKM, dan kegiatan padat karya masih belum optimal di awal tahun.

Fungsi Pendidikan tetap menjadi salah satu fokus belanja dengan pagu cukup besar mencapai Rp2.247,50 miliar. Namun, realisasi pada triwulan I sedikit menurun sebesar 2,91% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh keterlambatan penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS), pengadaan sarana pendidikan, serta belanja modal pendidikan yang biasanya terealisasi di kuartal-kuartal berikutnya.

Di sisi lain, fungsi Kesehatan dan fungsi Perlindungan Sosial juga menunjukkan penurunan realisasi masing-masing sebesar 8,88% dan 21,32%. Penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian target penerima bantuan, finalisasi data penerima manfaat, serta belum dimulainya kegiatan-kegiatan teknis seperti pengadaan obat, alat kesehatan, atau distribusi bantuan sosial tunai.

2.1.2.3 Prognosis / Outlook Kinerja Belanja Negara

Berikut disajikan data prognosis / outlook kinerja belanja negara.



Sumber: OM SPAN, ARIMA(Diolah)

Berdasarkan data proyeksi tahun 2025, total belanja negara diperkirakan hanya akan mencapai 96,17% dari pagunya. Belanja negara diproyeksikan sebesar Rp36.376,64 miliar, sedikit lebih rendah dibandingkan target dalam APBN 2025 sebesar Rp37.824,08 miliar. Selisih sebesar Rp1.447,44 miliar ini mencerminkan potensi efisiensi / blokir anggaran yang diperkirakan akan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun. Potensi penundaan dan penghematan anggaran, serta *refocusing* belanja baik dalam belanja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Transfer ke Daerah (TKD) masih akan terus membayangi proyeksi belanja negara sampai akhir tahun. Belanja TKD diproyeksikan akan mencapai 98,48% dari pagu mengingat ketergantungan yang tinggi dari pendapatan transfer pemerintah daerah terhadap belanja transfer oleh pemerintah pusat. Sementara Belanja K/L diproyeksikan hanya mencapai 89,67% dari pagu. Belanja K/L diproyeksikan terealisasi sebesar Rp8.900,57 miliar dari pagu Rp9.923,97 miliar, sedangkan TKD diproyeksikan mencapai Rp27.476,07 miliar dari target Rp27.900,11 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proyeksi menunjukkan angka yang tinggi, realisasi belanja tetap berada sedikit di bawah pagu sehingga potensi akselerasi dan optimalisasi belanja yang masih dapat dilakukan.

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp8.537,59 miliar atau sekitar 22,6% dari total pagu. Belanja K/L sebesar Rp1.527,23 miliar, sedangkan TKD mencapai Rp7.010,36 miliar. Ini menunjukkan bahwa porsi terbesar belanja pada awal tahun masih didominasi oleh penyaluran TKD,

terutama Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Namun demikian, tingkat realisasi ini masih dalam batas wajar mengingat kebanyakan kegiatan belanja fisik dan belanja modal cenderung meningkat dan mencapai puncak pada triwulan II, III dan IV seiring dengan proses lelang dan pelaksanaan program yang membutuhkan persiapan teknis.

Memasuki triwulan II dan III, proyeksi belanja meningkat masing-masing menjadi Rp7.674,86 miliar dan Rp10.685,96 miliar. Peningkatan ini mencerminkan percepatan realisasi program kerja pemerintah, termasuk proyek infrastruktur dan belanja sosial. Belanja K/L juga mulai meningkat, terutama pada Triwulan III, seiring pelaksanaan kegiatan belanja barang dan modal. Selain itu, proyeksi TKD meningkat tajam pada Triwulan III menjadi Rp8.728,40 miliar, yang sebagian besar mencakup penyaluran Dana Transfer Umum (DTU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Nonfisik dalam rangka mendukung operasional layanan dasar daerah.

Pada triwulan IV, belanja negara diperkirakan mencapai Rp9.478,22 miliar, yang merupakan fase dengan tingkat realisasi tinggi, sesuai dengan pola umum pelaksanaan anggaran tahunan. Pada periode ini, baik belanja K/L maupun TKD diproyeksikan mengalami lonjakan, terutama karena banyak kegiatan yang diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Hal ini juga menjadi cerminan tantangan klasik dalam pengelolaan anggaran, yaitu konsentrasi realisasi belanja pada akhir tahun. Oleh karena itu, meskipun proyeksi belanja mendekati target, upaya perbaikan tata kelola belanja agar lebih merata sepanjang tahun tetap menjadi fokus untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran.

2.1.2.4 Rekomendasi Kebijakan Belanja

Saat ini, belanja negara masih dibayangi oleh tren penumpukan di akhir tahun anggaran. Hal ini berimplikasi pada kualitas perencanaan dan eksekusi belanja yang kurang baik. Untuk mengoptimalkan dan mengakselerasi belanja negara, pemerintah perlu melakukan serangkaian *policy response* yang berfokus pada percepatan pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran. Salah satu *key approach* adalah dengan menyempurnakan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja agar lebih

realistis dan siap eksekusi. Hal ini mencakup peningkatan kualitas perencanaan program dan kegiatan oleh kementerian/lembaga (K/L), termasuk kesiapan dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), rencana umum pengadaan (RUP), serta kesiapan teknis lainnya sejak akhir tahun sebelumnya. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan tidak tertunda dan belanja dapat segera direalisasikan pada Triwulan I dan II.

Pemerintah juga mendorong penggunaan instrumen *early procurement* atau pengadaan/ kontrak dini, sehingga kontrak kegiatan dapat ditandatangani segera setelah tahun anggaran berjalan. Di sisi lain, peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pengelola anggaran di K/L menjadi penting, agar proses administrasi belanja dapat berjalan lebih cepat dan akurat. Selain itu, kebijakan *reward and punishment* terhadap satuan kerja atas kinerja pelaksanaan anggaran juga dapat diterapkan, misalnya dengan memberikan insentif bagi satuan kerja dengan capaian belanja yang cepat, tepat, dan akuntabel.

Langkah berikutnya adalah memperkuat koordinasi antarunit pelaksana baik di pusat maupun daerah, terutama dalam hal belanja yang memerlukan sinkronisasi lintas sektoral, seperti DAK Fisik. Pemerintah juga perlu memanfaatkan teknologi informasi secara optimal melalui sistem digital monitoring anggaran dan *dashboard* pelaksanaan belanja secara *real-time* untuk memantau progres dan mengidentifikasi potensi hambatan sejak dini. Dengan demikian, kendala-kendala administratif, teknis, maupun regulatif dapat segera direspons dan diselesaikan sebelum menumpuk di akhir tahun.

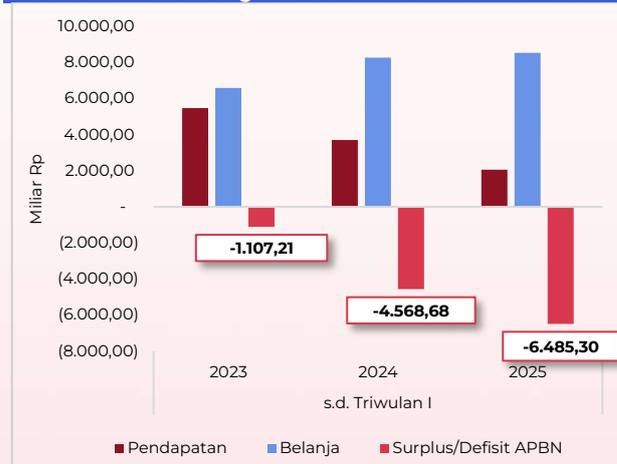
Edukasi dan penguatan komunikasi kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan anggaran, mulai dari pimpinan satker hingga pelaksana teknis di lapangan, sangat penting. Pemahaman terhadap urgensi realisasi belanja secara merata sepanjang tahun harus menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi. Untuk itu, diharapkan terwujud suatu forum komunikasi *high-level* yang dapat menjadi wadah pertukaran informasi, aspirasi, dan apresiasi terkait kinerja pengelolaan anggaran K/L dan pemerintah daerah. Dengan kombinasi kebijakan

perencanaan yang matang, pengawasan ketat, serta percepatan proses teknis dan administratif, diharapkan pelaksanaan anggaran negara menjadi lebih efektif, efisien, dan tidak lagi terkonsentrasi di penghujung tahun.

2.2.3 Surplus/Defisit APBN

Jika dilihat tren perkembangannya, defisit APBN di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan defisit dalam tiga tahun terakhir.

Grafik 2.11 Perkembangan Defisit APBN Kalimantan Selatan



Sumber: OM SPAN (Diolah)

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Selatan hingga Triwulan I 2025 menunjukkan tren yang kontras antara sisi pendapatan dan belanja. Pendapatan negara terus mengalami penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir, dari Rp5.484,41 miliar pada 2023, menjadi Rp3.712,49 miliar di 2024, dan kembali menurun menjadi hanya Rp2.052,30 miliar di 2025. Tren ini mencerminkan adanya pelemahan pada sumber penerimaan utama, baik dari sisi perpajakan maupun PNPB, yang dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas unggulan, aktivitas ekonomi yang tumbuh melambat akibat dinamika global, serta insentif perpajakan yang berdampak pada lemahnya penerimaan negara.

Di sisi lain, belanja pemerintah terus meningkat setiap tahunnya, menunjukkan komitmen untuk menjaga momentum pembangunan dan perlindungan sosial masyarakat. Realisasi belanja Rp6.591,62 di Triwulan I 2023, naik signifikan menjadi Rp8.281,18 pada 2024 dan kembali meningkat

tipis menjadi Rp8.537,60 pada 2025. Peningkatan ini mencerminkan peran aktif pemerintah dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui pembangunan proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta melalui penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa.

Meski memberikan dampak yang positif dari sisi pembangunan, peningkatan belanja ini belum ditopang oleh pendapatan yang seimbang. Akibat ketimpangan tersebut, defisit anggaran terus melebar dari tahun ke tahun. Pada Triwulan I 2023 defisit tercatat sebesar Rp1.107,21 miliar, kemudian melonjak menjadi Rp4.468,68 di 2024, dan mencapai Rp6.485,30 pada 2025. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius, karena jika tidak diantisipasi dengan baik, dapat membatasi ruang fiskal pemerintah ke depan. Oleh karena itu, strategi optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, serta peningkatan kualitas belanja publik menjadi sangat penting dalam menjaga kesehatan fiskal di Kalimantan Selatan. Pemerintah perlu mendorong kinerja sektor-sektor strategis dan memperkuat sinergi pusat-daerah dalam memperluas basis penerimaan yang berkelanjutan.

2.2. Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi

Pada tahun 2025, Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan menghadapi berbagai tantangan berupa isu strategis yang terjadi di daerah. Isu strategis tersebut di antaranya sebagai berikut: (1) Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang Masih Rendah; (2) Fondasi Perekonomian Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan yang Masih Belum Kuat; (3) Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Berbasis Kewilayahan Berkelanjutan yang Belum Merata; (4) Belum Optimalnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar; (5) Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Berketahanan Iklim dan Ketahanan Bencana; dan (6) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 yaitu: “Pengembangan Kualitas SDM dan Prasarana Wilayah Mendukung Perekonomian Berkelanjutan Berpedoman

pada Pencapaian Pembangunan Global (SDGs)” yang diharapkan dapat mengatasi isu-isu strategis tersebut dengan empat fokus pembangunan yaitu (1) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar; (2) Pengembangan Kawasan Industri dan Logistik; (3) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; dan (4) Peningkatan Daya Saing Produk Lokal. Berdasarkan RKPD tersebut, rencana anggaran dituangkan dalam APBD oleh pemerintah di Kalimantan Selatan yang menjadi dasar serta pedoman Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan anggaran pada periode berkenaan. APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian sesuai tujuan dan prioritas daerah. Pada tahun 2025, Kalimantan Selatan telah menetapkan Prioritas Daerah, yaitu:

- 1) Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan.
- 2) Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing
- 3) Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi
- 4) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi
- 5) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan prioritas daerah, berikut disajikan perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah di Kalimantan Selatan hingga triwulan I tahun 2025.

Tabel 2.14-I-Account APBD Kalimantan Selatan (Miliar Rp)

I-Account (Miliar Rupiah)	s.d. Triwulan I 2024			s.d. Triwulan I 2025			Growth (%)
	PAGU	REALISASI	%REAL	PAGU	REALISASI	%REAL	
PENDAPATAN DAERAH	45.224,56	6.863,77	15,18	41.992,24	8.211,38	19,55	19,63
PAD	7.789,94	1.301,96	16,71	8.438,55	1.675,00	19,85	28,65
Pendapatan Transfer	33.921,39	4.996,60	14,73	31.004,37	5.723,35	18,46	14,54
Transfer Antar Daerah	2.360,37	561,54	23,79	1.905,91	665,37	34,91	18,49
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.152,86	3,67	0,32	643,40	147,67	22,95	3.928,53
BELANJA DAERAH	51.223,56	4.082,25	7,97	47.655,97	5.300,51	11,12	29,84
Belanja Operasi	29.488,40	2.550,86	8,65	29.798,54	3.742,64	12,56	46,72
Belanja Pegawai	12.240,67	1.546,26	12,63	13.891,69	2.373,17	17,08	53,48
Belanja Barang dan Jasa	14.621,02	917,05	6,27	14.028,43	1.269,25	9,05	38,41
Belanja Bunga	14,11	3,90	27,62	8,35	1,16	13,85	(70,32)
Belanja Subsidi	6,20	0,12	-	4,83	0,52	10,66	100%
Belanja Hibah	2.314,42	67,38	2,91	1.609,84	69,13	4,29	2,61
Belanja Bantuan Sosial	291,98	16,16	5,53	255,40	29,42	11,52	82,10
Belanja Modal	15.036,24	221,69	1,47	11.698,44	171,32	1,46	(22,72)
Belanja Modal	15.036,24	221,69	1,47	11.698,44	171,32	1,46	(22,72)
Belanja Tidak Terduga	330,82	1,64	0,50	731,17	1,71	0,23	4,19
Belanja Tidak Terduga	330,82	1,64	0,50	731,17	1,71	0,23	4,19
Belanja Transfer	6.368,11	1.308,06	20,54	5.427,83	1.384,84	25,51	5,87
Belanja Bagi Hasil	2.486,35	878,41	35,33	1.801,66	714,71	39,67	(18,64)
Belanja Bantuan Keuangan	3.881,76	429,65	11,07	3.626,17	670,13	18,48	55,97
SURPLUS/DEFISIT	(5.999,00)	2.781,51	(46,37)	(5.663,74)	2.910,87	(51,39)	4,65
PEMBIAYAAN	6.098,17	21.761,10	356,85	5.662,87	(103,71)	(1,83)	(100,48)
Penerimaan Pembiayaan	7.261,49	21.825,09	300,56	6.028,92	2,54	0,04	(99,99)
Pengeluaran Pembiayaan	1.163,31	63,99	5,50	366,05	106,25	29,03	66,03
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	99,18	24.542,62	24.746,34	(0,87)	2.807,16	(323.548,77)	(88,56)

Sumber: GFS, LRA Pemda se-Kalsel (Diolah)

2.3.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam hal ini, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah Pemerintah lingkup Kalimantan pada triwulan I tahun 2025 ini telah memperoleh capaian sebesar Rp8.211,38 miliar, sedangkan pada tahun 2024 mencapai Rp6.863,77 miliar. Besaran ini menunjukkan adanya pertumbuhan kinerja pendapatan daerah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 19,63%.

2.2.2.1 Analisis Kontribusi dan Komposisi Pendapatan Daerah

Pada triwulan I tahun 2023, Pendapatan Daerah di Kalimantan Selatan terdiri dari berbagai sumber pendapatan yang secara umum terdiri dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Pendapatan Transfer, Transfer Antar Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan komponen pendapatan tersebut kemudian dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.15 Rincian Pendapatan Daerah per Komponen

Komponen Pendapatan	Realisasi (Miliar Rp)		Growth (%)	
	TW I 2024	TW I 2025		
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pajak Daerah	913,03	1.260,64	38,07%
	Retribusi Daerah	56,00	145,08	159,07%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	171,59	107,33	-37,45%
	Lain-lain PAD yang Sah	161,34	161,94	0,37%
Total PAD	1.301,96	1.675,00	28,65%	
Pendapatan Transfer	Dana Perimbangan	4.945,21	5.569,79	12,63%
	Dana Insentif Daerah	-	11,30	N/A
	Dana Desa	51,40	142,25	176,77%
	Pendapatan Bagi Hasil	561,54	665,37	18,49%
Total Pendapatan Transfer	5.558,14	6.388,72	14,94%	
Pendapatan Lainnya	Hibah	3,37	60,62	1696,72%
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan UU	0,29	87,05	29750,21%
	Total Pendapatan Lainnya	3,67	147,67	3928,53%

Sumber: GFS, LRA Pemda se-Kalsel (Diolah)

Berdasarkan data realisasi pendapatan APBD Kalimantan Selatan hingga Triwulan I 2025, tercatat bahwa komponen Pendapatan Transfer masih menjadi kontributor terbesar terhadap total pendapatan daerah, dengan realisasi mencapai Rp6.388,72 miliar, mengalami pertumbuhan sebesar 14,94% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan kinerja positif, tumbuh 28,65% menjadi Rp1.675,00 miliar, yang menunjukkan upaya Pemda Kalsel dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dari dalam daerah. Di sisi lain, Pendapatan Lainnya mengalami lonjakan tajam sebesar 3928,53%, meskipun secara nominal hanya mencapai Rp147,67 miliar, namun pertumbuhan ekstrem ini menjadi sinyal adanya penerimaan yang bersifat tidak rutin dan cenderung insidental.

Komposisi pendapatan ini mencerminkan struktur pendapatan pada APBD Kalimantan Selatan yang masih sangat tergantung pada transfer pemerintah pusat, meskipun ada upaya penguatan PAD melalui pajak dan retribusi. Pemerintah daerah perlu menjaga hubungan fiskal yang kuat dengan pusat sembari terus memperkuat basis PAD secara berkelanjutan. Ketergantungan pada sumber yang tidak tetap seperti hibah dan lain-lain pendapatan juga menunjukkan pentingnya penguatan struktur pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan agar kebijakan pembangunan daerah tidak terlalu rentan terhadap dinamika pusat atau sumber pendapatan yang tidak tetap.

Tabel 2.16 Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah

Komponen Pendapatan	% thd Total Pendapatan Daerah	
	TW I 2024	TW I 2025
Pajak Daerah	13,30%	15,35%
Retribusi Daerah	0,82%	1,77%
Dipisahkan	2,50%	1,31%
Lain-lain PAD yang Sah	2,35%	1,97%
Dana Perimbangan	72,05%	67,83%
Dana Insentif Daerah	0,00%	0,14%
Dana Desa	0,75%	1,73%
Pendapatan Bagi Hasil	8,18%	8,10%
Hibah	0,05%	0,74%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan UU	0,00%	1,06%

Sumber: GFS, LRA Pemda se-Kalsel (Diolah)

Apabila dilihat dari data tabel di atas, struktur pendapatan daerah Kalimantan

Selatan hingga Triwulan I 2025 masih menunjukkan dominasi yang kuat dari Dana Perimbangan, meskipun proporsinya menurun dari 72,05% pada 2024 menjadi 67,83% pada 2025 untuk mendorong kemandirian daerah. Sementara itu, kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi masing-masing mengalami pertumbuhan positif. Pajak daerah tumbuh dari 13,30% menjadi 15,35%, sedangkan Retribusi juga bertumbuh meskipun proporsinya masih cukup rendah sebesar 1,77%. Hal ini mengindikasikan perluasan basis penerimaan daerah serta peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah. Kenaikan pada komponen Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan UU, meskipun kecil secara nominal, menunjukkan adanya pendapatan tambahan non-rutin yang mendiversifikasi sumber penerimaan daerah.

Di sisi lain, penurunan kontribusi dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD yang Sah mengindikasikan perlunya perbaikan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta inovasi sumber-sumber pendapatan sah lainnya dalam menopang pendapatan daerah.

2.2.2.2 Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berikut disajikan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Kalimantan Selatan periode s.d. Triwulan I 2025.



Sumber: GFS, LRA Pemda se-Kalsel (Diolah)

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Selatan hingga Triwulan I 2025 menunjukkan kinerja yang cukup positif secara agregat, dengan peningkatan yang signifikan pada dua komponen utama. Pajak Daerah tumbuh sebesar 38,07%, meningkat dari Rp913,03 miliar pada Triwulan I 2024 menjadi Rp1.260,64 miliar di tahun 2025. Pajak daerah meningkat dikontribusikan oleh pertumbuhan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tumbuh positif, meskipun beberapa pajak konsumsi seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir mengalami penurunan akibat dampak efisiensi anggaran. Pertumbuhan yang sangat tinggi juga terlihat pada Retribusi Daerah yang melonjak 159,07%, dari Rp56,00 miliar menjadi Rp145,08 miliar. Hal ini menunjukkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah melalui peningkatan tarif, penambahan objek pajak dan retribusi, serta perbaikan sistem pemungutan yang lebih digital dan terintegrasi.

Namun demikian, tidak semua komponen PAD mengalami pertumbuhan positif. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan justru mengalami kontraksi cukup tajam sebesar -37,45%, dari Rp171,59 miliar menjadi Rp107,33 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya kontribusi dividen dari BUMN dan BUMD terhadap laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah. Sementara itu, Lain-lain PAD yang Sah relatif stagnan dengan pertumbuhan hanya 0,37%, mengindikasikan masih adanya potensi pendapatan lain yang belum tergali secara maksimal, seperti dari jasa layanan daerah atau denda administrasi.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Triwulan I 2025 di Kalimantan Selatan menunjukkan variasi yang signifikan antar kabupaten/kota. Beberapa daerah mencatat lonjakan drastis, seperti Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan realisasi sebesar Rp79,26 miliar, tumbuh 2.249,36% dibanding tahun sebelumnya. Kabupaten Tabalong juga mencatat pertumbuhan sangat tinggi sebesar 643,27% dengan realisasi Rp43,46 miliar. Pertumbuhan signifikan juga terlihat di Kabupaten Banjar dengan realisasi Rp58,30 miliar, dan Kabupaten Banjarbaru sebesar

Rp55,52 miliar. Kenaikan tajam ini dipengaruhi oleh intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi, serta perbaikan sistem administrasi yang lebih efektif.

Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2025 juga dapat dikaitkan dengan implementasi kebijakan opsen (opsen pajak daerah), yaitu kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang baru. Kebijakan ini memberikan ruang lebih besar bagi kabupaten/kota untuk mendapatkan tambahan penerimaan dari sebagian hasil pajak provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dengan berlakunya kebijakan opsen, daerah yang memiliki volume kendaraan tinggi atau aktivitas ekonomi besar berpeluang memperoleh tambahan pendapatan lebih banyak. Hal ini antara lain terlihat dari kinerja PAD Kabupaten Tanah Bumbu (Rp78,34 miliar) dan Banjarbaru (Rp55,52 miliar), yang merupakan wilayah penyangga pertumbuhan ekonomi regional dengan lalu lintas kendaraan yang tinggi. Begitu pula Kabupaten Hulu Sungai Selatan, meskipun sebelumnya berkontribusi kecil, melonjak tajam menjadi Rp79,26 miliar, indikasi bahwa kebijakan ini bisa memperkuat fiskal daerah jika dimanfaatkan dengan strategi pemungutan dan pendataan yang baik.

Tabel 2.17 Rincian Pendapatan Asli Daerah per Kab/Kota

No.	PAD	Realisasi (Miliar Rp)		Growth (%)
		TW I 2024	TW I 2025	
1	Provinsi Kalsel	924,53	1.026,29	11,01%
2	Banjar	10,48	58,30	456,42%
3	Barito Kuala	20,16	26,68	32,35%
4	Banjarmasin	147,93	113,32	-23,39%
5	Banjarbaru	15,85	55,52	250,24%
6	Kotabaru	34,97	49,32	41,02%
7	Tanah Bumbu	26,25	78,34	198,46%
8	Tabalong	5,85	43,46	643,27%
9	Hulu Sungai Utara	18,77	23,13	23,25%
10	Balangan	26,41	3,80	-85,60%
11	Tapin	14,94	27,77	85,84%
12	Hulu Sungai Selatan	3,37	79,26	2249,36%
13	Hulu Sungai Tengah	17,20	25,69	49,39%
14	Tanah Laut	35,26	64,11	81,82%

Sumber: GFS, LRA Pemda se-Kalsel (Diolah)

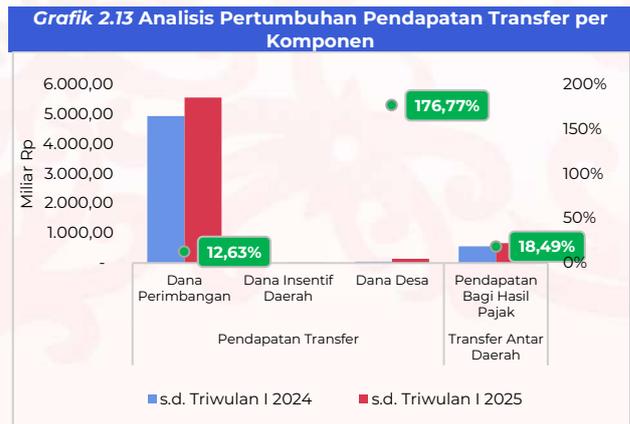
Di sisi lain, terdapat daerah yang justru mengalami penurunan PAD. Kota Banjarmasin, yang sebelumnya merupakan salah satu penyumbang PAD terbesar, kinerja pajak daerahnya turun menjadi Rp113,32 miliar dari Rp147,93 miliar atau sebesar -23,39%. Penurunan juga terjadi sangat tajam di Kabupaten Balangan, dari Rp26,41 miliar menjadi hanya Rp3,80 miliar, atau turun -85,60%. Penurunan ini disebabkan oleh pemberian insentif perpajakan kepada wajib pajak daerah terutama dalam mengakomodir peningkatan pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat sebagai dampak opsen pajak.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri mencatat realisasi PAD sebesar Rp1.026,29 miliar pada Triwulan I 2025, tumbuh 11,01% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mencerminkan perbaikan dalam pengelolaan PBBKB dan PKB serta jenis pajak provinsi lainnya. Sementara itu, kabupaten/kota cenderung bergantung pada pajak-pajak yang sangat terkait dengan konsumsi lokal seperti pajak restoran dan hotel, sehingga fluktuasi ekonomi setempat sangat memengaruhi PAD.

Ke depan, optimalisasi PAD perlu diarahkan pada tiga pendekatan strategis. Pertama, memperkuat digitalisasi sistem pemungutan dan integrasi data perpajakan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak. Kedua, mendorong profesionalisasi dan kinerja BUMD melalui reformasi tata kelola, audit kinerja, serta perluasan sektor usaha yang potensial dan menguntungkan. Ketiga, membuka ruang inovasi daerah seperti pemanfaatan aset *idle*, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah (pariwisata, pertanian, industri kreatif), serta memperkuat sinergi dengan sektor swasta melalui skema kemitraan yang saling menguntungkan. Dengan strategi tersebut, PAD tidak hanya meningkat dari sisi nominal, tetapi juga berkelanjutan dan adil bagi pembangunan daerah.

Pendapatan Transfer

Berikut disajikan data Pendapatan Transfer pada APBD Kalimantan Selatan periode s.d. Triwulan I 2025.



Sumber: GFS, LRA Pemda se-Kalsel (Diolah)

Pendapatan transfer yang diterima Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan hingga Triwulan I 2025 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dana perimbangan meningkat dari Rp4.945,21 miliar menjadi Rp5.569,79 miliar, atau tumbuh sebesar 12,63%. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam menjaga kesinambungan fiskal di daerah melalui alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur di daerah.

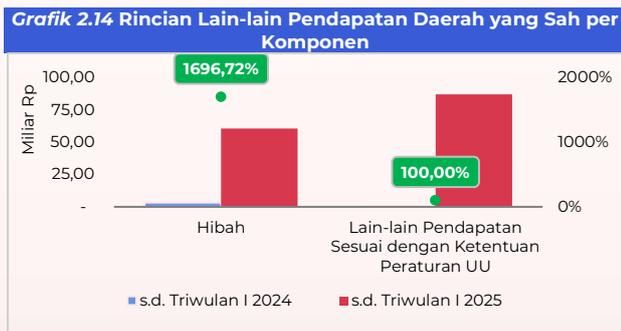
Salah satu komponen yang mengalami lonjakan tertinggi adalah Dana Desa yang meningkat drastis dari Rp51,40 miliar menjadi Rp142,25 miliar, atau tumbuh 176,77%. Kenaikan ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat yang terus mendorong percepatan pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan melalui transfer langsung ke desa-desa. Di sisi lain, Dana Insentif Daerah (DID), yang sebelumnya tidak tercatat pada Triwulan I 2024, mulai direalisasikan pada 2025 sebesar Rp11,30 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kalsel telah memenuhi sejumlah indikator kinerja tertentu yang menjadi prasyarat DID, seperti peningkatan kualitas belanja, kinerja fiskal, dan pelayanan publik.

Namun demikian, meskipun tren ini positif, ketergantungan yang masih tinggi terhadap dana transfer pusat menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan masih rendah. Oleh karena itu, meski transfer dari pusat

mengalami peningkatan, hal ini perlu dibarengi dengan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kemandirian daerah, khususnya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berikut disajikan data Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Kalimantan Selatan periode s.d. Triwulan I 2025.



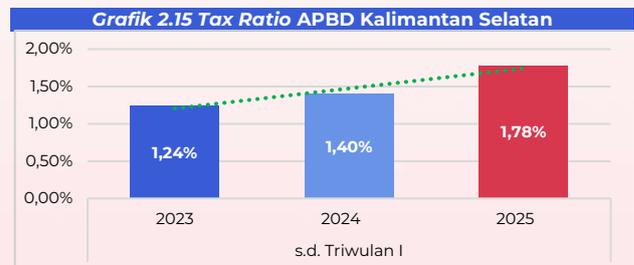
Sumber: GFS, LRA Pemda se-Kalsel (Diolah)

Perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah di Kalimantan Selatan menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang sangat signifikan hingga Triwulan I 2025. Hibah meningkat tajam dari Rp3,37 miliar menjadi Rp60,62 miliar atau tumbuh sebesar 1.696,72%. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh masuknya hibah dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan program prioritas tertentu di daerah, seperti penanggulangan bencana, pembangunan infrastruktur, atau pelayanan dasar. Selain itu, adanya partisipasi pihak ketiga seperti badan usaha atau lembaga non-pemerintah yang memberikan sumbangan juga turut mendorong kenaikan angka hibah ini.

Sementara itu, komponen lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga melonjak dari Rp0,29 miliar menjadi Rp87,05 miliar, mencerminkan pertumbuhan 100% lebih. Pendapatan ini umumnya bersumber dari penerimaan yang bersifat insidental atau spesifik seperti denda, klaim asuransi, dan hasil pengelolaan dana tertentu yang tidak termasuk dalam PAD utama. Lonjakan tersebut bisa menjadi indikasi adanya kebijakan optimalisasi terhadap sumber-sumber pendapatan non-konvensional yang sebelumnya belum tergarap maksimal.

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan di luar PAD dan dana transfer reguler. Namun demikian, karena sifat pendapatan ini yang tidak selalu berkelanjutan dan cenderung fluktuatif, maka pemerintah daerah tetap perlu berhati-hati dalam mengandalkannya sebagai basis pembiayaan jangka panjang. Ke depan, penting bagi Pemda untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, terutama dengan pemerintah pusat dan pihak swasta, agar potensi pendapatan seperti hibah dan kontribusi lain dapat terus dioptimalkan dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.2.2.3 Analisis Tax Ratio Daerah



Sumber: GFS, LRA Pemda se-Kalsel (Diolah)

Tren peningkatan *tax ratio* daerah Kalimantan Selatan dari tahun 2023 hingga 2024 menunjukkan arah yang positif, yakni naik dari 1,24% di 2023 menjadi 1,40% di 2024, dan terus meningkat menjadi 1,78% di 2025. Kenaikan *tax ratio* ini mencerminkan semakin besarnya kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan indikator penting dalam mengukur kapasitas fiskal dan efektivitas pemungutan pajak daerah.

Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya perbaikan dalam sistem administrasi perpajakan, termasuk digitalisasi pelayanan pajak daerah seperti *e-SPTPD*, *e-Billing*, dan kanal pembayaran daring yang mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kedua, pertumbuhan ekonomi mendorong peningkatan aktivitas usaha dan konsumsi, sehingga basis objek pajak seperti pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan pajak hotel menjadi lebih luas. Selain itu,

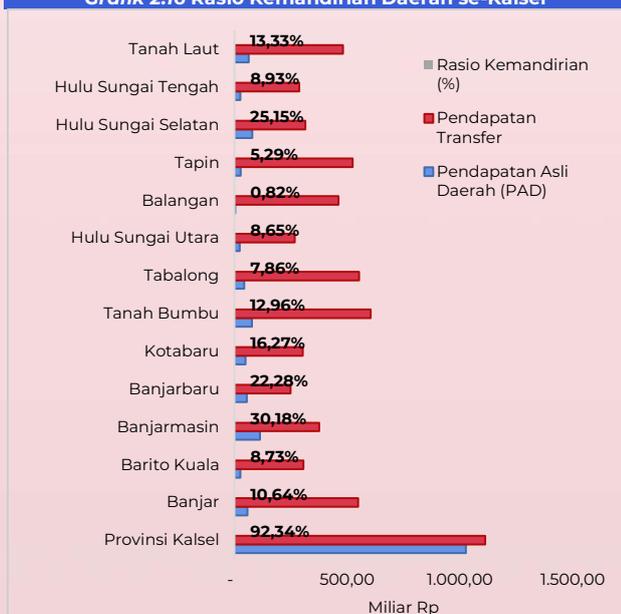
upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak oleh pemerintah daerah juga mulai menunjukkan hasil yang nyata.

Secara strategis, peningkatan *tax ratio* ini berkontribusi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah. Semakin tinggi *tax ratio*, semakin besar kemampuan Pemda membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah, di mana daerah didorong untuk mengembangkan potensi fiskalnya secara mandiri. Ke depan, konsistensi dalam reformasi perpajakan daerah, peningkatan kapasitas SDM pajak, serta edukasi kepada wajib pajak menjadi kunci untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan tren positif ini.

2.2.2.4 Analisis Tingkat Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah merupakan rasio yang merepresentasikan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan serta urusan pemerintahannya sendiri. Rasio kemandirian daerah dapat diukur dengan perhitungan proporsi PAD terhadap Pendapatan Transfer yang diterima oleh Pemda berkenaan. Berikut hasil rasio kemandirian dari tiap Pemda di Kalimantan Selatan.

Grafik 2.16 Rasio Kemandirian Daerah se-Kalsel



Sumber: GFS, LRA Pemda se-Kalsel (Diolah)

Berdasarkan data transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dianalisis tingkat kemandirian fiskal masing-masing daerah di Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov) memiliki rasio kemandirian fiskal tertinggi sebesar 92,34%, menempatkannya dalam kategori “tinggi” dengan pola hubungan delegative menandakan bahwa Pemprov memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri tanpa ketergantungan besar terhadap dana transfer. Di sisi lain, Kabupaten Balangan memiliki rasio kemandirian fiskal terendah hanya sebesar 0,82%, masuk ke dalam kategori “rendah sekali” dengan pola hubungan instruktif, yang mencerminkan ketergantungan nyaris total pada transfer pusat.

Rendahnya rasio kemandirian fiskal di sebagian besar kabupaten/kota disebabkan oleh terbatasnya basis penerimaan PAD, baik dari sisi objek pajak yang dapat digali, maupun efektivitas pemungutan retribusi dan hasil kekayaan daerah. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak yang lebih besar berada di tingkat provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), membuat PAD kabupaten/kota umumnya lebih kecil. Daerah seperti Banjarmasin, Banjarbaru, dan Hulu Sungai Selatan mencatat rasio kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain karena memiliki potensi ekonomi dan sektor jasa yang lebih kuat, serta kapasitas kelembagaan yang lebih baik dalam pemungutan pajak dan retribusi.

Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, daerah dengan rasio rendah perlu mengembangkan inovasi dalam menggali potensi pendapatan, seperti optimalisasi retribusi daerah berbasis layanan digital, pemanfaatan aset daerah secara produktif, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak lokal. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat sektor ekonomi lokal seperti pariwisata, UMKM, dan industri berbasis potensi unggulan daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan jangka panjang.

2.3.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah, yang terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Hingga akhir triwulan I 2025, capaian realisasi belanja APBD lingkup Kalimantan Selatan telah terealisasi sebesar Rp5.300,51 miliar atau 11,12% dari pagu yang telah ditetapkan. Kinerja belanja APBD ini dari sisi jumlah realisasi meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 29,84% dari capaian belanja triwulan I 2024 sebesar Rp4.082,25 miliar. Namun jika dilihat dari sisi capaian terhadap pagu, realisasi belanja daerah hingga akhir triwulan I tahun 2025 ini masih tergolong rendah.

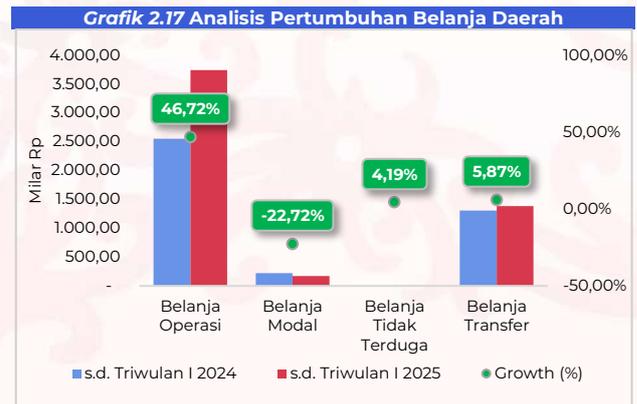
2.2.2.1 Analisis Kontribusi dan Komposisi Belanja Daerah

Pada triwulan I tahun 2023, Belanja Daerah di Kalimantan Selatan terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Berdasarkan komponen belanja tersebut kemudian dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.18 Rincian Belanja Daerah per Komponen

Komponen Pendapatan		Realisasi (Miliar Rp)		Growth (%)
		TW I 2024	TW I 2025	
Belanja Operasi	Belanja Pegawai	1.546,26	2.373,17	53,48%
	Belanja Barang dan Jasa	917,05	1.269,25	38,41%
	Belanja Bunga	3,90	1,16	-70,32%
	Belanja Subsidi	0,12	0,52	345,44%
	Belanja Hibah	67,38	69,13	2,61%
	Belanja Bantuan Sosial	16,16	29,42	82,10%
Total Belanja Operasi		2.550,86	3.742,64	46,72%
	Belanja Modal	221,69	171,32	-22,72%
Total Belanja Modal		221,69	171,32	-22,72%
	Belanja Tidak Terduga	1,64	1,71	4,19%
Total Belanja Tidak Terduga		1,64	1,71	4,19%
Belanja Transfer	Belanja Bagi Hasil	878,41	714,71	-18,64%
	Belanja Bantuan Keuang	429,65	670,13	55,97%
Total Belanja Transfer		1.308,06	1.384,84	5,87%

Sumber: GFS, LRA Pemda se-Kalsel (Diolah)



Sumber: GFS, LRA Pemda se-Kalsel (Diolah)

Berdasarkan data realisasi triwulan I tahun 2025, belanja daerah Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan pada beberapa komponen utama. Komponen belanja operasi mencatat pertumbuhan tertinggi secara nominal, yakni dari Rp2.550,86 miliar pada Triwulan I 2024 menjadi Rp3.742,64 miliar pada Triwulan I 2025 atau tumbuh 46,72%. Dari komponen ini, belanja pegawai menjadi kontributor tertinggi dengan realisasi Rp2.373,17 miliar, naik sebesar 53,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemda dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik melalui dukungan terhadap ASN, namun juga menunjukkan beban belanja rutin yang besar terhadap APBD.

Selain belanja pegawai, belanja barang dan jasa juga mengalami pertumbuhan cukup besar yakni 38,41%, menjadi Rp1.269,25 miliar. Peningkatan ini dapat mencerminkan peningkatan aktivitas birokrasi dan operasionalisasi program-program pemerintah daerah. Namun demikian, jika belanja barang dan jasa tidak diarahkan secara produktif dan efisien, hal ini berpotensi menimbulkan pemborosan atau belanja yang tidak langsung berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya, belanja modal justru mengalami penurunan signifikan sebesar -22,72%, dari Rp221,69 miliar menjadi hanya Rp171,32 miliar. Ini mengindikasikan penurunan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan aset-aset produktif lainnya. Padahal, belanja modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang, seperti pembangunan jalan, irigasi,

atau sarana pendidikan dan kesehatan. Penurunan ini perlu menjadi perhatian, karena bisa menghambat daya dorong fiskal daerah terhadap pembangunan fisik dan pelayanan publik.

Belanja transfer ke kabupaten/kota melalui belanja bagi hasil justru menurun 18,64%, sementara belanja bantuan keuangan meningkat 55,97%. Penurunan bagi hasil disebabkan oleh menurunnya basis penerimaan yang dibagihasilkan sejak pemberlakuan kebijakan opsen pajak. Sementara bantuan keuangan yang meningkat mencerminkan adanya intervensi strategis dari provinsi untuk mendukung program-program prioritas di daerah.

Secara keseluruhan, komposisi belanja masih sangat didominasi oleh belanja rutin seperti pegawai dan operasional, yang memang penting untuk menjaga fungsi pemerintahan. Namun, porsi belanja produktif seperti belanja modal yang justru menurun dapat menjadi sinyal lemahnya daya dorong fiskal terhadap pembangunan jangka panjang. Pemerintah daerah perlu menyeimbangkan kembali prioritas belanja, dengan memperbesar porsi belanja yang bersifat strategis dan berdampak luas pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut disajikan data terkait komposisi masing-masing komponen belanja terhadap total belanja APBD sebagai berikut.

Tabel 2.19 Kontribusi Komponen Belanja Daerah terhadap Total Belanja Daerah

Komponen Pendapatan	% thd Total Belanja Daerah	
	TW I 2024	TW I 2025
Belanja Pegawai	37,88%	44,77%
Belanja Barang dan Jasa	22,46%	23,95%
Belanja Bunga	0,10%	0,02%
Belanja Subsidi	0,00%	0,01%
Belanja Hibah	1,65%	1,30%
Belanja Bantuan Sosial	0,40%	0,56%
Belanja Modal	5,43%	3,23%
Belanja Tidak Terduga	0,04%	0,03%
Belanja Bagi Hasil	21,52%	13,48%
Belanja Bantuan Keuangan	10,52%	12,64%

Sumber: GFS, LRA Pemda se-Kalsel (Diolah)

Berdasarkan data komposisi belanja daerah Kalimantan Selatan hingga triwulan I tahun 2025, terlihat bahwa belanja pegawai mendominasi pengeluaran dengan proporsi mencapai 44,77% terhadap total belanja daerah, meningkat dari 37,88% pada periode

yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan semakin besarnya alokasi anggaran untuk membiayai gaji, tunjangan, dan hak keuangan aparatur sipil negara. Jika tidak dikendalikan, porsi yang terlalu besar untuk belanja pegawai dapat menggerus ruang fiskal untuk belanja produktif seperti belanja modal atau program pemberdayaan masyarakat, sehingga berisiko menurunkan efisiensi fiskal dan berdampak negatif terhadap pembangunan jangka panjang.

Komponen belanja barang dan jasa juga mencatat porsi besar, yakni 23,95% di Triwulan I 2025, sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya. Meski belanja ini penting untuk mendukung operasional pemerintahan, apabila tidak diarahkan secara efisien dan tepat sasaran, ada risiko pemborosan anggaran dalam bentuk pengadaan yang tidak strategis atau tumpang tindih. Oleh karena itu, perlu penguatan pengawasan dan evaluasi belanja agar benar-benar mendukung layanan publik dan bukan sekadar belanja rutin.

Di sisi lain, belanja modal justru menurun proporsinya menjadi hanya 3,23% pada triwulan I 2025, sebelumnya pada triwulan I 2024 dapat mencapai 5,43%. Penurunan ini mengindikasikan berkurangnya investasi daerah terhadap aset tetap seperti infrastruktur atau sarana publik lainnya. Proporsi belanja modal yang terlalu kecil juga menandakan minimnya pembangunan fisik yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menurunkan daya saing daerah dan memperlambat akselerasi pembangunan, sehingga perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan APBD ke depan. Sementara itu, belanja bagi hasil mengalami penurunan signifikan dari 21,52% menjadi 13,48%, sebagai dampak dari implementasi opsen pajak.

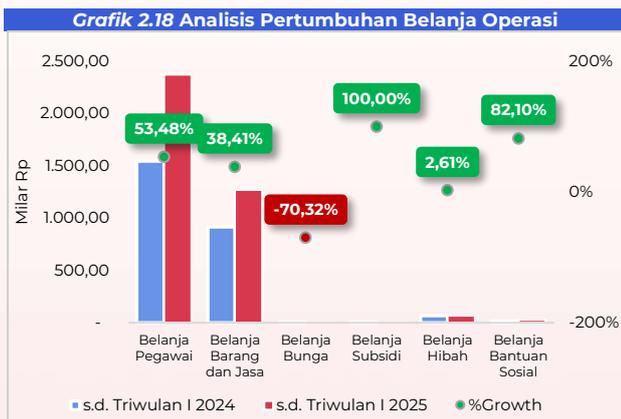
Secara umum, data di atas menunjukkan masih dominannya belanja yang bersifat konsumtif (pegawai dan operasional) dan belum seimbang komposisi belanja tersebut dengan belanja produktif (modal). Implikasinya adalah keterbatasan ruang fiskal untuk mendanai pembangunan strategis. Oleh karena itu, pemda perlu melakukan *refocusing* anggaran, memperkuat efisiensi belanja operasional, dan mengarahkan

belanja ke sektor yang memberikan *multiplier effect* ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

2.2.2.2 Analisis Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Belanja Operasi

Berikut ini adalah data pertumbuhan belanja operasi Kalimantan Selatan s.d. Triwulan I 2025.



Sumber: GFS, LRA Pemda se-Kalsel (Diolah)

Belanja operasi Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan hingga Triwulan I tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni tumbuh sebesar 46,72% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Komponen belanja operasi terbesar berasal dari belanja pegawai, yang mencapai Rp2.373,17 miliar, naik 53,48% dari tahun sebelumnya dan menjadi kontributor utama kenaikan total belanja operasi. Kenaikan ini kemungkinan disebabkan oleh penyesuaian belanja rutin seperti kenaikan gaji, tambahan penghasilan pegawai (TPP), dan dampak dari kebijakan pengangkatan PPPK. Di sisi lain, belanja bunga utang justru menurun drastis sebesar -70,32%, menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan pinjaman atau pelunasan lebih awal terhadap kewajiban bunga.

Komponen dengan pertumbuhan tertinggi adalah belanja subsidi, yang naik hingga 345,44%, meskipun secara nominal masih relatif kecil (dari Rp0,12 miliar menjadi Rp0,52 miliar). Disusul oleh belanja bantuan sosial, yang tumbuh 82,10%, mencerminkan perhatian pemerintah terhadap perlindungan sosial masyarakat. Meskipun demikian, proporsi terbesar tetap berada pada belanja

rutin seperti pegawai dan barang/jasa, yang secara kumulatif bisa mengurangi ruang fiskal untuk belanja pembangunan jangka panjang. Hal ini perlu dicermati dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang menyatakan bahwa batas wajar belanja pegawai adalah maksimal 30% terhadap total belanja APBD.

Dengan belanja pegawai yang kini mencapai 44,77% dari total belanja daerah di Triwulan I 2025, Pemda Kalimantan Selatan sudah melampaui batas ideal yang ditetapkan UU HKPD. Ini berimplikasi pada berkurangnya kapasitas fiskal daerah dalam mendanai kegiatan pembangunan produktif. Oleh karena itu, penting bagi Pemda untuk menata kembali postur belanja operasi, mengendalikan pertumbuhan belanja pegawai, dan secara bertahap mengalihkan fokus anggaran ke belanja modal dan pemberdayaan masyarakat agar kemandirian fiskal dan efektivitas APBD dapat tercapai secara berkelanjutan.

Belanja Modal

Belanja modal Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan hingga Triwulan I 2025 tercatat mengalami penurunan signifikan sebesar 22,72%, dari Rp221,69 miliar pada TW I 2024 menjadi hanya Rp171,32 miliar pada periode yang sama tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya pergeseran alokasi belanja yang lebih berat ke arah belanja operasional, khususnya belanja pegawai dan barang/jasa, yang justru mengalami peningkatan tajam. Padahal, belanja modal merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena bersifat produktif dan menciptakan aset jangka panjang seperti infrastruktur, sarana pelayanan publik, dan fasilitas ekonomi.

Menurut amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), belanja modal diarahkan agar optimal minimal 40% dari total belanja daerah, terutama untuk mendorong pelayanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan realisasi belanja modal yang hanya sekitar 3,23% dari total

belanja APBD TW I 2025, Pemda Kalsel masih jauh dari ideal tersebut. Implikasi dari rendahnya belanja modal ini adalah terbatasnya upaya pembangunan fisik dan peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada penataan ulang postur anggaran daerah agar tidak hanya fokus pada belanja rutin, namun juga memberikan ruang fiskal yang cukup untuk investasi pembangunan strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.

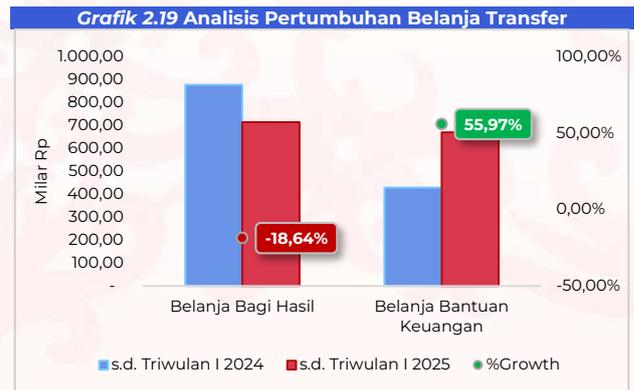
Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan hingga Triwulan I 2025 mengalami peningkatan sebesar 4,19%, dari Rp1,64 miliar pada TW I 2024 menjadi Rp1,71 miliar di TW I 2025. Meskipun pertumbuhannya positif, secara nominal BTT tetap merupakan salah satu komponen belanja yang paling kecil dalam struktur APBD. Padahal, periode Januari hingga Maret 2025 diwarnai oleh berbagai bencana hidrometeorologi, terutama banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan.

Data menunjukkan bahwa selama awal tahun 2025, Kalimantan Selatan mengalami 13 kejadian banjir, menjadikannya salah satu provinsi dengan frekuensi bencana tertinggi di Indonesia pada periode tersebut. Kota Banjarmasin sendiri mencatat 114 titik genangan air antara 1-16 Januari 2025, dengan ketinggian air bervariasi hingga mencapai betis orang dewasa. Selain itu, banjir rob juga terjadi pada akhir Maret 2025, menyebabkan genangan di berbagai wilayah pesisir. Meskipun demikian, alokasi BTT yang relatif kecil menunjukkan keterbatasan ruang fiskal dalam merespons kondisi darurat secara optimal. Hal ini menekankan pentingnya peninjauan ulang terhadap alokasi BTT agar lebih proporsional dengan risiko bencana yang dihadapi, serta perlunya strategi penguatan kapasitas fiskal daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana.

Belanja Transfer

Berikut adalah perkembangan pertumbuhan belanja transfer Kalimantan Selatan s.d. Triwulan I 2025.

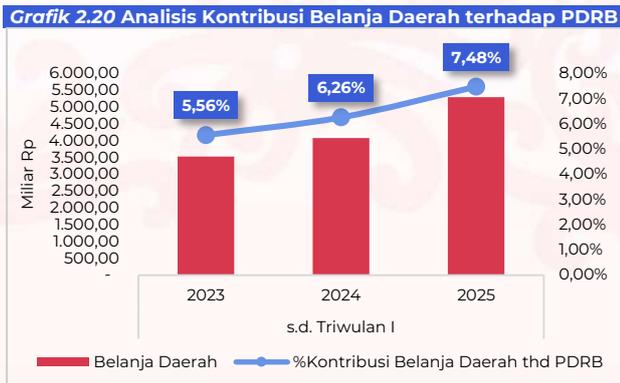


Sumber: GFS, LRA Pemda se-Kalsel (Diolah)

Perkembangan belanja transfer Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan hingga Triwulan I 2025 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Komponen belanja bantuan keuangan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 55,97%, meningkat dari Rp429,65 miliar di TW I 2024 menjadi Rp670,13 miliar pada TW I 2025. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemda Kalsel dalam memperkuat dukungan fiskal kepada kabupaten/kota atau lembaga tertentu, baik untuk pelaksanaan urusan pemerintahan maupun mendukung program strategis daerah. Pertumbuhan ini juga bisa menjadi indikasi penguatan peran koordinatif dan kolaboratif Pemprov Kalsel terhadap pengelolaan pembangunan lintas wilayah.

Sebaliknya, belanja bagi hasil mengalami penurunan sebesar 18,64%, dari Rp878,41 miliar menjadi Rp714,71 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perubahan skema penyaluran pendapatan pajak melalui opsen (opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen BBNKB). Dalam skema baru ini, penerimaan pajak langsung didistribusikan melalui sistem *split payment* antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, tanpa perlu menunggu mekanisme pembagian hasil seperti sebelumnya. Kebijakan ini dirancang untuk mengakselerasi penerimaan daerah, meningkatkan likuiditas kas daerah di tingkat bawah, dan memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota secara langsung. Oleh karena itu, penurunan belanja bagi hasil sebetulnya merupakan bentuk efisiensi birokrasi fiskal dan langkah menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih responsif dan tepat waktu.

2.2.2.3 Analisis Kontribusi Belanja Daerah terhadap PDRB



Sumber: GFS, LRA Pemda se-Kalsel, BPS (Diolah)

Belanja Daerah Kalimantan Selatan hingga Triwulan I 2025 menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, baik dari sisi nominal maupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB). Pada tahun 2023, realisasi belanja daerah mencapai Rp3.533,33 miliar dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 5,56%, meningkat menjadi Rp4.082,25 miliar atau 6,26% di 2024, dan melonjak lebih tinggi pada 2025 menjadi Rp5.300,51 miliar dengan kontribusi 7,48%. Peningkatan rasio ini mengindikasikan semakin kuatnya peran fiskal daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Artinya, belanja pemerintah daerah berkontribusi secara nyata terhadap perputaran ekonomi, baik melalui belanja pegawai, pengadaan barang dan jasa, maupun transfer ke pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan peran APBD sebagai instrumen penggerak perekonomian daerah semakin efektif dari tahun ke tahun.

2.2.2.4 Analisis Belanja Daerah Per Kapita



Sumber: GFS, LRA Pemda se-Kalsel, BPS (Diolah)

Pada triwulan I tahun 2025, Belanja Daerah Per Kapita di Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp1.226.025,48 per penduduk, menunjukkan bahwa setiap individu di Kalsel memperoleh manfaat fiskal sebesar nilai tersebut dari belanja pemerintah daerah. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp955.270,38, dan tahun 2023 sebesar Rp845.653,61. Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh naiknya total Belanja Daerah secara substansial, yang tumbuh lebih cepat dibandingkan pertambahan jumlah penduduk. Lonjakan belanja ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur, yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan Belanja Daerah Per Kapita sebesar 28,34% pada 2025 juga mencerminkan penguatan kapasitas fiskal daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah di Kalimantan Selatan.

2.2.2.5 Analisis Belanja Daerah Berdasarkan Berdasarkan Fungsi

Berikut ini adalah data belanja daerah per fungsi s.d. Triwulan I 2025.

Belanja per Fungsi	Realisasi (Miliar Rp)		Trendline	Growth (%)
	TW I 2024	TW I 2025		
PELAYANAN UMUM	1.809,39	2.288,96	↗	26,50%
PERTAHANAN	-	-	↔	0,00%
KETERBITAN DAN KEAMANAN	93,05	87,52	↘	-5,95%
EKONOMI	318,98	487,63	↗	52,87%
LINGKUNGAN HIDUP	45,47	89,62	↗	97,09%
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	331,24	175,89	↘	-46,90%
KESEHATAN	516,99	930,07	↗	79,90%
PARIWISATA DAN BUDAYA	14,31	22,71	↗	0,00%
AGAMA	-	-	↔	0,00%
PENDIDIKAN	882,11	1.126,80	↗	27,74%
PERLINDUNGAN SOSIAL	70,71	91,31	↗	29,13%

Sumber: GFS, LRA Pemda se-Kalsel (Diolah)

Belanja berdasarkan fungsi pada APBD Kalimantan Selatan triwulan I 2025 menunjukkan kecenderungan peningkatan pada sebagian besar sektor, dengan total belanja terbesar tercatat pada fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp2,29 triliun dan Pendidikan sebesar Rp1,13 triliun. Keduanya mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi utama birokrasi dan layanan dasar publik. Kenaikan signifikan juga tercermin pada fungsi Kesehatan yang tumbuh 79,90% dari Rp516,99

miliar menjadi Rp930,07 miliar. Lonjakan ini kemungkinan besar disebabkan oleh peningkatan anggaran pelayanan kesehatan masyarakat pascapandemi dan program prioritas di bidang kesehatan. Di sisi lain, fungsi Ekonomi dan Lingkungan Hidup juga menunjukkan pertumbuhan tinggi masing-masing sebesar 52,87% dan 97,09%, mengindikasikan perhatian pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan dan penguatan sektor ekonomi daerah.

Sebaliknya, beberapa fungsi mengalami penurunan. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum mengalami kontraksi cukup dalam sebesar -46,90%, yang dapat disebabkan oleh berkurangnya proyek fisik atau tertundanya kegiatan infrastruktur dasar. Fungsi Ketertiban dan Keamanan juga menurun sebesar -5,95%, yang kemungkinan karena proporsi anggaran fungsi ini lebih banyak di-cover oleh instansi vertikal seperti kepolisian atau TNI. Tidak ada alokasi anggaran pada fungsi Pertahanan dan Agama, yang sesuai dengan pembagian kewenangan karena keduanya merupakan urusan absolut pemerintah pusat. Secara keseluruhan, tren pertumbuhan belanja per fungsi ini mencerminkan upaya Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dalam menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan strategis, namun perlu diwaspadai adanya ketimpangan antar fungsi yang dapat memengaruhi keseimbangan pelayanan publik lintas sektor.

2.3.3 Surplus/ Defisit APBD



Sumber: GFS, LRA Pemda se-Kalsel, BPS (Diolah)

Surplus APBD Kalimantan Selatan pada triwulan I tahun 2025 tercatat sebesar Rp2.910,87 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.781,51 miliar.

Meskipun mencerminkan posisi keuangan daerah yang cukup kuat dari sisi pendapatan, surplus yang tinggi ini juga dapat menjadi indikator bahwa belanja daerah belum dimanfaatkan secara optimal pada awal tahun anggaran. Dengan realisasi pendapatan sebesar Rp8.211,38 miliar dan belanja Rp5.300,51 miliar, terdapat ruang fiskal yang cukup besar yang seharusnya bisa segera dimobilisasi untuk mendukung program pembangunan. Apabila tidak diimbangi dengan akselerasi belanja produktif, seperti belanja modal dan belanja yang mendukung layanan publik, maka potensi dampak fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tertunda. Oleh karena itu, strategi percepatan penyerapan anggaran secara tepat sasaran menjadi penting untuk menjaga efektivitas pelaksanaan APBD sepanjang tahun.

2.3.4 Pembiayaan Daerah

Pada triwulan I tahun 2025, kondisi pembiayaan APBD Kalimantan Selatan menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi pembiayaan mencatat angka negatif sebesar Rp103,71 miliar, atau mengalami kontraksi sebesar 100,48% dibandingkan triwulan I 2024 yang mencatat realisasi Rp21,76 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh merosotnya penerimaan pembiayaan, dari Rp21,83 triliun menjadi hanya Rp2,54 miliar atau turun hampir 100%. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan justru meningkat dari Rp63,99 miliar menjadi Rp106,25 miliar, tumbuh 66,03%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada awal tahun 2025, Pemerintah Daerah Kalsel belum mengandalkan instrumen pembiayaan secara aktif, baik dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya maupun dari sumber pembiayaan lain. Situasi ini perlu dicermati karena minimnya penerimaan pembiayaan bisa mempersempit ruang fiskal untuk mendukung program prioritas apabila tidak ditopang dengan akselerasi belanja dan realisasi pendapatan yang optimal.

2.3.5 Prognosis / Outlook Kinerja APBD di Kalimantan Selatan

Berikut adalah prognosis / outlook kinerja APBD di Kalimantan Selatan.

Tabel 2.21 Prognosis Kinerja APBD Kalimantan Selatan (Miliar Rp)

Uraian			Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Surplus/ Defisit
Pagu			41.992,24	47.655,97	(5.663,74)
Realisasi	TW I	Rp	8.211,38	5.300,51	2.910,87
		%	19,55%	11,12%	
Proyeksi	TW II	Rp	16.687,71	12.066,49	4.621,22
		%	39,74%	25,32%	
	TW III	Rp	25.388,51	23.365,72	2.022,78
		%	60,46%	49,03%	
	TW IV	Rp	41.215,38	40.488,52	726,86
		%	98,15%	84,96%	

Sumber: GFS, LRA Pemda se-Kalsel, BPS (Diolah)

Berdasarkan outlook atau prognosis kinerja fiskal Kalimantan Selatan tahun 2025, terlihat bahwa Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mencapai Rp41.215,38 miliar atau 98,15% dari target pagu sebesar Rp41.992,24 miliar. Ini menunjukkan kinerja pendapatan yang sangat mendekati target dan mencerminkan optimisme terhadap optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer pusat dan lain-lain pendapatan sah. Realisasi yang cukup tinggi hingga triwulan pertama (19,55%) juga memberikan sinyal positif bahwa laju pencapaian target pendapatan cukup stabil dan menjanjikan untuk sisa tahun berjalan.

Sementara itu, Belanja Daerah diproyeksikan terealisasi sebesar Rp40.488,52 miliar atau sekitar 84,96% dari total pagu Rp47.655,97 miliar. Capaian ini menandakan potensi *under-spending*, yaitu tidak terserapnya anggaran secara optimal yang mungkin disebabkan oleh penundaan lelang proyek, kendala administratif, atau pergeseran prioritas belanja. Meskipun belanja cenderung meningkat dari triwulan ke triwulan, realisasi akhir tahun diperkirakan masih menyisakan ruang fiskal yang tidak termanfaatkan sepenuhnya.

Dengan kombinasi dari pendapatan yang nyaris memenuhi target dan belanja yang tidak sepenuhnya terserap, maka defisit anggaran yang direncanakan sebesar Rp5.663,74 miliar akan jauh lebih kecil dari

proyeksi realisasi, yaitu hanya Rp726,86 miliar pada akhir tahun. Ini mencerminkan kondisi surplus semu yang sebenarnya menunjukkan belum optimalnya belanja pembangunan dan pelayanan publik, bukan karena efisiensi belanja. Ke depan, Pemerintah Daerah perlu memperbaiki perencanaan, akselerasi penyerapan, dan memperkuat manajemen proyek agar APBD benar-benar dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

2.3.6 Rekomendasi Kebijakan APBD

Untuk mendorong optimalisasi penerimaan daerah, Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan perlu menguatkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi intensifikasi dapat ditempuh melalui digitalisasi layanan perpajakan seperti e-tax, e-retribusi, dan pemasangan sistem tapping box di titik-titik usaha strategis untuk meningkatkan akurasi pelaporan dan mencegah kebocoran penerimaan. Sementara itu, ekstensifikasi dapat diarahkan pada penggalan potensi pendapatan dari sektor jasa, pariwisata, dan pemanfaatan aset daerah seperti optimalisasi kinerja BUMD atau pengembangan kerja sama dengan pihak ketiga melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, percepatan proses verifikasi dan penyaluran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), perlu ditingkatkan melalui koordinasi antarlembaga agar pendapatan tidak tertahan secara administratif.

Di sisi belanja, penting bagi Pemerintah Daerah untuk mengakselerasi penyerapan anggaran sejak awal tahun, terutama dalam komponen belanja modal yang justru mengalami penurunan signifikan sebesar -22,72% pada Triwulan I 2025. Penurunan ini bertolak belakang dengan amanat Undang-Undang HKPD yang menekankan pentingnya proporsi belanja modal sebagai bentuk investasi jangka panjang dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui *early procurement*, perencanaan kegiatan yang matang, serta penguatan peran TAPD dan

OPD dalam pengawasan realisasi fisik dan keuangan secara berkala perlu menjadi prioritas. Selain itu, pemberian insentif kinerja kepada OPD yang berhasil menyerap anggaran dengan baik dan berkualitas dapat mendorong budaya kerja yang lebih responsif dan proaktif dalam pengelolaan APBD.

Dengan memperkuat sisi penerimaan dan mempercepat realisasi belanja secara simultan, diharapkan APBD Kalimantan Selatan tidak hanya mampu menunjukkan surplus nominal, tetapi juga menjadi katalis nyata bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

2.3. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian Tahunan 2024

Konsolidasi anggaran antara APBN dan APBD Kalimantan Selatan hingga Triwulan I tahun 2025 menggambarkan dinamika fiskal yang kompleks, dengan tren penurunan pendapatan negara secara keseluruhan di tengah peningkatan belanja dan transfer pemerintah. Penurunan tajam pada pendapatan perpajakan dan PNBP menjadi catatan penting yang kontras dengan belanja

Tabel 2.22 LRA Konsolidasi Kalimantan Selatan (Miliar Rp)

No	Uraian	Triwulan I Tahun 2024	Triwulan I Tahun 2025	Growth (%)
A	Pendapatan Negara dan Hibah	5.523,83	3.519,47	-36,29%
A.1	Pendapatan Perpajakan	4.213,68	2.586,97	-38,61%
1	Pajak Dalam Negeri	4.168,97	2.318,75	-44,38%
2	Pajak Perdagangan Internasional	44,71	268,22	499,94%
A.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.306,78	871,89	-33,28%
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang	171,59	107,33	-37,45%
2	PNBP Lainnya	551,37	579,51	5,10%
3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	0,00%
4	Pendapatan Transfer	387,14	-	-100,00%
5	Bantuan Keuangan	-	-	0,00%
6	Pendapatan BLU	196,67	185,05	-5,91%
A.3	Hibah	3,37	60,62	1696,72%
1	Pendapatan Hibah	3,37	60,62	1696,72%
B	Belanja dan Transfer Pemerintah	7.169,72	7.363,56	2,70%
B.1	Belanja Pempus/Pemda	4.865,73	5.442,87	11,86%
1	Belanja Pegawai	2.554,19	3.478,52	36,19%
2	Belanja Barang dan Jasa	1.889,62	1.643,77	-13,01%
3	Belanja Modal	324,81	209,87	-35,39%
4	Pembayaran Bunga Utang	3,90	1,16	-70,32%
5	Belanja Subsidi	0,12	0,52	345,44%
6	Hibah	67,38	69,13	2,61%
7	Belanja Bantuan Sosial	24,09	38,20	58,61%
8	Belanja Lain-Lain (Belanja Tak Terduga)	1,64	1,71	4,19%
B.2	Transfer- Transfer Antar Pemda	2.303,99	1.920,68	-16,64%
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	315,98	12,39	-96,08%
2	Transfer Bantuan Keuangan	429,65	670,13	55,97%
3	Transfer Pempus ke Pemda dan Dana Desa	1.558,36	1.238,17	-20,55%
C	Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	(1.645,89)	(3.844,08)	-133,56%
D	Pembiayaan	21.761,10	(103,71)	-100,48%
D.1	Penerimaan Pembiayaan	21.825,09	2,54	-99,99%
1	Penggunaan SILPA TA Sebelumnya	21.825,09	2,42	-99,99%
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	0,00%
3	Hasil Penjualan Keayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	0,00%
4	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	0,00%
5	Penerimaan Kembali Piutang	0,00	0,12	2691,62%
6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	0,00%
D.2	Pengeluaran Pembiayaan	63,99	106,25	66,03%
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	0,00%
2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	49,28	85,00	72,47%
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	14,71	21,25	44,46%
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	0,00%
5	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	0,00%
E	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran - (D + C)	20.115,21	(3.947,79)	-119,63%

Sumber: GFS, LRA Pemda se-Kalsel (Diolah)

pemerintah pusat dan daerah yang justru meningkat, khususnya pada komponen belanja pegawai dan bantuan sosial. Sementara itu, defisit anggaran yang semakin dalam dibandingkan tahun sebelumnya menandakan adanya ketidakseimbangan fiskal yang perlu diantisipasi melalui strategi pembiayaan yang lebih efektif dan terukur di level pusat maupun daerah. Hal ini menjadi penting sebagai pijakan evaluatif dalam merumuskan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah agar lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi ke depan. Berikut disajikan data konsolidasi anggaran Kalimantan Selatan s.d. triwulan I 2025.

2.3.1 Pendapatan Negara Konsolidasian

Perkembangan pendapatan konsolidasi di Kalimantan Selatan hingga triwulan I 2025 menunjukkan tren penurunan yang cukup tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Total pendapatan negara dan hibah tercatat sebesar Rp3.519,47 miliar, turun sebesar 36,29% dari capaian tahun 2024 yang sebesar Rp5.523,83 miliar. Penurunan terbesar terjadi pada komponen pendapatan perpajakan yang anjlok 38,61%, dari Rp4.213,68 miliar di triwulan I 2024 menjadi Rp2.586,97 miliar pada 2025. Kontraksi paling signifikan tercermin pada pajak dalam negeri yang menyusut 44,38% menjadi hanya Rp2.318,75 miliar, mengindikasikan perlambatan aktivitas ekonomi di dalam negeri maupun dampak dari kebijakan perpajakan nasional. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga menurun 33,28%, dari Rp1.306,78 miliar menjadi Rp871,89 miliar.

Meskipun terdapat peningkatan luar biasa pada komponen hibah sebesar 1.696,72% dari Rp3,37 miliar menjadi Rp60,62 miliar nilai ini belum signifikan dalam menopang keseluruhan struktur pendapatan. Lonjakan ini lebih bersifat anomali dan temporer, bukan mencerminkan tren struktural. Secara keseluruhan, kondisi ini menandakan menurunnya kapasitas penerimaan di daerah, baik dari sisi penerimaan pusat maupun potensi daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan, penguatan peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta pemanfaatan teknologi informasi untuk

mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, termasuk pajak dan retribusi daerah, guna menjaga keberlanjutan fiskal serta mendukung agenda pembangunan di Kalimantan Selatan.

2.3.2 Belanja Negara Konsolidasian

Perkembangan belanja konsolidasi di Kalimantan Selatan hingga triwulan I 2025 menunjukkan tren kenaikan moderat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Total belanja dan transfer pemerintah meningkat sebesar 2,70%, dari Rp7.169,72 miliar pada triwulan I 2024 menjadi Rp7.363,56 miliar pada triwulan I 2025. Kenaikan tertinggi terjadi pada pos belanja pegawai, yang melonjak 36,19% menjadi Rp3.478,52 miliar, mencerminkan peningkatan beban aparatur negara, termasuk gaji dan tunjangan. Sebaliknya, belanja barang dan jasa justru mengalami kontraksi sebesar 13,01%, turun menjadi Rp1.643,77 miliar, yang dapat mengindikasikan efisiensi belanja operasional atau keterlambatan pelaksanaan program kegiatan pada awal tahun anggaran.

Selain itu, belanja modal juga mengalami penurunan cukup tajam sebesar 35,39%, hanya terealisasi sebesar Rp209,87 miliar, yang bisa berdampak pada lambatnya realisasi pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, belanja bantuan sosial justru mengalami kenaikan signifikan sebesar 58,61% menjadi Rp38,20 miliar, menunjukkan perhatian pemerintah terhadap perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Secara umum, struktur belanja yang masih didominasi oleh belanja pegawai perlu mendapat perhatian, agar ruang fiskal untuk belanja produktif seperti belanja modal dan belanja sosial dapat lebih optimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan.

2.3.3 Analisis Surplus / Defisit Konsolidasian

Surplus/defisit konsolidasi di Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 mengalami pelebaran defisit yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tercatat defisit sebesar Rp3.844,08 miliar, naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan defisit tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.645,89 miliar. Pelebaran defisit ini

terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan konsolidasi yang cukup tajam, yakni sebesar 36,29%, sementara belanja dan transfer justru mengalami sedikit kenaikan sebesar 2,70%. Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan fiskal yang perlu segera direspons melalui optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, serta penguatan strategi pembiayaan yang berkelanjutan agar tidak membebani fiskal daerah di masa mendatang.

2.3.4 Analisis Pembiayaan Konsolidasian

Perkembangan pembiayaan konsolidasi di Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 menunjukkan penurunan yang sangat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi pembiayaan tercatat defisit sebesar Rp103,71 miliar, berbanding terbalik dengan surplus pembiayaan pada triwulan I 2024 yang mencapai Rp21.761,10 miliar. Penurunan drastis ini terutama disebabkan oleh merosotnya penerimaan pembiayaan, dari Rp21.825,09 miliar menjadi hanya Rp2,54 miliar (turun 99,99%), yang mencerminkan menurunnya penggunaan SILPA dan minimnya sumber pembiayaan lain. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan justru meningkat sebesar 66,03%. Ketidakseimbangan ini menandakan perlunya perencanaan pembiayaan yang lebih realistis dan strategi diversifikasi sumber pembiayaan agar tidak terlalu bergantung pada saldo anggaran lebih tahun sebelumnya.

2.4. Progres Implementasi Program Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG)

Perkembangan Pelaksanaan Program MBG di Kalimantan Selatan

Program MBG merupakan salah satu *quickwins* pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan alokasi anggaran tahun 2025 mencapai Rp71 triliun. Program MBG memiliki tujuan, antara lain untuk memastikan akses terhadap makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak-anak untuk meningkatkan kesehatan.

Lebih lanjut, program MBG diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dan

mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Menteri Keuangan memberikan arahan untuk dapat mengukur dampak positif dan melakukan komunikasi publik terhadap pelaksanaan program MBG.

Total realisasi program MBG sampai dengan 16 April 2025 secara nasional pada BGN tercatat sebesar **Rp1.446,34 miliar (2,04% dari pagu total)** yang terdiri dari Rp1.052,66 miliar untuk program Pemenuhan Gizi Nasional dan Rp393,68 miliar untuk program Dukungan Manajemen.

Adapun target nasional jumlah penerima manfaat program MBG adalah sebanyak 17.890.263 jiwa dan realisasi jumlah penerima secara nasional hingga 16 April 2025 sebanyak 3.036.689 jiwa melalui 1.081 SPPG yang tersebar di 38 provinsi. Sedangkan untuk di Kalimantan Selatan sudah terealisasi sebanyak 20.524 penerima dari target sebanyak 963.320 jiwa (data BGN).

Hingga akhir Maret 2025, realisasi jumlah penerima manfaat program MBG di Kalimantan Selatan adalah sejumlah 12.028 siswa melalui 11 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sedangkan hingga saat ini (per 22 Mei 2025), sudah terealisasi sebanyak 33.915 jiwa (3,52% dari target) melalui 13 SPPG.

Indikasi Awal Dampak Program MBG di Kalimantan Selatan

Untuk melihat dampak dari program MBG terhadap beberapa *outcome* jangka pendek di Kalimantan Selatan, dapat disampaikan bahwa meskipun implementasi program MBG masih dalam tahap awal dan sebagian besar kebijakan dipegang pemerintah pusat, akan memiliki potensi dampak signifikan terhadap berbagai indikator ekonomi di Kalsel sebagai berikut:

1. Dampak terhadap harga dan ketersediaan bahan makanan: peningkatan permintaan, potensi kenaikan harga (jangka pendek), stabilitas harga (jangka panjang), dan peningkatan ketersediaan;

2. Dampak terhadap tingkat inflasi;
3. Dampak terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN);
4. Indikator lain yang sesuai: pemberdayaan UMKM lokal, penyerapan tenaga kerja, peningkatan konsumsi rumah tangga, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan dampak terhadap kantin sekolah/penyedia makanan lain.

Terkait dampak terhadap tingkat inflasi, dapat disampaikan bahwa secara rata-rata terdapat kenaikan harga bahan makanan sebagai dampak program MBG di Kalimantan Selatan pada hampir seluruh jenis bahan makanan menurut harga tertinggi maupun harga terendah sebagaimana tabel 1. Namun terdapat beberapa jenis bahan makanan yang cukup mengalami penurunan harga.

Tabel 2.23 Harga Pangan di Kalimantan Selatan

Jenis Bahan	Tertinggi		Terendah	
	Akhir 2024	TW I 2025	Akhir 2024	TW I 2025
Beras SPHP	13.100 /kg	13.100 /kg	12.000 /kg	12.400 /kg
Jagung	13.000 /kg	7.264 /kg	5.000 /kg	4.500 /kg
Kedelai biji kering (impor)	12.000 /kg	12.667 /kg	8.853 /kg	8.732 /kg
Bawang merah	43.952 /kg	42.966 /kg	37.391 /kg	32.187 /kg
Bawang putih bonggol	42.310 /kg	45.570 /kg	38.000 /kg	39.448 /kg
Cabai merah keriting	51.184 /kg	80.325 /kg	27.731 /kg	55.431 /kg
Cabai merah besar	60.000 /kg	80.298 /kg	47.500 /kg	58.929 /kg
Cabai rawit merah	57.037 /kg	116.949 /kg	35.652 /kg	85.259 /kg
Daging sapi murni	18.000 /kg	179.688 /kg	130.000 /kg	135.518 /kg
Daging ayam ras	40.783 /kg	39.458 /kg	24.861 /kg	24.486 /kg
Telur ayam ras	30.435 /kg	30.793 /kg	28.107 /kg	29.000 /kg
Gula konsumsi	18.000 /kg	18.547 /kg	16.870 /kg	17.500 /kg
Minyak goreng kemasan	20.206 /liter	20.967 /liter	16.643 /liter	17.022 /liter

Minyak goreng curah	18.000 /liter	17.333 /liter	15.500 /liter	16.000 /liter
Tepung terigu (curah)	10.412 /kg	10.000 /kg	8.660 /kg	8.678 /kg
Tepung terigu (kemasan)	15.715 /kg	16.000 /kg	12.000 /kg	12.107 /kg
Ikan kembung	50.912 /kg	49.774 /kg	31.512 /kg	28.760 /kg
Ikan tongkol	42.229 /kg	45.906 /kg	25.000 /kg	25.960 /kg
Ikan bandeng	30.357 /kg	35.170 /kg	22.619 /kg	23.114 /kg
Garam konsumsi	10.400 /kg	10.693 /kg	9.621 /kg	9.263 /kg

Sumber: Badan Pangan Nasional (Diolah)

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa harga pangan untuk bahan makanan program MBG sudah mengalami dampak kenaikan harga makanan akibat adanya program MBG. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa kenaikan harga pangan masih belum signifikan berpengaruh negatif terhadap kualitas program MBG, sehingga menu yang disajikan dalam program MBG di Kalsel masih dapat memenuhi standar kecukupan gizi.

Secara bulanan (mtm) sebagai dampak program MBG, penyebab utama tekanan inflasi datang dari komoditas pangan segar seperti bawang merah, cabai rawit, dan jagung manis, yang lazim bergejolak menjelang musim tanam baru. Sementara itu, penurunan harga pada sejumlah sayuran daun seperti bayam, sawi hijau, kangkung, serta kacang panjang dan angkutan udara menjadi penyumbang deflasi dalam jangka pendek, menunjukkan adanya dinamika harga musiman dan kebijakan pengendalian tarif yang cukup efektif.

Selain itu jika melihat NTP dan NTN, dapat disampaikan bahwa program MBG sangat berpengaruh terhadap kedua indikator tersebut, yang mana NTP pada akhir 2024 adalah sebesar 115,43 dan di awal 2025 mengalami kenaikan positif dengan nilai 120,69 di akhir Maret 2025. Hal tersebut dapat dikatakan menunjukkan dampak positif adanya program MBG. Sementara NTN pada triwulan I 2025 masih di bawah nilai ideal (di bawah 100) yang menunjukkan penurunan jika dibanding periode yang sama di tahun

2024. Hal tersebut dapat mempengaruhi pasokan bahan baku program MBG yang bersumber dari laut.

Isu yang muncul dalam Program MBG di Kalimantan Selatan

Pada pelaksanaan program MBG terdapat isu-isu yang menjadi tantangan dan perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait. Isu dalam implementasi program MBG yaitu:

1. Masih dibutuhkan kurang lebih 304 SPPG/Dapur tambahan di Kalsel apabila 1 SPPG harus menyalurkan MBG kepada 3.000 penerima;
2. Kapasitas dan Infrastruktur Dapur Pemenuhan Gizi meliputi:
 - a. Keterbatasan sarana dan prasarana dapur pemenuhan Gizi
 - b. Keterbatasan SDM pada SPPG dan dapur
 - c. Keterbatasan kendaraan dan logistic pengiriman untuk distribusi makanan ke lokasi pemberian MBG
3. Sistem pembayaran menggunakan metode reimburse meliputi:
 - a. Biaya operasional ditalangi terlebih dahulu oleh Yayasan
 - b. Terdapat beberapa kasus keterlambatan pembayaran oleh Yayasan kepada supplier
 - c. Dapat menjadi barrier bagi UMKM untuk menjadi mitra karena keterbatasan modal
4. beberapa bahan makanan seperti buah dan sayur untuk kebutuhan MBG harus didatangkan dari luar daerah, karena keterbatasan persediaan bahan local
5. Keterlibatan berbagai instansi dalam pelaksanaan MBG masih memerlukan penguatan koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan untuk memastikan efektivitas distribusi serta pengawasan MBG
6. Beberapa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk mendukung Program MBG, namun juga terdapat pemerintah daerah yang tidak/belum mengalokasikan anggaran

7. Sisa makanan yang tidak dikonsumsi memerlukan pengelolaan sampah yang memadai
8. BUMDES/Koperasi/UMKM potensial menjadi mitra Program MBG, namun belum banyak yang siap.



Halaman ini sengaja dikosongkan.

BAB 03

Analisis Tematik



"Cooperatives are not just economic institutions—they are engines of inclusion, resilience, and shared prosperity. When communities own their future, sustainable growth becomes a collective achievement."

Pengembangan koperasi di Kalimantan Selatan menunjukkan potensi besar sebagai penggerak ekonomi lokal, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan industri rumah tangga. Meski jumlah koperasi, tenaga kerja, dan aset meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tantangan seperti rendahnya literasi digital, lemahnya tata kelola, dan tekanan eksternal dari *fintech* masih menghambat kinerja koperasi. Pemerintah daerah terus mendorong transformasi koperasi melalui pelatihan, digitalisasi, penguatan tata kelola, serta akses pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk APBN dan LPDB. Dengan strategi penguatan SDM, modernisasi layanan, dan kemitraan strategis, koperasi diharapkan menjadi entitas ekonomi yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

BAB 03 ANALISIS TEMATIK: ANALISIS ATAS PERAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

3.1. Pendahuluan

Pengembangan koperasi dapat dianggap sebagai sarana yang efektif bagi anggotanya untuk saling bekerja sama dalam rangka mengoptimalkan potensi dan memanfaatkan peluang usaha yang muncul. Dalam konteks ini, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah kerja sama, tetapi juga sebagai strategi untuk membuka akses ke pasar, modal, informasi, dan teknologi. Mengacu pada penjelasan dari Siregar (2020), pengembangan koperasi memungkinkan anggotanya untuk bekerja sama secara efisien. Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada level internal koperasi, tetapi juga mencakup kerja sama eksternal dengan pihak lain seperti pasar, pemodal, dan sumber informasi serta teknologi. Melalui koperasi, anggota dapat saling mendukung dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai keberhasilan bersama.

Pentingnya koperasi sebagai wahana pengembangan terlihat dalam upaya untuk membuka akses ke pasar. Koperasi memungkinkan anggotanya untuk bersama-sama mengakses peluang pasar yang mungkin sulit dicapai secara individu. Selain itu, koperasi juga dapat menjadi sumber modal bagi anggotanya, memberikan dukungan finansial yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha masing-masing anggota. Menariknya, koperasi bukan hanya tentang kerja sama ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Sri Zuhartati (2020), kata "koperasi" berasal dari *coo* yang berarti bersama dan *operation* yang berarti bekerja. Leksikologis, koperasi diartikan sebagai kumpulan kerja sama yang melibatkan orang-orang dan badan hukum koperasi. Prinsip koperasi dijadikan dasar kegiatan, dan koperasi dianggap sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi, secara keseluruhan,

pengembangan koperasi bukan hanya tentang mengoptimalkan potensi ekonomi, tetapi juga mencakup aspek kebersamaan, kekeluargaan, dan dukungan kolektif untuk mencapai keberhasilan bersama dalam menghadapi tantangan dan peluang usaha. Kata "koperasi" berasal dari gabungan kata "co" yang artinya "bersama" dan "operation" yang berarti "bekerja sama." Dalam konteks interpretasi kedua kata tersebut, definisi koperasi dapat dijelaskan sebagai suatu perkumpulan orang atau badan yang memberikan kebebasan bagi individu atau entitas untuk bergabung (masuk) dan meninggalkan (keluar) sebagai anggota. Tujuan utama dari koperasi adalah bekerja sama secara kekeluargaan. Koperasi diarahkan untuk menjalankan usaha dengan maksud memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan kata lain, koperasi adalah entitas yang didirikan untuk memberikan kesempatan kepada individu atau badan untuk bersatu, berkolaborasi, dan berusaha secara bersama-sama demi meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kerja sama yang berbasis kekeluargaan.

Meskipun kegiatan ekonomi koperasi sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, perkembangannya tidak memuaskan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong perkembangan koperasi, termasuk memberikan kemudahan administratif, koperasi masih mengalami tantangan dan tidak berkembang sesuai harapan. Kegiatan ekonomi koperasi diarahkan untuk menciptakan hubungan kerja sama dan kebersamaan, yang sesuai dengan nilai-nilai dan kepribadian masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip koperasi, seperti gotong-royong dan kekeluargaan, seharusnya sejalan dengan nilai-nilai budaya bangsa.

Dalam era digital, koperasi dihadapkan pada tuntutan untuk beradaptasi dan bertransformasi agar dapat bertahan dalam lingkungan yang senantiasa dinamis. Untuk memulai proses transformasi ini, langkah awal yang krusial adalah membangun

karakter kreatif dan inovatif bagi insan yang menjadi penggerak koperasi.

Dari sumber yang ditemukan, terdapat informasi terkait dengan pentingnya pemahaman tentang koperasi, dimana koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Selain itu, terdapat juga informasi terkait dengan peran pemerintah dalam mengembangkan koperasi, khususnya dalam hal digitalisasi dan inovasi kebijakan publik di era globalisasi. Meskipun sumber yang ditemukan tidak secara langsung membahas tentang implementasi jati diri koperasi, namun informasi tersebut memberikan konteks penting terkait dengan pengembangan koperasi di Indonesia.

3.2. Pembahasan

3.1.1. Perkembangan Kondisi Koperasi di Kalimantan Selatan Periode 2021-2023

Jumlah Koperasi

1. Jumlah koperasi di Kalimantan Selatan

Uraian	2021	2022	2023
Jumlah Koperasi (unit)	2.885	2942	3015
Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT (unit)	756	737	706
Pertumbuhan (unit)	68	57	73
Aktif (unit)	1.875	1906	1932
Tidak Aktif (unit)	1.010	1036	1083
Persentase Koperasi Aktif (%)	64,99	64,79	64,08

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel (Diolah)

Perkembangan koperasi Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kenaikan dan pertumbuhan tiap tahun dari 2.885 di tahun 2021 menjadi 3015 di tahun 2023. Namun tidak sampai 100% koperasi aktif, hanya kisaran 64% yang aktif. Sementara itu jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) mengalami penurunan dari 756 di tahun 2021 menjadi 706 di tahun 2023.

2. Analisis data Statistik dan Kondisi Koperasi di Kalimantan Selatan

- a) Jumlah koperasi aktif dan tidak aktif
Data dari Kementerian Koperasi dan UKM biasanya menunjukkan bahwa sebagian kecil dari koperasi di Kalsel masih aktif, sementara banyak yang mengalami matinya kegiatan atau tidak aktif lagi.
 - b) Jenis koperasi yang paling banyak tidak aktif
Koperasi simpan pinjam dan koperasi konsumsi cenderung lebih rentan tidak aktif jika tidak dikelola dengan baik.
 - c) Perkembangan ekonomi daerah Kalimantan Selatan yang bergantung pada sektor pertambangan dan perkebunan, menunjukkan bahwa faktor ekonomi makro berpengaruh terhadap keberlangsungan koperasi.
3. Faktor Penyebab Koperasi Tidak Aktif
- a) Masalah Internal
 - 1) Pengelolaan yang tidak profesional
Kurangnya kompetensi pengurus dalam mengelola koperasi secara efektif.
 - 2) Kurangnya visi dan strategi pengembangan
Tanpa perencanaan jangka panjang, koperasi sulit berkembang dan bertahan.
 - 3) Konflik internal
Perselisihan antar anggota dapat merusak harmonisasi dan keberlangsungan koperasi.
 - b) Faktor Eksternal
 - 1) Kurangnya pelatihan dan pendampingan
Pemerintah dan lembaga terkait kurang memberikan pelatihan manajemen koperasi dan pendampingan langsung.
 - 2) Persaingan dari usaha besar dan modern
Kehadiran usaha modern dan lembaga perbankan konvensional yang menawarkan layanan lebih aman dan fleksibel.

3) Kebijakan yang kurang mendukung Regulasi dan kebijakan daerah yang tidak memfasilitasi pengembangan koperasi secara optimal.

c) Faktor Sosial dan Budaya

- 1) Kurangnya kesadaran anggota: Banyak anggota yang tidak aktif dan tidak peduli terhadap pengelolaan koperasi.
- 2) Perubahan pola pikir: Masyarakat lebih memilih usaha individu ketimbang koperasi sebagai lembaga ekonomi kolektif.

4. Potensi dan peluang

Meskipun banyak koperasi tidak aktif, ada peluang besar untuk revitalisasi, asalkan:

- a) Dukungan pemerintah dan lembaga keuangan: Memberikan pelatihan, pendampingan, serta akses modal.
- b) Penguatan peran koperasi sebagai lembaga ekonomi kolektif. Melalui sosialisasi manfaat koperasi yang sesuai kebutuhan masyarakat.
- c) Teknologi digital: Memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan koperasi.

5. Saran Solusi

- a) Revitalisasi koperasi melalui pelatihan manajemen dan kewirausahaan.
- b) Penguatan kelembagaan dan transparansi pengelolaan.
- c) Meningkatkan partisipasi anggota dan mengurangi konflik internal.
- d) Fasilitasi akses permodalan dan pemasaran.
- e) Melibatkan pemerintah daerah secara aktif dalam program pembinaan koperasi

Jumlah Anggota Koperasi

Jumlah anggota koperasi di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan dari 191.984 di tahun 2021 menjadi 163.390 di tahun 2023.

Grafik 3.1 Perkembangan Jumlah Koperasi di Kalimantan Selatan



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel (Diolah)

Analisis penyebab berkurangnya jumlah anggota koperasi di Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari masalah internal koperasi hingga perubahan eksternal di bidang ekonomi, sosial, dan teknologi. Berikut analisis berdasarkan:

1. Faktor Internal Koperasi

- a) Manajemen yang Tidak Profesional
 - 1) Minimnya Transparansi
Banyak koperasi di Kalsel masih dikelola secara tradisional, dengan laporan keuangan yang tidak jelas, sehingga mengurangi kepercayaan anggota.
 - 2) Kurangnya Inovasi
Koperasi yang hanya mengandalkan simpan-pinjam tanpa diversifikasi layanan (seperti pelatihan usaha atau pemasaran produk) menjadi kurang menarik.
 - 3) Kinerja Pengurus yang Lemah
Jika pengurus tidak aktif mengembangkan koperasi, anggota merasa tidak mendapat manfaat dan memilih keluar.
- b) Masalah Keuangan dan Pembagian SHU
 - 1) Dividen (SHU) yang Kecil
Jika hasil bagi usaha (SHU) tidak signifikan, anggota merasa tidak ada insentif untuk tetap bergabung.
 - 2) Kredit Macet
Tingginya pinjaman yang tidak dibayar (NPL) membuat koperasi kesulitan memberikan pelayanan optimal.



- c) Pelayanan yang Tidak Prima
Proses administrasi berbelit-belit, syarat pinjaman terlalu ketat, atau waktu pelayanan lambat membuat anggota beralih ke *fintech* atau bank.

2. Faktor Eksternal

- a) Persaingan dengan Lembaga Keuangan Lain

1) Bank dan *Fintech*

Maraknya bank digital (seperti Jenius, BCA Digital) dan *fintech lending* (Kredivo, Akulaku) menawarkan kemudahan akses pinjaman tanpa syarat rumit.

2) Pinjaman Online (Illegal maupun Legal)

Meski berisiko, pinjol cepat cair menarik minat masyarakat yang butuh dana instan.

- b) Perubahan Perilaku Masyarakat

1) Generasi Muda Lebih Suka Praktis

Anak muda lebih memilih *e-wallet* (OVO, Dana) atau investasi digital (Reksadana *online*) daripada koperasi.

2) Urbanisasi

Banyak warga Kalsel, terutama generasi produktif, pindah ke kota besar (Banjarmasin, Balikpapan, atau luar pulau) sehingga keanggotaan koperasi di daerah asal menurun.

- c) Dampak Ekonomi Makro

1) Inflasi dan Daya Beli Menurun

Jika ekonomi lesu, masyarakat kesulitan menyetor simpanan wajib di koperasi dan memilih mengundurkan diri.

2) Krisis Sektor Unggulan (Perkebunan & Pertambangan)

Banyak koperasi di Kalsel berbasis sektor perkebunan (karet, kelapa sawit) dan tambang batubara. Jika harga komoditas turun, pendapatan anggota berkurang, dan mereka tidak mampu berpartisipasi aktif.

3. Faktor Regulasi dan Kebijakan

- a) Peraturan yang Tidak Mendukung Birokrasi pendirian atau pengelolaan koperasi yang rumit menghambat perkembangan koperasi.

- b) Kurangnya Pembinaan dari Pemerintah
Dinas Koperasi setempat mungkin kurang aktif dalam pendampingan dan pelatihan pengurus koperasi.

- c) Program Pemerintah yang Tidak Tepat Sasaran
Bantuan modal tanpa pelatihan manajemen menyebabkan koperasi tidak berkembang.

4. Faktor Teknologi dan Digitalisasi

- a) Koperasi Tertinggal dalam Transformasi Digital
Mayoritas koperasi di Kalsel masih manual, sementara kompetitor sudah menggunakan aplikasi simpan-pinjam *online*.

- b) Minimnya Promosi Digital
Koperasi jarang memanfaatkan media sosial atau *platform* digital untuk menarik anggota baru.

Dampak dari Penurunan Anggota Koperasi

- a) Menurunnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Daerah
Koperasi seharusnya menjadi sokongan UMKM, tetapi jika anggota berkurang, dampaknya terhadap perekonomian lokal melemah.

- b) Berkurangnya Akses Modal bagi Masyarakat Kecil
Masyarakat pedesaan yang bergantung pada koperasi akan kesulitan mendapatkan pinjaman jika koperasi tutup.

- c) Meningkatnya Ketergantungan pada Rentenir atau Pinjol Illegal
Jika koperasi tidak bisa memenuhi kebutuhan keuangan, masyarakat beralih ke pinjaman ilegal yang berbunga tinggi.

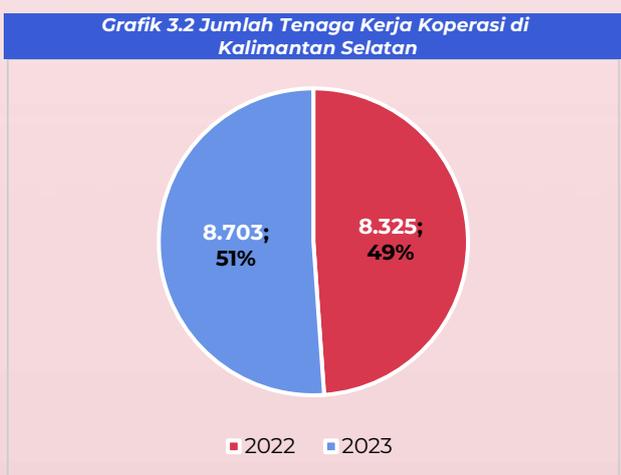
Rekomendasi Solusi

- a) Modernisasi Manajemen Koperasi
Pelatihan pengurus, penggunaan *software* akuntansi, dan transparansi laporan keuangan.

- b) Diversifikasi Layanan
Koperasi harus berkembang ke layanan digital, agroindustri, atau pemasaran produk anggota.
- c) Peningkatan Peran Pemerintah
Dinas Koperasi perlu lebih aktif membina koperasi, termasuk bantuan teknologi dan akses permodalan.
- d) Sosialisasi dan Edukasi
Kampanye manfaat koperasi kepada generasi muda melalui media sosial dan sekolah/kampus.
- e) Kolaborasi dengan Fintech atau Bank
Koperasi bisa bekerja sama dengan platform digital untuk memperluas layanan.
Penurunan anggota koperasi di Kalsel disebabkan oleh kombinasi faktor internal (manajemen buruk, pelayanan tidak memadai) dan eksternal (persaingan *fintech*, perubahan perilaku konsumen, ekonomi makro). Solusinya membutuhkan revitalisasi koperasi melalui digitalisasi, peningkatan transparansi, dan dukungan pemerintah yang lebih kuat

Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan jumlah tenaga kerja koperasi di Kalimantan Selatan menunjukkan peningkatan di tahun 2023, sebagaimana grafik berikut:



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel (Diolah)

Tenaga kerja meliputi manager di tahun 2021 sebanyak 166 orang mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 133 orang. Sedangkan jumlah karyawan di tahun 2021

sebanyak 2.373 orang meningkat di tahun 2023 sebanyak 2.772 orang.

Analisis faktor penyebab kenaikan tenaga kerja koperasi di Kalimantan Selatan antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi dan Bisnis
 - a) Pertumbuhan Sektor Unggulan
Kalsel mengandalkan sektor pertambangan (batubara), perkebunan (kelapa sawit, karet), dan perikanan. Koperasi yang bergerak di sektor ini cenderung membutuhkan lebih banyak tenaga kerja saat produksi meningkat.
 - b) Permintaan Pasar Lokal
Kenaikan permintaan produk koperasi (seperti hasil pertanian, UMKM, atau simpan pinjam) mendorong rekrutmen SDM.
 - c) Investasi dan Modal
Bantuan modal dari pemerintah atau swasta (misalnya melalui KUR Mikro/Koperasi) memungkinkan koperasi merekrut lebih banyak karyawan.
2. Kebijakan Pemerintah Daerah (Program Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan)
 - a) Pelatihan dan pendampingan koperasi (contoh: program "Koperasi Mandiri Berdaya Saing").
 - b) Bantuan hibah atau peralatan untuk koperasi produktif (misalnya koperasi pertanian atau nelayan).
 - c) Insentif Perizinan
Kemudahan pendirian koperasi baru atau perluasan usaha mendorong penyerapan tenaga kerja.
 - d) Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi
Misalnya, program "Kampus Merdeka" atau magang mahasiswa di koperasi.
3. Faktor Sosial dan Demografi
 - a) Urbanisasi dan Migrasi
Perpindahan penduduk ke kota seperti Banjarmasin dan Banjarbaru meningkatkan kebutuhan koperasi jasa dan konsumsi.
 - b) Peran Generasi Muda

Minat pemuda Kalsel untuk berkoperasi (misalnya melalui koperasi digital atau *startup* berbasis komunitas) dapat meningkatkan regenerasi tenaga kerja.

- c) Kearifan Lokal
Tradisi gotong-royong (seperti "handep" dalam budaya Dayak-Maanyan) mendorong partisipasi anggota koperasi.

4. Infrastruktur dan Teknologi

- a) Akses Transportasi
Pembangunan jalan dan pelabuhan (seperti Tanjung Api-Api) memudahkan distribusi produk koperasi, sehingga membutuhkan lebih banyak pekerja.
- b) Digitalisasi Koperasi
Adopsi aplikasi koperasi (misalnya Koperasi Syariah Digital) memunculkan kebutuhan tenaga IT atau pemasaran *online*.

Adapun tantangan yang Memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja yang perlu diantisipasi sebagai berikut:

- a) Ketergantungan pada Sektor Tradisional
Banyak koperasi di Kalsel bergerak di sektor konvensional (pertanian, simpan pinjam) yang kurang menarik bagi tenaga kerja muda.
- b) Keterbatasan Skill
Kurangnya pelatihan SDM di daerah terpencil menghambat produktivitas koperasi.
- c) Persaingan dengan Perusahaan Besar
Misalnya, koperasi kelapa sawit harus bersaing dengan perkebunan swasta yang menawarkan gaji lebih tinggi.

Rekomendasi untuk meningkatkan tenaga kerja Koperasi di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

- a) Pelatihan Khusus
Program "*Koperasi Go Digital*" untuk meningkatkan kompetensi SDM.
- b) Sinergi dengan Sektor Unggulan
Koperasi bisa fokus pada hilirisasi batubara atau produk pertanian bernilai tambah.
- c) Dukungan Pemda

Memperbanyak bantuan modal dan pendampingan bagi koperasi di daerah tertinggal (misalnya di Kabupaten Hulu Sungai).

- d) Promosi Keanggotaan
Sosialisasi manfaat koperasi kepada generasi muda melalui media sosial atau event seperti "Koperasi Millennial Kalsel".

Aset Koperasi

Kondisi aset koperasi di Kalimantan Selatan, sebagai berikut:

Grafik 3.3 Perkembangan Aset Koperasi di Kalimantan Selatan (Miliar Rp)



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel (Diolah)

Kenaikan aset koperasi di Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, kebijakan, sosial, dan operasional. Berikut analisis mendalam faktor-faktor tersebut:

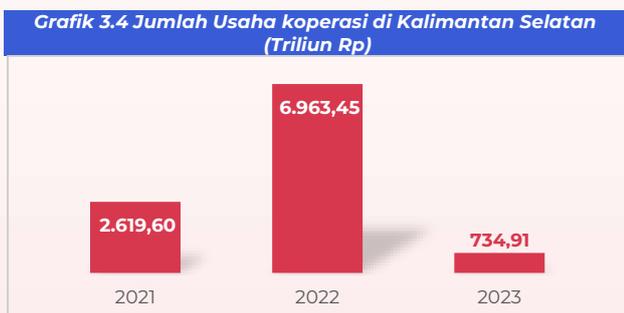
1. Faktor Ekonomi dan Bisnis
 - a) Pertumbuhan Usaha Koperasi
 - 1) Koperasi yang bergerak di sektor unggulan Kalsel (seperti pertambangan batubara, kelapa sawit, karet, dan perikanan) mengalami peningkatan nilai aset seiring dengan kenaikan harga komoditas dan permintaan pasar.
 - 2) Koperasi simpan pinjam atau BPR Syariah berkembang karena tingginya kebutuhan pembiayaan UMKM.
 - b) Peningkatan Omzet dan Laba
Semakin besar keuntungan koperasi, semakin banyak dana yang bisa diinvestasikan dalam bentuk aset (gedung, alat produksi, dana cadangan).

- c) Investasi Anggota
 Kontribusi simpanan pokok dan sukarela dari anggota koperasi menambah likuiditas yang bisa dikonversi menjadi aset.
2. Kebijakan Pemerintah dan Dukungan Institusi
 - a) Bantuan Modal dari Pemda Kalsel
 Program hibah atau pinjaman lunak dari Dinas Koperasi dan UMKM Kalsel untuk pengembangan usaha koperasi.
 Contoh: Bantuan peralatan untuk koperasi pertanian atau nelayan.
 - b) Insentif Perpajakan
 Keringanan pajak untuk koperasi yang memenuhi syarat UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian.
 - c) Program Nasional
 Seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk Koperasi atau pendanaan dari Kementerian Koperasi dan UKM.
3. Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Koperasi
 - a) Manajemen yang Profesional
 - 1) Pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel meningkatkan kepercayaan anggota dan investor.
 - 2) Koperasi dengan sistem syariah (seperti KSPPS) menarik lebih banyak anggota karena prinsip bagi hasil yang adil.
 - b) Diversifikasi Usaha
 Koperasi yang tidak hanya mengandalkan satu sektor (misalnya punya unit usaha simpan pinjam dan toko sembako) lebih stabil asetnya.
 - c) Cadangan dan SHU (Sisa Hasil Usaha)
 Alokasi SHU untuk cadangan koperasi memperkuat modal dan aset.
4. Faktor Sosial dan Partisipasi Anggota
 - a) Loyalitas Anggota
 Semakin banyak anggota aktif menyimpan dana di koperasi, semakin besar likuiditas untuk pembelian aset.
 Contoh: Koperasi Simpan Pinjam di Banjarmasin berkembang pesat karena kepercayaan masyarakat.
 - b) Gotong Royong
 Tradisi masyarakat Kalsel (seperti "baayun maayun" dalam budaya Banjar) mendorong partisipasi anggota dalam mengembangkan koperasi.
5. Teknologi dan Inovasi
 - a) Digitalisasi Koperasi
 Penggunaan aplikasi koperasi digital (misalnya sistem *online* simpan pinjam) meningkatkan efisiensi dan perluasan pasar.
 Contoh: Koperasi di Banjarbaru yang mengadopsi *e-commerce* untuk penjualan produk UMKM.
 - b) *Fintech* dan Kemitraan
 Kolaborasi dengan *platform* pembayaran digital (seperti LinkAja atau Dana) memperluas akses permodalan.
6. Tantangan yang Menghambat Pertumbuhan Aset
 - a) Ketergantungan pada Sektor Tradisional
 Koperasi pertanian rentan terhadap fluktuasi harga komoditas.
 - b) Keterbatasan Akses Permodalan
 Koperasi kecil di daerah terpencil (misalnya Kabupaten Balangan) kesulitan mendapatkan pendanaan.
 - c) Persaingan dengan Bank dan *Fintech*
 Koperasi simpan pinjam harus bersaing dengan layanan keuangan digital yang lebih cepat.
7. Rekomendasi untuk Meningkatkan Aset Koperasi di Kalsel
 - a) Peningkatan Akses Modal
 - 1) Memperbanyak kerja sama dengan perbankan syariah atau investor lokal.
 - 2) Memanfaatkan KUR Koperasi dengan bunga rendah.
 - b) Pelatihan Manajemen Keuangan
 Sosialisasi standar akuntansi koperasi (SAK) oleh Dinas Koperasi Kalsel.

- c) Diversifikasi Usaha:
Koperasi pertanian bisa mengembangkan agrowisata atau produk olahan (misalnya, sarang burung walet di Hulu Sungai).
- d) Pemanfaatan Teknologi:
Mengadopsi sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*) untuk manajemen aset lebih efisien.

Jumlah Usaha Koperasi

Jumlah usaha koperasi di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel (Diolah)

Pertumbuhan jumlah koperasi di Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, sosial budaya, dan perkembangan sektor unggulan daerah. Berikut penjelasan rinci penyebabnya:

1. Dukungan Kebijakan Pemerintah
 - a) Program Pemprov Kalsel & Kemenkop UKM:
Insentif perizinan mudah dan bantuan modal (hibah/KUR) untuk pendirian koperasi baru.
Contoh: Program "Koperasi Mandiri Berdaya Saing" oleh Dinas Koperasi Kalsel.
 - b) Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Mahasiswa didorong membentuk koperasi kampus (misalnya di Universitas Lambung Mangkurat).
 - c) Desentralisasi Kewenangan Otonomi daerah memudahkan pembentukan koperasi berbasis lokal.
2. Pertumbuhan Sektor Ekonomi Strategis
 - a) Koperasi Berbasis Komoditas Unggulan:

- Koperasi sawit, batubara, dan perikanan bermunculan seiring berkembangnya sektor ini di Kalsel. Contoh: Koperasi tambang batubara skala kecil di Kabupaten Tanah Bumbu.
 - b) Kebutuhan UMKM
 - c) Koperasi simpan pinjam (KSP) dan koperasi produsen tumbuh untuk mendukung usaha mikro.
3. Kesadaran Masyarakat & Peran Generasi Muda
 - a) Edukasi Kewirausahaan Koperasi Sosialisasi oleh Pemda dan NGO tentang manfaat koperasi meningkatkan minat pendirian baru.
 - b) Koperasi Generasi Muda Munculnya koperasi digital (misalnya koperasi jasa *digital marketing* di Banjarmasin).
 - c) Budaya Gotong Royong Tradisi "handep" (saling membantu) masyarakat Dayak-Banjar mendorong pembentukan koperasi.
 4. Akses Permodalan & Teknologi
 - a) Kemudahan Pendanaan Bantuan permodalan melalui KUR Koperasi dan bank syariah (misalnya BNI Syariah).
 - b) Digitalisasi Koperasi Aplikasi seperti Sikopay (Sistem Keuangan Koperasi) mempermudah pendirian koperasi virtual.
 5. Tantangan & Hambatan
 - a) Kualitas SDM Kurangnya pelatihan manajemen untuk pengurus koperasi baru.
 - b) Persaingan dengan Lembaga Keuangan Lain *Fintech* dan bank digital mengurangi minat bergabung dengan koperasi tradisional.
 - c) Ketergantungan pada Sektor Primer Koperasi pertanian/ pertambangan rentan fluktuasi harga.
 6. Rekomendasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan
 - a) Perkuat Pendidikan Koperasi

Workshop pengelolaan koperasi modern bagi pemuda.

- b) Sinergi dengan Sektor Digital
Koperasi bisa mengintegrasikan layanan *e-commerce*.
- c) Dukungan Pemda
Memperluas bantuan modal ke daerah rural (misalnya Kabupaten Hulu Sungai).

3.1.2. Dukungan Pemerintah Untuk Pengembangan Koperasi

Kebijakan Pemerintah Terkait Pengembangan Koperasi

Pemerintah memiliki berbagai kebijakan untuk mendorong pengembangan koperasi, termasuk regulasi, pembinaan, dan kemudahan dalam berusaha. Beberapa kebijakan utama meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pemberian bimbingan, dan perlindungan terhadap koperasi. Selain itu, pemerintah juga mendorong pembentukan kemitraan strategis antara koperasi dan badan usaha lainnya, serta mendorong budaya koperasi dalam masyarakat.

1. Regulasi
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan koperasi di Indonesia. Pemerintah juga terus menerbitkan peraturan pelaksana untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan koperasi.
2. Pembinaan dan Perlindungan
Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi melalui berbagai program dan kegiatan. Ini termasuk pembinaan SDM, akses pembiayaan, dan dukungan untuk ekspansi pasar.
3. Kemitraan Strategis
Pemerintah mendorong koperasi untuk menjalin kemitraan strategis dengan badan usaha lain untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar.
4. Pembudayaan Koperasi
Pemerintah juga melakukan upaya untuk membudayakan koperasi dalam

masyarakat, misalnya melalui penyuluhan dan pendidikan tentang pentingnya koperasi.

5. Akses Pasar dan Digitalisasi
Pemerintah mendorong akses pasar dan ekspansi digital bagi koperasi, termasuk melalui platform *e-commerce* dan pengembangan sistem informasi koperasi.
6. Peningkatan Kapasitas SDM
Pemerintah juga fokus pada peningkatan kapasitas SDM koperasi, termasuk melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan.
7. Pembiayaan
Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan akses koperasi terhadap pembiayaan, baik melalui pinjaman dari bank maupun dari sumber dana lainnya.
8. Koordinasi Lintas Sektor
Pemerintah melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan bahwa kebijakan pengembangan koperasi berjalan efektif dan terintegrasi.
9. Penguatan Tata Kelola
Pemerintah juga mendorong penguatan tata kelola koperasi, termasuk melalui peningkatan profesionalisme manajemen dan transparansi pengelolaan keuangan.

Perkembangan Dukungan Belanja Kementerian/Lembaga untuk Pengembangan Koperasi

Dukungan belanja Kementerian/Lembaga untuk pengembangan koperasi sebagai berikut:

Grafik 3.5 Dukungan APBN Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, Dan Koperasi (Juta Rp)



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel (Diolah)

1. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Pusat

a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dan Dana Dekonsentrasi
 Pada tahun 2024, Kementerian Koperasi dan UKM RI menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 17 Tahun 2024 yang mengatur pelaksanaan pelatihan, pendampingan usaha mikro kecil, koperasi, layanan bantuan hukum, serta inkubasi melalui DAK Nonfisik dan Dana Dekonsentrasi. Kebijakan ini menjadi dasar bagi provinsi, termasuk Kalimantan Selatan, dalam menyelenggarakan berbagai program pengembangan koperasi dan UMKM. (Diskominfo Kalsel Prov)

b) Target Nasional Koperasi Modern
 Pemerintah Pusat menargetkan pembentukan 500 koperasi modern secara nasional. Koperasi modern didefinisikan sebagai koperasi yang menerapkan tata kelola yang baik (*good cooperative governance*), memiliki daya saing, dan adaptif terhadap perubahan. Kriteria koperasi modern meliputi pilar kelembagaan, usaha, dan keuangan. (Kalimantan Selatan, Diskominfo Kalsel Prov)

2. Implementasi di Kalimantan Selatan

a) Pengembangan Koperasi Modern
 Hingga Januari 2024, Kalimantan Selatan memiliki 3.014 koperasi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 180 koperasi merupakan binaan provinsi, dengan 144 aktif dan 36 tidak aktif. Pada tahun 2022 dan 2023, Kalsel menyumbang masing-masing dua koperasi modern, dan pada 2024 direncanakan delapan calon koperasi modern yang akan diverifikasi dan disahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. (Kalimantan Selatan, Diskominfo Kalsel Prov)

b) Pendampingan dan Sertifikasi SDM
 Pada Mei 2024, Pemprov Kalsel menggelar pelatihan dan sertifikasi bagi 60 tenaga pendamping koperasi dan usaha mikro kecil. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, memberikan bimbingan, konsultasi, serta menyusun rencana kerja pendampingan pasca pelatihan. Program ini mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 17 Tahun 2024. (Diskominfo Kalsel Prov)

c) Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen
 Pada Juli 2024, Dinas Koperasi dan UKM Kalsel menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula serta pelatihan manajemen usaha dan keuangan bagi usaha mikro dan kecil. Pelatihan ini diikuti oleh 60 pelaku UMKM dan bertujuan meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha, memahami laporan keuangan, serta menanamkan jiwa wirausaha. (Diskominfo Kalsel Prov)

Perkembangan Dukungan Belanja TKD

Dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana dalam grafik berikut:



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel (Diolah)

Salah satu bentuk dukungan tersebut tercermin melalui alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dalam Transfer ke Daerah (TKD) yang diarahkan untuk program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (PK2UMK).

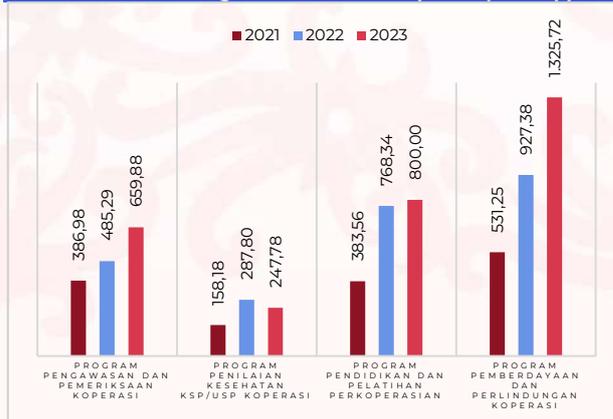
Pada tahun 2021, alokasi DAK Non Fisik untuk program PK2UMK tercatat sebesar Rp2.352.051.800. Angka ini mengalami peningkatan tipis pada tahun 2022 menjadi Rp2.419.964.000, mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan dukungan terhadap sektor koperasi dan UMK. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana alokasi dana melonjak menjadi Rp3.800.138.000. Kenaikan ini menunjukkan adanya intensifikasi kebijakan dan perhatian yang lebih besar terhadap pemberdayaan koperasi dan pelaku UMK dalam menghadapi tantangan ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Peningkatan alokasi dana ini tidak hanya merepresentasikan dukungan fiskal, tetapi juga menjadi indikator adanya perluasan cakupan program, peningkatan kualitas pelatihan dan pendampingan, serta penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UMK di berbagai daerah. Dengan adanya tren positif ini, diharapkan koperasi dan UMK semakin mampu beradaptasi terhadap perubahan, meningkatkan daya saing, serta berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Perkembangan Dukungan Belanja APBD

Pemerintah daerah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran koperasi melalui peningkatan anggaran belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana dalam grafik berikut:

Grafik 3.7 Dukungan APBD untuk Koperasi (Juta Rp)



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel (Diolah)

Berbagai program strategis yang berfokus pada pengawasan, penilaian kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan koperasi mengalami tren peningkatan alokasi anggaran selama periode 2021 hingga 2023.

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Alokasi dana untuk program ini meningkat secara konsisten dari Rp386.979.800 pada tahun 2021 menjadi Rp485.292.500 di tahun 2022, dan mencapai Rp659.875.800 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat fungsi pengawasan agar koperasi tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang sehat dan akuntabel.

2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Pada tahun 2021, program ini mendapat alokasi sebesar Rp158.178.300, lalu meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp287.799.300. Namun, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 dengan alokasi sebesar Rp247.777.000. Fluktuasi ini bisa mencerminkan evaluasi efektivitas pelaksanaan program atau penyesuaian prioritas anggaran, meskipun secara keseluruhan tetap lebih tinggi dibanding tahun awal.

3. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

Program ini mengalami peningkatan cukup signifikan, dari Rp383.557.300 pada tahun 2021 menjadi Rp768.339.800 di

tahun 2022, dan terus meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp800.000.000. Kenaikan anggaran ini menunjukkan peningkatan perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia koperasi melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan literasi perkoperasian.

4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Ini merupakan salah satu program dengan alokasi tertinggi, yang meningkat dari Rp531.250.000 pada tahun 2021 menjadi Rp927.378.300 di tahun 2022, dan mencapai Rp1.325.715.100 pada tahun 2023. Peningkatan ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan koperasi sebagai entitas ekonomi rakyat.

Dukungan Pemerintah Lainnya (Dukungan Pembiayaan)

LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas mengelola dana bergulir untuk mendukung pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). LPDB berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

1. Fungsi & Tugas LPDB

- a) Penyaluran Dana Bergulir
Memberikan pinjaman/pembiayaan kepada koperasi dan UMKM dengan syarat lebih mudah dibanding bank umum. Contoh: Modal kerja, pembelian alat produksi, atau pengembangan usaha.
- b) Pendampingan & Pelatihan
Memberikan pelatihan manajemen keuangan, pemasaran, dan teknis produksi kepada penerima dana.
- c) Pengelolaan Dana Pemerintah
Mengelola dana hibah atau stimulan dari APBN/APBD yang dialokasikan untuk UMKM dan koperasi.

2. Sumber Dana LPDB

- a) Anggaran pemerintah (APBN/APBD).
- b) Hasil pengembalian pinjaman dari koperasi/UMKM sebelumnya (sistem bergulir).

c) Kerja sama dengan lembaga keuangan lain.

3. Keunggulan LPDB

- a) Bunga lebih rendah dibanding pinjaman bank.
- b) Prioritas untuk usaha produktif dan koperasi yang dikelola kelompok rentan.
- c) Tidak memerlukan agunan ketat seperti lembaga keuangan komersial.

4. Contoh Program LPDB

- a) Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama perbankan.
- b) Dana Bergulir Spesifik untuk sektor tertentu (e.g., pertanian, kelautan). LPDB berbeda dengan LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UKM) yang lebih baru dan fokus pada penguatan ekosistem koperasi.

5. Penerima Dana Bergulir

Koperasi penerima dana bergulir tersebar di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Koperasi-koperasi ini bergerak di berbagai sektor, antara lain simpan pinjam, syariah, konsumsi, produsen, serta koperasi pegawai. Tak hanya koperasi umum, namun juga mencakup koperasi yang berbasis institusi Selain itu, ada pula koperasi berbasis komunitas lokal.

Terdapat 23 koperasi dan 6 BPR/lembaga keuangan, sebagaimana berikut:

- a) Koperasi BMT Amanah
- b) Koperasi Sahabat Mandiri
- c) Koperasi GKPN-RI
- d) Koperasi Syariah Teladan
- e) Koperasi Makmur Mandiri
- f) KSU Makmur Bersama
- g) Koperasi Tani Suka Maju
- h) Kop Makmur Mandiri
- i) Koperasi Niaga Cipta Mandiri
- j) Kopsyah BMT Amanah
- k) KPRI Tri Civitas FKIP ULM
- l) KPN RI Warga Depdikbud
- m) KPN Guru-Guru Banjar Utara

- n) Kopkar Duta Banua
- o) Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru
- p) Koperasi Konsumen Pedami
- q) Koperasi Konsumen Kompak

Mayoritas koperasi dan lembaga keuangan terpusat di Kota Banjarmasin, menunjukkan aktivitas ekonomi koperasi yang tinggi di ibu kota provinsi. Tipe koperasi yang paling dominan adalah koperasi simpan pinjam (KSP/USP/BMT), yang menunjukkan tingginya kebutuhan akses keuangan mikro di daerah. Beberapa lembaga seperti Kalsel Ventura menunjukkan peran strategis dalam mendukung pembiayaan UMKM secara berulang melalui berbagai unit. Hadirnya koperasi guru dan pegawai menunjukkan peran koperasi sebagai penopang kesejahteraan ASN dan tenaga pendidikan.

3.1.3. Tantangan Dalam Pengembangan Koperasi di Daerah

- a. Rendahnya Literasi Digital Dan Keuangan Di Kalangan Anggota Koperasi
 - 1. Penyebab Rendahnya Literasi Digital
 - a) Keterbatasan Infrastruktur Teknologi dan Akses Internet
 Sebagian besar wilayah pedesaan di Kalimantan Selatan masih menghadapi keterbatasan dalam infrastruktur teknologi. Akses internet yang lambat, tidak stabil, bahkan belum tersedia, menjadi kendala utama dalam memperluas akses informasi digital. Kondisi ini berdampak langsung terhadap keterbatasan anggota koperasi dalam mengakses pelatihan daring, aplikasi koperasi, serta layanan keuangan digital.
 - b) Minimnya Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Digital
 Program edukasi literasi digital bagi anggota koperasi masih sangat terbatas, baik dari segi frekuensi maupun cakupan materi. Banyak pengurus koperasi belum pernah

mendapatkan pelatihan yang komprehensif tentang penggunaan aplikasi keuangan, *e-commerce*, ataupun sistem manajemen digital koperasi.

Selain itu, sebagian besar anggota koperasi memiliki latar belakang pendidikan formal yang rendah, sehingga memiliki keterbatasan dalam memahami konsep dasar teknologi dan keuangan modern. Modul pelatihan yang tersedia dari dinas terkait belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan lokal dan tingkat pemahaman peserta.

Namun demikian, terdapat upaya perbaikan yang mulai dijalankan. Misalnya, pada tanggal 20–23 Juni 2023, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan pelatihan digitalisasi koperasi dan pengendalian internal bagi pengurus dan pengawas koperasi se-Kalsel sebagai langkah awal meningkatkan kompetensi SDM koperasi.

- c) Ketimpangan Digital antara Daerah Perkotaan dan Pedesaan
 Terdapat kesenjangan signifikan dalam akses dan pemanfaatan teknologi digital antara koperasi yang berada di wilayah perkotaan dan pedesaan. Koperasi di kota cenderung memiliki akses lebih baik terhadap internet, perangkat digital, serta sumber pelatihan, dibandingkan dengan koperasi di desa-desa pelosok. Menurut Plt. Kepala BRIDA Provinsi Kalsel, mayoritas pelaku UMKM di Kalimantan Selatan baru berada pada level 2 hingga 3 dari skala literasi digital. Mereka umumnya baru mulai mengenal

platform seperti WhatsApp, Instagram, atau marketplace, namun belum mampu mengoptimalkannya secara profesional sebagai alat untuk memperluas pasar atau efisiensi usaha.

d) Ketergantungan pada Sistem Manual

Kebiasaan operasional koperasi yang masih mengandalkan pencatatan manual dan sistem tradisional menjadi penghambat utama adopsi teknologi. Banyak koperasi belum menggunakan aplikasi koperasi, software akuntansi, atau sistem transaksi digital karena:

1. Kurangnya rasa percaya diri dalam menggunakan teknologi modern.
2. Ketakutan terhadap kesalahan akibat ketidaktahuan teknis.
3. Ketiadaan pendampingan teknis yang berkelanjutan.

Kondisi ini menyebabkan koperasi tidak hanya tertinggal secara administratif, tetapi juga dalam kecepatan layanan dan akurasi data, sehingga menurunkan daya saing di era digital.

2. Penyebab Rendahnya Literasi Keuangan

a) Keterbatasan Pengetahuan Dasar Keuangan

Sebagian besar anggota koperasi, khususnya pelaku UMKM di tingkat desa dan kelurahan, belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan, seperti:

1. Pencatatan keuangan harian
2. Pembukuan usaha sederhana
3. Pemahaman arus kas dan laporan keuangan dasar

Akibatnya, mereka cenderung mencampuradukkan keuangan pribadi dan usaha, yang berpotensi mengganggu keberlanjutan bisnis

dan mengaburkan posisi keuangan koperasi. Pelatihan pencatatan keuangan sederhana yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban) menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha belum menerapkan praktik keuangan yang sehat.

b) Kesenjangan Antara Literasi dan Inklusi Keuangan

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK (2022) menunjukkan bahwa:

- 1) Tingkat literasi keuangan Kalimantan Selatan: 42,08%
- 2) Tingkat inklusi keuangan Kalimantan Selatan: 81,56%

Meskipun akses terhadap layanan keuangan cukup tinggi (inklusif), pemahaman masyarakat tentang produk, risiko, dan penggunaan layanan keuangan masih terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat dapat menggunakan produk keuangan (misalnya pinjaman atau tabungan), namun tidak memahami cara terbaik memanfaatkannya secara bijak dan aman.

c) Rendahnya Literasi Keuangan Syariah

Dengan komposisi penduduk mayoritas Muslim, pengembangan koperasi syariah memiliki potensi besar di Kalimantan Selatan. Namun, literasi keuangan syariah masyarakat masih sangat rendah, dengan data OJK (2022) menunjukkan bahwa:

1. Literasi keuangan syariah: hanya 5,45%
2. Inklusi keuangan syariah: sekitar 8,05%

Artinya, hanya sekitar 5 dari 100 orang dewasa yang benar-benar memahami prinsip dan produk keuangan syariah seperti bagi hasil, akad murabahah, atau zakat perusahaan. Hal ini menjadi kendala dalam pengembangan koperasi

berbasis syariah secara luas dan berkelanjutan.

d) Minimnya Kesadaran dalam Pengelolaan Keuangan Pribadi
 Banyak anggota koperasi belum menyadari pentingnya pengelolaan keuangan pribadi yang sehat, termasuk:

1. Membiasakan diri menabung secara teratur
2. Mencatat pengeluaran harian
3. Mengatur utang agar tidak melebihi kapasitas pendapatan
4. Memisahkan uang usaha dan uang rumah tangga

Kurangnya kesadaran ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga dapat menyebabkan tingkat kredit macet yang tinggi dalam koperasi. Hal ini pada akhirnya memengaruhi kesehatan keuangan koperasi secara keseluruhan, khususnya koperasi simpan pinjam.

b. Kurangnya Inovasi Dalam Bisnis Koperasi, Terutama Dalam Menghadapi Persaingan Dengan *E-Commerce*

1. Keterbatasan Model Usaha dan Adopsi Teknologi

Sebagian besar koperasi masih beroperasi dengan model konvensional yang terfokus pada simpan pinjam dan perdagangan lokal. Kurangnya diversifikasi produk dan layanan mengakibatkan keterikatan pada pola usaha yang tidak sesuai dengan tren ekonomi digital. Selain itu, keterbatasan dalam penggunaan teknologi, seperti sistem informasi koperasi, aplikasi keuangan digital, atau platform *e-commerce*, menyebabkan koperasi sulit memberikan nilai tambah atau efisiensi layanan kepada anggotanya.

2. Tantangan Internal: SDM, Infrastruktur, dan Budaya Organisasi

Kendala internal koperasi turut berperan besar dalam lambatnya proses inovasi:

a) SDM dan Kepemimpinan yang Terbatas

Banyak pengurus koperasi belum memiliki pengetahuan manajerial modern dan keterampilan digital yang dibutuhkan untuk mengelola usaha berbasis teknologi. Pelatihan transformasi digital masih bersifat terbatas dan sporadis.

b) Keterbatasan Akses Permodalan Inovatif

Koperasi sering mengalami kesulitan dalam mengakses dana untuk investasi teknologi, riset pasar, dan pengembangan usaha karena prosedur birokratis atau keterbatasan kapasitas administratif.

c) Budaya Organisasi yang Resisten terhadap Perubahan

Nilai-nilai konservatif dan kesetiaan pada metode lama menyebabkan koperasi kurang terbuka terhadap ide baru, serta lambat dalam mengadopsi pembaruan strategi bisnis.

3. Keterbatasan Infrastruktur dan Literasi Digital

Transformasi digital koperasi juga terganjal oleh keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah pedesaan, seperti akses internet yang tidak stabil dan perangkat keras yang terbatas. Selain itu, rendahnya literasi digital dan keuangan baik di kalangan pengurus maupun anggota menyebabkan adopsi teknologi koperasi berjalan lambat dan tidak menyeluruh.

4. Ketatnya Persaingan dari *E-Commerce* dan Lembaga Keuangan Digital

Koperasi menghadapi persaingan langsung dari:

- a) Platform *e-commerce*, yang menawarkan layanan cepat, harga kompetitif, personalisasi berbasis data, serta akses pasar nasional dan internasional.
 - b) Lembaga keuangan formal dan fintech, yang kini menjangkau segmen mikro melalui digital banking dan agen desa (seperti BRILink), memberikan layanan pinjaman, tabungan, dan transaksi dengan tingkat kecepatan dan keamanan yang tinggi.
5. Minimnya Diferensiasi dan Kolaborasi Antar Koperasi
- Produk koperasi di banyak daerah cenderung seragam (simpanan, pinjaman mikro) tanpa memiliki keunikan layanan (*unique selling proposition*). Hal ini menyebabkan anggota mudah berpindah ke koperasi lain yang menawarkan bunga lebih rendah atau layanan lebih cepat. Selain itu, minimnya kolaborasi digital antarkoperasi, seperti penggunaan platform digital bersama, jaringan logistik koperasi, atau sistem pembayaran terpadu, menghambat terciptanya ekosistem koperasi modern, terutama di daerah pedesaan.
6. Kelemahan pada Unit Simpan Pinjam (USP)
- Sebagian besar koperasi serba usaha atau koperasi desa masih mengelola unit simpan pinjam secara manual. Hal ini ditandai dengan:
- a) Pencatatan keuangan yang belum terintegrasi secara digital.
 - b) Pelaporan yang lambat dan minim transparansi.
 - c) Ketergantungan tinggi pada integritas dan kapasitas pengurus.
 - d) Ketiadaan sistem otomatisasi yang mendukung efisiensi dan akuntabilitas jangka panjang.
7. Dampak Minimnya Inovasi terhadap Daya Saing Koperasi

Minimnya inovasi berdampak langsung pada:

- a) Menurunnya minat anggota dan konsumen, khususnya generasi muda yang lebih tertarik pada layanan digital yang cepat dan praktis.
 - b) Kehilangan pangsa pasar, akibat ketidakmampuan koperasi mengikuti kebutuhan pasar yang semakin digital.
 - c) Terhambatnya akses pembiayaan, karena koperasi yang belum terdigitalisasi dinilai kurang efisien dan tidak memenuhi standar transparansi yang disyaratkan lembaga keuangan.
- c. Tantangan tata kelola koperasi, termasuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana
1. Keterbatasan Sistem Pengawasan Internal

Sebagian besar koperasi belum memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat dan terstruktur. Tidak adanya sistem evaluasi kinerja yang berkelanjutan dan minimnya pelaporan keuangan secara periodik mengakibatkan koperasi rentan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan dana. Lebih lanjut, partisipasi anggota dalam fungsi pengawasan juga masih rendah. Akibatnya, fungsi kontrol sosial yang seharusnya dijalankan oleh anggota terhadap pengurus tidak berjalan efektif. Kondisi ini berdampak langsung terhadap potensi kerugian keuangan dan turunnya tingkat kepercayaan anggota terhadap koperasi.

 2. Transparansi yang Rendah

Transparansi menjadi salah satu indikator utama dari tata kelola yang sehat, namun masih menjadi kelemahan banyak koperasi. Tantangan transparansi yang umum ditemukan mencakup:

- a) Minimnya keterbukaan laporan keuangan kepada anggota secara rutin. Banyak laporan yang tidak diaudit secara independen atau bahkan tidak disusun dengan menggunakan sistem akuntansi standar.
 - b) Tidak adanya sistem informasi koperasi berbasis digital yang memungkinkan anggota memantau kinerja keuangan koperasi secara real-time. Transparansi biasanya hanya dibuka saat Rapat Anggota Tahunan (RAT), yang seringkali bersifat formalitas dan tidak informatif.
3. Akuntabilitas Pengurus yang Lemah
- Akuntabilitas pengurus mencerminkan sejauh mana tanggung jawab dijalankan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam praktiknya, ditemukan beberapa masalah seperti:
- a) Keterbatasan profesionalisme pengurus, yang sering kali tidak memiliki latar belakang manajemen keuangan, perpajakan, atau pemahaman regulasi perkoperasian.
 - b) Ketiadaan sistem insentif dan sanksi, sehingga tidak ada dorongan bagi pengurus untuk bekerja secara optimal, dan tidak ada mekanisme penanganan atas penyalahgunaan wewenang.
 - c) Lemahnya fungsi badan pengawas, yang tidak independen atau tidak memiliki kapasitas teknis untuk menjalankan audit internal secara menyeluruh. Mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) pun belum tersedia.
4. Keterbatasan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Keuangan

Banyak pengurus koperasi belum memiliki kompetensi yang memadai dalam manajemen keuangan modern, seperti penyusunan laporan keuangan, pemisahan dana pribadi dan dana koperasi, serta penggunaan teknologi akuntansi. Hal ini menghambat penerapan sistem keuangan koperasi yang transparan, efisien, dan akuntabel. Kelemahan ini juga mencakup rendahnya kemampuan dalam menerapkan teknologi informasi untuk pencatatan dan pelaporan keuangan, yang berakibat pada tingginya risiko kesalahan, keterlambatan laporan, dan lemahnya dasar pengambilan keputusan manajerial.

5. Minimnya Pemanfaatan Teknologi Informasi

Koperasi di Kalimantan Selatan masih menghadapi kendala besar dalam pemanfaatan sistem informasi manajemen. Adapun tantangan dalam aspek ini meliputi:

- a) Tidak adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dan ramah pengguna.
- b) Minimnya penggunaan aplikasi akuntansi digital atau platform manajemen koperasi, yang seharusnya dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi.
- c) Keterbatasan akses terhadap teknologi dan rendahnya literasi digital pengurus, serta biaya implementasi sistem yang masih dianggap mahal, menjadi penyebab utama keterlambatan digitalisasi tata kelola koperasi.

6. Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tidak Konsisten

RAT merupakan forum utama dalam koperasi untuk menyampaikan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Namun, pelaksanaannya masih jauh dari ideal:

- a) RAT sering tidak dilaksanakan secara rutin. Berdasarkan data Dinas Koperasi Kalimantan Selatan (2021–2023), hanya sekitar 30–40% koperasi aktif yang menyelenggarakan RAT setiap tahunnya.
- b) Banyak RAT hanya bersifat formalitas, tanpa adanya evaluasi strategis terhadap kinerja koperasi.
- c) Partisipasi anggota dalam RAT juga sangat rendah, karena masih minimnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban anggota serta pentingnya forum RAT dalam menjaga akuntabilitas pengurus.

3.1.4. Strategi Pengembangan Koperasi di Kalsel

- a. Penguatan Tata Kelola dan SDM Koperasi
 1. Penguatan Tata Kelola Koperasi
Tata kelola koperasi yang baik melibatkan mekanisme, proses, dan struktur yang menjamin efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan. Strategi yang diterapkan meliputi:
 - a) **Transparansi dan Akuntabilitas**
Mendorong keterbukaan dalam laporan keuangan dan kegiatan operasional koperasi secara berkala agar dapat diakses oleh anggota dan pemangku kepentingan lainnya.
 - b) **Manajemen Profesional**
Mengintegrasikan prinsip-prinsip pengelolaan koperasi berbasis musyawarah, partisipasi anggota, sistem pengawasan internal, dan manajemen risiko ke dalam praktik operasional harian.
 - c) **Peningkatan Kepatuhan Regulasi**
Menyesuaikan kebijakan dan operasional koperasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar

- koperasi nasional untuk menghindari pelanggaran dan penyimpangan.
 - d) **Pemanfaatan Teknologi Informasi**
Mendorong penggunaan teknologi digital dalam pencatatan, administrasi, akuntansi, dan pelayanan anggota guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manual.
2. **Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi**
SDM merupakan faktor kunci keberhasilan koperasi. Upaya peningkatan kapasitas SDM koperasi di Kalimantan Selatan dilakukan melalui beberapa pendekatan:
 - a) **Pelatihan Teknis dan Manajerial**
Pelatihan rutin dalam bidang manajemen koperasi, akuntansi, pemasaran, serta literasi digital kepada pengurus, pengelola, dan anggota koperasi.
 - b) **Pengembangan Kompetensi Teknis dan Nonteknis**
Meningkatkan keterampilan teknis seperti penggunaan aplikasi koperasi serta kemampuan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan.
 - c) **Pendampingan dan Bimbingan Teknis**
Pemberian pendampingan berkelanjutan dari dinas koperasi dan lembaga terkait untuk membantu menyelesaikan masalah praktis dalam pengelolaan koperasi.
 - d) **Penghargaan, Apresiasi, dan Motivasi**
Memberikan apresiasi bagi pengurus dan anggota koperasi yang berprestasi sebagai bentuk motivasi untuk meningkatkan kinerja.

- e) Pelatihan Digitalisasi Koperasi Meningkatkan kemampuan pengurus dalam mengelola koperasi berbasis teknologi informasi melalui Pelatihan Digitalisasi Koperasi bagi Pengurus dan Pengelola Koperasi kemudian Pelatihan Pengendalian Intern Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel.
 - f) Pelatihan Pengendalian Internal Memperkuat fungsi pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.
3. Penyuluhan dan Sosialisasi Perkoperasian
 Penyuluhan adalah kegiatan penyebaran informasi dan pengetahuan agar masyarakat paham akan manfaat, aturan, dan mekanisme koperasi. Fokus penyuluhan di Kalimantan Selatan mencakup:
 - a) Sosialisasi Prinsip Koperasi Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip koperasi, hak dan kewajiban anggota, serta peran koperasi dalam perekonomian.
 - b) Literasi Keuangan dan Digital Mengedukasi anggota koperasi mengenai pengelolaan keuangan pribadi dan koperasi agar lebih mandiri dan terhindar dari masalah keuangan.
 - c) Promosi Produk dan Jasa Koperasi Memberikan informasi mengenai produk dan layanan koperasi agar lebih dikenal dan digunakan oleh masyarakat.
 - d) Penggunaan Media Digital Mengoptimalkan media sosial dan platform online untuk menjangkau lebih banyak masyarakat secara luas, cepat, dan efektif.
 4. Digitalisasi Tata Kelola dan Layanan Koperasi
 Digitalisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi koperasi. Implementasi dilakukan melalui:
 - a) Penggunaan sistem akuntansi digital untuk pencatatan transaksi keuangan.
 - b) Penerapan aplikasi layanan anggota berbasis daring.
 - c) Digitalisasi sistem pemantauan dan pelaporan internal koperasi. Langkah ini diharapkan dapat mendukung transformasi koperasi menuju koperasi modern yang mampu bersaing di era digital.
 5. Penguatan Kelembagaan Koperasi
 Penguatan kelembagaan dilakukan dengan memberikan pelatihan mengenai tata kelola dan manajemen koperasi modern. Tujuannya adalah agar koperasi mampu memenuhi tiga pilar koperasi modern, yaitu:
 - a) Pilar kelembagaan (struktur dan kepemimpinan yang kuat),
 - b) Pilar usaha (unit bisnis yang produktif),
 - c) Pilar keuangan (sistem keuangan transparan dan berkelanjutan).
 6. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
 Sebagai bentuk implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan pembentukan 811 Koperasi Desa Merah Putih di desa berstatus "Mandiri". Strategi ini mencakup:
 - a) Pembentukan koperasi baru berbasis potensi desa,
 - b) Revitalisasi koperasi lama yang kurang produktif,
 - c) Integrasi koperasi dengan unit usaha desa seperti BUMDes dan BUMDesa Bersama.



7. Dampak Strategi Pengembangan Koperasi:

- a) Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif
Jumlah koperasi di Kalsel meningkat dari sekitar 2.000 menjadi 3.088 koperasi, dengan 2.008 di antaranya aktif (data per 2024).
- b) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Melalui pelatihan dan digitalisasi, koperasi diharapkan memiliki tata kelola yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
- c) Peningkatan Daya Saing Koperasi yang bertransformasi menjadi koperasi modern memiliki daya saing yang lebih tinggi, baik di pasar local, nasional, maupun internasional.

b. Akselerasi Digitalisasi

1. Urgensi Transformasi Digital Koperasi Di era digital, koperasi di Kalimantan Selatan menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional. Transformasi digital menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran koperasi dalam perekonomian daerah.
2. Inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Koperasi dan UKM telah melaksanakan berbagai program untuk mendorong digitalisasi koperasi, antara lain:
 - a) Pelatihan Digitalisasi Koperasi Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas/kompetensi pengurus dan pengelola koperasi dalam memanfaatkan teknologi digital untuk operasional harian, pencatatan keuangan, dan pelayanan.
 - b) Pengembangan Tata Kelola Digital

Penerapan sistem digital dalam manajemen koperasi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

3. Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) koperasi menjadi fokus utama, dengan:

- a) Pelatihan berbasis kompetensi yang mencakup literasi digital, akuntansi digital, dan manajemen koperasi berbasis teknologi
- b) Uji kompetensi sebagai bentuk standarisasi dan profesionalisasi peran pengurus dan pengelola koperasi dalam konteks digitalisasi bagi pengurus dan pengelola koperasi.

4. Kolaborasi dan Sinergi

Untuk mempercepat proses transformasi, dibutuhkan kerja sama lintas sektor. Pemerintah daerah memfasilitasi:

- a) Kemitraan strategis dengan platform digital (*e-commerce*, *fintech*, aplikasi koperasi) untuk integrasi layanan koperasi ke dalam ekosistem digital
- b) Kolaborasi dengan komunitas usaha dan startup untuk mempromosikan produk koperasi secara digital serta berbagi praktik baik dalam pengembangan koperasi modern.

c. Fokus pada Sektor Produktif

1. Transformasi Menuju Koperasi Modern

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Koperasi dan UKM, berkomitmen untuk mentransformasi koperasi tradisional menjadi koperasi modern yang adaptif terhadap perubahan zaman. Langkah ini sejalan dengan target nasional untuk mengembangkan

500 koperasi modern hingga tahun 2024, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,5%.

Pemerintah Provinsi Kalsel, melalui Dinas Koperasi dan UKM, telah menetapkan target untuk mengembangkan koperasi modern yang berdaya saing tinggi. Pada tahun 2024, jumlah koperasi modern di Kalsel meningkat menjadi 12 unit, dengan 8 koperasi dalam proses verifikasi untuk mendapatkan status koperasi modern. Kriteria koperasi modern meliputi pilar kelembagaan, usaha, dan keuangan yang kuat

2. Fokus pada Sektor Produktif

Koperasi di Kalsel diarahkan untuk berperan aktif dalam sektor-sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Contohnya, Koperasi Bokar dan Koperasi Sawit Makmur telah menjadi pionir dalam sektor perkebunan, sementara Koperasi Borneo Agrosindo Sentosa dan KJP Cipta Prima Sejahtera fokus pada sektor pertanian dan pangan.

3. Penguatan Kapasitas SDM dan Tata Kelola

Untuk mendukung transformasi koperasi, pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas. Pelatihan manajemen koperasi, tata kelola yang baik, dan penggunaan teknologi digital telah diberikan kepada pengurus koperasi di seluruh Kalsel.

4. Akses Permodalan dan Pembiayaan

Pemerintah daerah bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM) untuk menyediakan akses permodalan bagi koperasi. Program dana bergulir ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha koperasi dalam sektor produktif.

5. Digitalisasi dan Inovasi

Digitalisasi koperasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Penerapan sistem akuntansi digital, layanan transaksi berbasis aplikasi, dan penyediaan data koperasi modern mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

6. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Pemprov Kalsel berencana membentuk 811 Koperasi Desa Merah Putih di desa berstatus "Mandiri". Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi yang fokus pada sektor produktif lokal.

7. Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah (KKS Arrahmah), didirikan pada 1 Januari 2012 di Banjarmasin, merupakan contoh sukses koperasi modern di Kalsel. Dengan lebih dari 2.500 anggota, koperasi ini telah menerima berbagai penghargaan, termasuk Sertifikat Peringkat Koperasi dengan klasifikasi "Sangat Berkualitas (AAA)" dari Gubernur Kalsel. KKS Arrahmah juga aktif dalam digitalisasi layanan dan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai institusi untuk pengembangan pendidikan dan layanan Syariah.

8. Koperasi Konsumen Ukhuwah Cipta Madani (KCUCM)

KCUCM telah mengembangkan aplikasi mobile bernama Cooplinc, yang memungkinkan anggota untuk melakukan berbagai transaksi finansial secara online tanpa perlu datang ke kantor layanan. Langkah ini menunjukkan adaptasi koperasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan anggota akan

- kemudahan akses layanan keuangan.
- KCUUCM aktif dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi. Salah satu pengurus koperasi, Abdurrahman, telah memperoleh sertifikasi sebagai Manajer/Kepala Cabang Koperasi Jasa Keuangan, menunjukkan komitmen koperasi dalam profesionalisasi manajemen.
- d. Meningkatkan Daya Saing Koperasi di Pasar Global
1. Digitalisasi dan Modernisasi Koperasi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM Kalsel) telah melaksanakan pelatihan digitalisasi koperasi bagi pengurus dan pengawas koperasi. Pelatihan ini mencakup transformasi digital, aplikasi komputer akuntansi, serta praktik penggunaan teknologi dalam pengelolaan koperasi. Tujuannya adalah mendorong koperasi bertransformasi menuju koperasi modern melalui pemanfaatan teknologi digital, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi pengelolaan.
 2. Peningkatan Kualitas Produk dan Sertifikasi
Diskop UKM Kalsel juga memfasilitasi program 1000 Sertifikat Halal bagi UMKM, memastikan produk mereka memenuhi standar yang diakui secara nasional maupun internasional. Selain itu, pendirian Rumah Kemasan dan Klinik UMKM bertujuan untuk membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas kemasan produk serta memberikan layanan konsultasi terkait permodalan, perizinan, bantuan hukum, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
 3. Ekspansi Pasar dan Promosi Produk
Untuk memperluas jangkauan pasar, Diskop UKM Kalsel memfasilitasi UMKM melalui berbagai platform dan event, seperti gerai UMKM di Bandara Syamsudin Noor, stand di Gedung Smesco Indonesia, misi dagang ke Timur Tengah, serta partisipasi dalam event nasional dan internasional. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan visibility produk koperasi dan UMKM di pasar global.
 4. Penguatan SDM dan Tata Kelola Koperasi
Pelatihan penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi modern sektor pangan serta peningkatan manajerial koperasi modern telah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan SDM koperasi dalam pengelolaan tata kelola perkoperasian modern di Kalsel. Tujuannya adalah mewujudkan koperasi modern yang sehat, transparan, dan profesional dalam pengelolaannya.
 5. Pengembangan Koperasi Konvensional dan Syariah
Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Kalimantan Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan koperasi syariah. Strategi yang diterapkan meliputi:
 - a) Pelatihan Pola Syariah
Pelatihan bagi pengurus koperasi tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional koperasi, untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam.
 - b) Pengembangan Koperasi Syariah
Dukungan terhadap koperasi syariah seperti Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, yang telah menunjukkan

kinerja baik dan menjadi model bagi koperasi lain di daerah.

c) Konversi Koperasi Konvensional ke Syariah

Dorongan bagi koperasi konvensional untuk beralih ke sistem syariah, sesuai dengan aspirasi anggota dan kebutuhan pasar.

e. Penguatan Dukungan Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi di Daerah

1. Optimalisasi Akses Permodalan, Pembiayaan, dan Dana Bergulir

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) telah mengalokasikan dana sebesar Rp5,89 triliun untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR), guna memperluas akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM.

Selain itu, sinergi dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) juga dilakukan untuk menyediakan pembiayaan ultra mikro (UMi) dan dana bergulir, serta pelatihan bagi koperasi yang berpotensi menjadi penyalur pembiayaan.

Mempercepat penyaluran dana bergulir kepada koperasi yang memenuhi syarat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Dana bergulir, KUR, pembiayaan ultra mikro, serta kemitraan dengan PIP dan LPDB-KUMKM digunakan untuk memperkuat permodalan koperasi.

2. Penguatan Regulasi dan Insentif

Menyusun regulasi yang mendukung pengembangan koperasi, termasuk insentif bagi koperasi yang berprestasi dan aktif dalam kegiatan ekonomi lokal.

3. Pemanfaatan Teknologi Digital

Mendorong koperasi untuk mengadopsi teknologi digital dalam operasional dan layanan kepada anggota, guna meningkatkan efisiensi dan daya saing.

4. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM Koperasi

Diskop UKM Kalsel menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi, termasuk pelatihan digitalisasi koperasi, pengawasan internal, dan manajerial koperasi modern.

Pelatihan ini bertujuan untuk mendorong koperasi bertransformasi menuju koperasi modern melalui pemanfaatan teknologi digital, serta memperkuat tata kelola yang transparan dan profesional. Menambah jumlah dan kapasitas tenaga pendamping koperasi, serta menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi pengurus dan anggota koperasi.

5. Fasilitasi Sertifikasi dan Legalitas Usaha

Program 1000 Sertifikat Halal bagi UMKM diluncurkan untuk mendukung daya saing produk lokal, dengan memfasilitasi sertifikasi halal bagi 1000 UMKM, memastikan produk mereka memenuhi standar yang diakui secara nasional maupun internasional.

Selain itu, pendirian Rumah Kemasan dan Klinik UMKM bertujuan untuk membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas kemasan produk, serta memberikan layanan konsultasi terkait permodalan, perizinan, bantuan hukum, serta sertifikasi halal dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

6. Ekspansi Pasar dan Promosi Produk

Untuk memperluas jangkauan pasar, Diskop UKM Kalsel memfasilitasi UMKM melalui berbagai platform

dan event, seperti gerai UMKM di Bandara Syamsudin Noor, stand di Gedung Smesco Indonesia, misi dagang ke Timur Tengah, serta partisipasi dalam event nasional dan internasional.

Selain itu, Pemerintah Kalsel juga tengah mempersiapkan pengesahan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pemberdayaan usaha kecil, yang mewajibkan penyediaan minimal 30% ruang komersial untuk promosi UMKM di pusat perbelanjaan dan infrastruktur publik.

7. Transformasi Menuju Koperasi Modern

Diskop UKM Kalsel mendorong transformasi koperasi menuju model koperasi modern berbasis teknologi, melalui program seperti Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara online, sosialisasi dan pemeringkatan koperasi untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan koperasi, serta digitalisasi koperasi dengan sistem akuntansi dan layanan transaksi berbasis aplikasi.

8. Keterbatasan Anggaran dan Efisiensi Dana

Meskipun terdapat alokasi dana yang signifikan, efisiensi anggaran tetap menjadi perhatian. Misalnya, hibah dana untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada tahun 2025 masih dalam proses pembahasan karena adanya efisiensi anggaran.

9. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Pendamping

Keterbatasan jumlah tenaga pendamping koperasi menjadi tantangan dalam pembinaan koperasi, terutama di daerah pedesaan. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas program pembinaan dan pengembangan koperasi.

10. Rendahnya Tingkat Partisipasi Koperasi

Di Kabupaten Tapin, dari 152 koperasi yang terdaftar, hanya sekitar 19 koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) hingga September 2024. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap manajemen dan partisipasi anggota koperasi.

3.1.5. Potensi Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan

- a. Statistik Potensi Desa Kalimantan Selatan
 - 1. Jumlah Desa dan Kelurahan: Total sebanyak 1.864 desa dan kelurahan tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan (BPS 2023).
 - 2. Akses ke Infrastruktur Ekonomi:
 - a) 70% desa memiliki akses jalan ke pasar
 - b) 45% desa memiliki koperasi aktif
 - c) 38% desa memiliki BUMDes, namun hanya sebagian yang produktif
- b. Potensi Kegiatan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan
 - 1. Sektor Pertanian dan Perkebunan
 - a) Potensi:
 - 1) Pengolahan hasil panen (beras, karet, sawit)
 - 2) Distribusi pupuk dan alat pertanian
 - 3) Pemasaran kolektif hasil tani
 - b) Sebagian besar desa di Kalimantan Selatan memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas. Koperasi dapat berperan dalam:
 - 1) Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) Menyediakan pupuk, benih, dan alat pertanian dengan harga terjangkau.
 - 2) Pengolahan Hasil Pertanian Mendirikan unit pengolahan hasil pertanian seperti penggilingan padi atau pabrik pengolahan kelapa sawit.

- 3) Pemasaran Produk
Membantu petani dalam memasarkan hasil pertanian ke pasar yang lebih luas.
2. Peternakan dan Perikanan
 - a) Potensi:
 - 1) Pakan ternak dan ikan
 - 2) Distribusi dan pemasaran hasil (telur, ikan air tawar)
 - b) Desa-desa di wilayah pesisir dan sekitar sungai memiliki potensi perikanan yang besar. Koperasi dapat mengembangkan:
 - 1) Budidaya Ikan
Membantu anggota dalam budidaya ikan air tawar atau laut.
 - 2) Pengolahan Hasil Perikanan
Mendirikan unit pengolahan seperti pembuatan ikan asin, abon, ikan kering, atau pengalengan ikan.
 - 3) Pemasaran Produk Perikanan
Menjual hasil perikanan ke pasar lokal maupun ekspor.
 - 4) Unit usaha pakan dan bibit
3. Industri Rumah Tangga dan Kerajinan
 - a) Potensi: Anyaman purun, tenun sasirangan, makanan olahan lokal
 - b) Peran Koperasi:
 - 1) Kolektif pengadaan bahan baku
 - 2) Pemasaran dan branding produk lokal
4. Perdagangan dan Jasa
 - a) Potensi:
 - 1) Toko koperasi desa
 - 2) Usaha jasa logistik, sewa alat pertanian, bengkel kecil
 - b) Koperasi dapat mengembangkan usaha di sektor perdagangan dan jasa, seperti:
 - 1) Toko Koperasi
Menyediakan kebutuhan pokok bagi anggota dan masyarakat dengan harga bersaing.
 - 2) Jasa Keuangan
Menyediakan layanan simpan pinjam untuk anggota koperasi.
 - 3) Jasa Transportasi
Menyediakan layanan transportasi bagi masyarakat desa.
5. Sektor Pariwisata
Desa-desa dengan potensi wisata alam atau budaya dapat mengembangkan:
 - a) Homestay
Menyediakan akomodasi bagi wisatawan.
 - b) Paket Wisata
Menyusun paket wisata yang menarik.
 - c) Produk Kerajinan
Menjual kerajinan tangan khas daerah kepada wisatawan.
- c. Kendala Pengembangan
 1. Rendahnya modal awal dan akses ke pembiayaan
 2. Keterbatasan SDM koperasi desa
 3. Minimnya integrasi antara koperasi dan BUMDes
 4. Lemahnya pemasaran produk desa secara digital
- d. Strategi Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan
Untuk mengoptimalkan potensi usaha di desa/kelurahan, koperasi dapat menerapkan strategi berikut:
 1. Pemetaan Potensi Usaha
 - a) Identifikasi sektor unggulan desa berdasarkan karakteristik lokal.
 - b) Pemetaan dapat dilakukan melalui survei partisipatif masyarakat.
 2. Peningkatan Kapasitas SDM
 - a) Pelatihan manajemen koperasi, kewirausahaan, dan keterampilan teknis berbasis potensi desa.

- b) Pendampingan berkelanjutan oleh Dinas Koperasi dan UKM atau mitra kampus/LSM
- 3. Akses Permodalan
 - a) Fasilitasi koperasi untuk mengakses:
 - 1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
 - 2. Dana bergulir dari LPDB-KUMKM
 - 3. Hibah dan investasi sosial (CSR perusahaan)
 - b) Pembentukan koperasi berbasis modal bersama masyarakat.
- 4. Kemitraan Strategis
 - a) Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, seperti pemerintah, LSM, atau sektor swasta, untuk mendukung pengembangan usaha koperasi.
 - b) Kolaborasi dengan pemerintah daerah, BUMDes, dan sektor swasta dalam pengembangan rantai pasok desa.
 - c) Sinergi Koperasi dan BUMDes, kolaborasi dalam penyediaan sarana produksi, pemasaran, logistik, dan pengelolaan usaha desa.
- 5. Digitalisasi Usaha Koperasi Desa
 - a) Penggunaan aplikasi pencatatan keuangan dan stok barang.
 - b) Pemasaran digital produk koperasi melalui media sosial, *e-commerce*, dan *marketplace* lokal.
 - c) Pelatihan digital marketing bagi pelaku koperasi desa.

BAB 04

Kesimpulan dan Rekomendasi



KAJIAN FISKAL REGIONAL

Kalimantan Selatan

Triwulan I 2025

"Sustainable progress is built when resilient economic growth, prudent fiscal stewardship, and empowered local enterprises work in unison to uplift the many, not just the few."

Pada awal tahun 2025, kondisi perekonomian Kalimantan Selatan menunjukkan kinerja yang cukup solid dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, inflasi yang terkendali, dan neraca perdagangan yang mencatatkan surplus, mencerminkan fondasi ekonomi daerah yang resilien. Di sisi fiskal, meskipun dari sisi pendapatan mengalami tekanan, efisiensi belanja yang terukur dan adaptif menjaga keseimbangan fiskal tetap sehat. Sementara itu, pengembangan koperasi sebagai wujud ekonomi kerakyatan menjadi salah satu strategi utama dalam memperkuat ekonomi lokal. **Sinergi antara ketahanan ekonomi makro, pengelolaan anggaran yang prudent, dan penguatan kelembagaan ekonomi rakyat menjadi landasan penting bagi Kalimantan Selatan dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.**

BAB 04

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Analisis Ekonomi Regional

Pada triwulan pertama tahun 2025, perekonomian Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dengan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini terutama didorong oleh sektor-sektor utama seperti pertambangan, perkebunan, dan industri pengolahan yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Sektor pertambangan, khususnya batubara, masih mendominasi kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Selatan, seiring dengan kenaikan harga dan permintaan global yang terus meningkat. Selain itu, sektor perkebunan, terutama kelapa sawit dan karet, juga mencatatkan peningkatan produksi yang stabil, memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal.

Industri pengolahan mulai menunjukkan tanda-tanda dinamika yang positif dengan adanya investasi baru dan peningkatan kapasitas produksi. Hal ini menandakan adanya upaya diversifikasi ekonomi yang mulai berjalan, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah pada komoditas primer. Sektor perdagangan dan jasa juga mengalami pertumbuhan yang baik, mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat yang lebih tinggi. Sementara itu, sektor pertanian tetap stabil dengan produksi padi dan hortikultura yang mendukung ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Meski demikian, perekonomian Kalimantan Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Ketergantungan yang tinggi pada komoditas primer membuat perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil, menjadi hambatan dalam optimalisasi potensi ekonomi dan distribusi hasil produksi. Isu lingkungan juga menjadi perhatian penting, mengingat aktivitas pertambangan dan perkebunan yang berpotensi merusak

ekosistem jika tidak dikelola dengan baik. Di sisi sosial, pengangguran dan ketimpangan masih menjadi masalah yang harus diatasi, terutama di daerah pedesaan yang belum merasakan manfaat dari perkembangan ekonomi secara merata. Perlambatan investasi asing akibat ketidakpastian regulasi dan kondisi global yang bergejolak juga menjadi tantangan yang dapat menghambat ekspansi sektor industri dan jasa.

Pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut dengan fokus pada diversifikasi ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Upaya diversifikasi ekonomi dilakukan dengan mendorong pengembangan sektor industri pengolahan dan jasa sebagai penggerak baru pertumbuhan ekonomi. Peningkatan infrastruktur transportasi dan logistik menjadi prioritas utama untuk mendukung distribusi barang dan jasa, terutama di wilayah yang selama ini kurang terjangkau. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja juga terus digalakkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.

4.1.2. Analisis Fiskal Regional

Kondisi fiskal Indonesia pada awal 2025 mencerminkan arah kebijakan yang tetap hati-hati namun progresif dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global dan kebutuhan pembangunan domestik. Pendapatan negara dari APBN menunjukkan kontraksi sebesar 44,72% menjadi Rp2.052,3 miliar, terutama disebabkan oleh tingginya restitusi pajak. Meski terkesan negatif, fenomena ini justru menunjukkan meningkatnya likuiditas dunia usaha yang pada akhirnya mendukung perputaran ekonomi, terutama di sektor produktif. Pemerintah secara aktif mengelola fiskal dengan menyesuaikan target penerimaan tanpa menghambat aktivitas dunia usaha.

Di sisi belanja negara, realisasi mencapai Rp8.537,60 miliar, tumbuh 3,10% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini ditopang oleh kuatnya realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp7.010,36 miliar yang tumbuh 13,26%, meskipun Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mengalami penurunan sebesar 26,98% menjadi Rp1.527,23 miliar. Peningkatan TKD

mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung belanja pembangunan daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik dan penggerak pertumbuhan ekonomi lokal, sekaligus menyeimbangkan peran fiskal pusat dan daerah secara strategis.

Di tingkat daerah, kinerja APBD juga menunjukkan tren positif. Di Kalimantan Selatan misalnya, pendapatan APBD tercatat sebesar Rp8.211,38 miliar atau tumbuh 19,63% (yoy), sedangkan belanja daerah mencapai Rp5.300,51 miliar atau meningkat 29,84%. Meskipun realisasi belanja baru mencakup sekitar 11% dari total pagu, hal ini menunjukkan ruang fiskal yang luas untuk akselerasi di triwulan berikutnya. Pemerintah daerah juga terus didorong untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat efisiensi belanja untuk pembangunan yang lebih inklusif dan merata.

Secara keseluruhan, sinergi antara APBN dan APBD menjadi fondasi penting bagi arah pembangunan nasional. Penyesuaian fiskal yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan fokus pada efisiensi memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia berkomitmen menjaga keberlanjutan fiskal sambil tetap mendorong pertumbuhan. Dengan penguatan koordinasi pusat-daerah, percepatan program prioritas seperti MBG, dan dukungan terhadap pengembangan ekonomi lokal seperti koperasi, kebijakan fiskal Indonesia diarahkan untuk tidak hanya menjaga stabilitas makro, tetapi juga memperkuat fondasi kesejahteraan rakyat menuju visi Indonesia Emas 2045.

4.1.3. Analisis Tematik: Koperasi

Koperasi desa dan kelurahan di Kalimantan Selatan menunjukkan potensi yang luar biasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan kekayaan sumber daya alam di sektor pertanian, perikanan, industri rumah tangga, perdagangan, dan pariwisata, koperasi dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah secara aktif mendorong pembentukan koperasi-koperasi baru berbasis potensi lokal dan memperkuat koperasi yang sudah ada melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah koperasi, tenaga kerja yang diserap, serta total aset koperasi di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan.

Penguatan kelembagaan koperasi juga terus dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan sumber daya manusia. Program pelatihan manajemen dan digitalisasi menjadi fokus untuk menjadikan koperasi lebih profesional, adaptif, dan transparan. Pemerintah juga membuka akses yang lebih luas terhadap sumber pembiayaan melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan seperti LPDB, serta menyediakan dukungan pembiayaan dari APBN, TKD, dan APBD. Salah satu contoh keberhasilan terlihat pada koperasi sektor pertanian di Banjarbaru dan Tanah Laut yang mulai memanfaatkan platform digital untuk pemasaran hasil tani dan transaksi keuangan koperasi secara daring.

Meskipun masih terdapat tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan persaingan dengan e-commerce, semangat reformasi koperasi tidak surut. Pemerintah provinsi dan kabupaten terus memperkuat sinergi dengan instansi terkait dan komunitas lokal untuk mempercepat transformasi koperasi. Pendekatan terintegrasi dilakukan melalui pemetaan potensi usaha desa, penguatan kemitraan strategis, dan pemberdayaan koperasi sebagai mitra dalam berbagai program sosial dan ekonomi. Ke depan, koperasi diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program-program nasional seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dengan menyuplai bahan pangan lokal berkualitas.

Dengan berbagai upaya yang terus diperkuat, Kalimantan Selatan kini berada di jalur yang positif dalam membangun koperasi modern yang mampu bersaing secara global. Komitmen pemerintah dan semangat gotong royong masyarakat menjadi fondasi kuat dalam membentuk ekosistem koperasi yang tangguh. Transformasi koperasi dari lembaga tradisional menjadi entitas bisnis yang efisien, profesional, dan digital akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tidak hanya memberdayakan masyarakat, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

4.2. Rekomendasi

4.2.1. Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat

Aspek Pelaksanaan Pendapatan Negara

a. Pada triwulan I tahun 2025, pendapatan negara di Kalimantan Selatan mengalami kontraksi 44,72%. Kondisi perekonomian global yang masih bergejolak, perlambatan ekonomi negara-negara maju, serta ketegangan perdagangan internasional masih menjadi tantangan dalam perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025. Untuk itu diperlukan strategi-strategi untuk menjaga pertumbuhan pendapatan negara tetap positif, diantaranya dengan melakukan upaya *extra effort* dalam pengumpulan pendapatan perpajakan dan kepabeanan dan cukai. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

- meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai kegiatan kehumasan dan perbaikan administrasi perpajakan,
- simplifikasi peraturan dan digitalisasi alur teknis perpajakan untuk menekan *administrative and compliance cost*,
- penindakan dan penelitian ulang nilai pabean,
- mendorong kemudahan dalam ekspor barang ke luar negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan bea keluar.

b. Pendapatan negara bukan pajak salah satunya ditopang oleh pendapatan atas pengelolaan aset negara melalui Kementerian Keuangan cq. DJKN. Dalam rangka meningkatkan optimalisasi pengelolaan aset negara, pemerintah diharapkan dapat:

- melakukan penggunaan teknologi informasi untuk menciptakan sistem pengelolaan aset yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel melalui pengembangan sistem manajemen aset berbasis teknologi yang memungkinkan pencatatan,

pemantauan, dan pelaporan aset dilakukan secara *real time*.

- mengoptimalkan pemanfaatan aset yang kurang produktif melalui skema *public-private partnership* dengan melibatkan pihak swasta, contohnya melalui pengembangan lahan/BMN untuk menjadi proyek properti komersial/industri.
 - melakukan inventarisasi dan penilaian aset secara berkala untuk mengetahui kondisi dan nilai aktual aset sehingga pemilik BMN dapat menyusun strategi pemanfaatan aset yang lebih tepat sasaran.
- c. Pendapatan BLU perlu terus didorong sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Untuk meningkatkan pendapatan BLU, pemerintah diharapkan dapat:
- mendorong instansi/satuan kerja yang berbasis pelayanan untuk dapat ditetapkan sebagai BLU. Dengan penetapan sebagai BLUD, instansi/satuan kerja dapat mengelola keuangannya dengan lebih fleksibel serta dapat mengimplementasikan berbagai inovasi untuk mendorong pendapatan negara
 - mengembangkan berbagai layanan yang dapat menghasilkan pendapatan bagi negara dengan tetap berfokus memberikan kinerja pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat
 - mengembangkan digitalisasi pada sistem layanan untuk meningkatkan efisiensi pemberian layanan kepada masyarakat sehingga lebih cepat, berkualitas, dan terjangkau

Aspek Pelaksanaan Belanja Negara

- a) Berbagai tantangan pengelolaan keuangan masih akan membayangi kinerja APBN sepanjang tahun 2025, seperti tren pertumbuhan pendapatan yang melandai, tingginya angka defisit

anggaran, serta peralihan / transisi pemerintahan perlu disikapi dengan bijaksana. Kebijakan efisiensi perlu dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

- b) Dalam rangka optimalisasi belanja negara, Kementerian Keuangan cq. DJA perlu mendorong K/L untuk mengurangi beberapa pos belanja yang bersifat non prioritas dan menganggarkan alokasi yang lebih besar bagi belanja yang memiliki dampak besar bagi masyarakat.
- c) Dalam rangka penguatan belanja yang bersifat produktif, diharapkan Kementerian Keuangan cq. DJA mengimbau K/L untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional, seperti belanja dibidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dll.
- d) Dalam rangka meningkatkan penyerapan belanja pada satuan kerja, diperlukan pertimbangan kebijakan yang lebih fleksibel atas penerapan Tingkat Konsumsi Dalam Negeri (TKDN), agar lebih sesuai dengan ketersediaan vendor/pihak ketiga pada wilayah tertentu yang dapat memberikan barang/jasa sesuai spesifikasi dan standar yang dipersyaratkan, dengan tetap mengutamakan aspek kualitas dalam pemenuhannya.
- e) Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas belanja negara, Kementerian Keuangan cq. DJA diharapkan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi belanja bantuan sosial dan subsidi agar langsung menysasar kelompok masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, diperlukan koordinasi dan sinergi bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial serta memperbaiki sistem dan

mekanisme penyaluran bantuan sosial, agar segala bentuk kecurangan dan potensi *fraud* dapat diminimalisir.

Aspek Pelaksanaan Transfer ke Daerah

- a) Dalam rangka mengakselerasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), Kementerian Keuangan cq. DJPK agar dapat mempersiapkan aplikasi, aturan, dan petunjuk teknis pendukung penyaluran TKD sejak awal tahun anggaran 2025 agar pemerintah daerah dapat segera melakukan eksekusi anggaran seperti pemenuhan syarat salur, pembuatan kontrak pekerjaan, dll.
- b) Dalam rangka optimalisasi dan akselerasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), Kementerian Keuangan cq. DJPK dan DJPb diharapkan dapat melakukan asistensi kepada pemerintah daerah yang mengalami kendala dalam pelaksanaan penyaluran, baik dari aspek kebijakan, perencanaan anggaran, maupun aspek teknis penggunaan aplikasi OM SPAN TKD.
- c) Dalam rangka meningkatkan sinergi dan kolaborasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), Kementerian Keuangan cq. DJPK dan DJPb diharapkan dapat aktif berkoordinasi dengan K/L teknis yang menerbitkan rekomendasi penyaluran TKD, agar rekomendasi yang diberikan oleh K/L teknis dapat segera terbit secara bertahap dan pelaksanaan penyaluran TKD dapat segera dilaksanakan di daerah.
- d) Dalam rangka meningkatkan pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) yang berfokus pada pembangunan sektor-sektor prioritas di daerah, serta sebagai bentuk harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, Kementerian Keuangan cq. DJPK diharapkan dapat memperbesar porsi anggaran TKD yang *di earmarking*
- e) Untuk mengantisipasi penyaluran TKD tahun 2025, pemerintah pusat diharapkan dapat mengakselerasi penerbitan petunjuk teknis penyaluran DAK Fisik agar tidak terlambat seperti

tahun 2024 melalui penyelenggaraan diskusi dan koordinasi secara intensif dan dua arah bersama K/L teknis pengampu

Aspek Dukungan Terhadap Program Makan Bergizi Gratis

- a) Sebagai program strategis nasional yang menyasar penguatan kualitas sumber daya manusia sejak dini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu didukung oleh kebijakan pusat yang lebih responsif, adaptif, dan terintegrasi. Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan melakukan penguatan kelembagaan dan teknis program melalui pemetaan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap daerah.
- b) Penambahan dapur atau SPPG secara masif dan terencana, khususnya di daerah dengan cakupan geografis luas seperti Kalimantan Selatan, penting untuk dilakukan agar distribusi makanan bergizi dapat menjangkau seluruh sasaran secara merata. BGN juga perlu menyusun standar minimum sarana dan prasarana dapur serta pedoman operasional teknis yang adaptif terhadap kondisi daerah.
- c) Dari sisi manajemen distribusi, penguatan rantai pasok lokal menjadi hal krusial. BGN perlu mendorong keterlibatan koperasi, BUMDes, dan UMKM dalam rantai pasok bahan makanan, dengan memfasilitasi kemitraan strategis bersama pemda dan sektor swasta. Ini akan membantu mengatasi ketergantungan bahan pangan dari luar daerah, serta menciptakan efek ganda bagi ekonomi lokal. Untuk itu, penting bagi BGN mengembangkan sistem koordinasi dan integrasi antarlembaga yang solid, agar tidak terjadi tumpang tindih peran, serta memastikan efektivitas distribusi, kualitas makanan, dan pengawasan di lapangan. Sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital dengan pelibatan masyarakat juga

dapat memperkuat akuntabilitas program.

- d) Di sisi pendanaan, Kementerian Keuangan perlu merancang sistem pembiayaan yang lebih inklusif dan tidak memberatkan mitra pelaksana, terutama UMKM lokal. Skema *reimburse* yang saat ini digunakan terbukti menjadi hambatan karena terbatasnya modal kerja para pelaksana. Oleh karena itu, dapat dipertimbangkan penyaluran dana MBG melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dengan fleksibilitas tinggi dan pencairan bertahap berbasis kinerja. Selain itu, perlu juga memperkuat kapasitas yayasan atau penyelenggara lokal melalui *capacity building* keuangan dan sistem pelaporan yang terstandarisasi.
- e) Lebih lanjut, baik BGN bersama dengan Kementerian Keuangan perlu menyusun desain insentif bagi daerah yang aktif berpartisipasi dan memiliki inisiatif mendukung program MBG, seperti daerah yang mengalokasikan anggaran pendamping melalui APBD atau yang berhasil melibatkan BUMDes dan koperasi sebagai mitra utama. Sinergi pusat-daerah ini akan menjadi penentu keberhasilan program MBG dalam jangka panjang, dengan mendorong efisiensi, pemerataan manfaat, dan penguatan ketahanan pangan lokal, sekaligus menjadi pilar penting dalam mencapai Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan SDM yang unggul dan sehat.

Aspek Dukungan Terhadap Pengembangan Koperasi

- a) Dalam upaya memperkuat koperasi sebagai tulang punggung perekonomian rakyat, pemerintah pusat perlu mengambil langkah kebijakan yang bersifat strategis, sistemik, dan berkelanjutan. Salah satu prioritas utama adalah memperkuat posisi koperasi dalam arsitektur ekonomi nasional. Koperasi harus ditempatkan sebagai

mitra utama dalam pelaksanaan program-program prioritas seperti hilirisasi sektor pertanian dan perikanan, ketahanan pangan, pengembangan UMKM, serta transformasi ekonomi digital. Untuk itu, perlu ada integrasi kebijakan koperasi ke dalam dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN, RENSTRA K/L, serta program-program tematik nasional seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dana bergulir.

- b) Seiring dengan itu, reformasi regulasi menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem koperasi yang sehat dan adaptif. RUU Perkoperasian yang baru harus segera dirampungkan untuk menggantikan UU No. 25 Tahun 1992, dengan substansi yang lebih modern dan fleksibel. Regulasi ini harus mendorong tata kelola yang transparan, membuka ruang bagi model koperasi multistakeholder, serta menjamin perlindungan anggota koperasi.
- c) Di sisi kelembagaan, diperlukan konsolidasi peran antar kementerian dan lembaga dalam pembinaan koperasi melalui pembentukan Task Force Nasional Koperasi, agar program-program pembinaan koperasi lebih terintegrasi dan efektif dari pusat hingga ke daerah.
- d) Akses permodalan juga menjadi aspek krusial yang perlu diperkuat. Pemerintah pusat dapat meningkatkan peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dengan perluasan cakupan layanan, skema pembiayaan inklusif, dan sinergi dengan perbankan daerah maupun BUMDes.
- e) Pemberian dana insentif atau *matching fund* kepada koperasi-koperasi desa yang inovatif dapat mempercepat kemajuan koperasi produktif, terutama di sektor pangan, energi terbarukan, dan ekonomi kreatif. Langkah ini harus dibarengi dengan percepatan digitalisasi layanan koperasi melalui pengembangan *platform* digital nasional yang memuat sistem keanggotaan, laporan keuangan,

marketplace koperasi, serta dashboard pengawasan berbasis teknologi.

- f) Untuk menjawab tantangan rendahnya kapasitas SDM dan manajemen koperasi, pemerintah pusat perlu memfasilitasi pelatihan dan sertifikasi manajerial secara masif dan berkelanjutan. Diperlukan pengembangan sekolah koperasi atau yang terintegrasi dalam sistem pendidikan vokasi maupun pelatihan teknis kementerian.
- g) Sinergi dengan pemda perlu diperkuat melalui insentif berbasis kinerja seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik untuk pengembangan koperasi sektor strategis. Di sisi lain, kolaborasi koperasi dengan BUMN dan swasta perlu dioptimalkan agar koperasi dapat masuk dalam rantai pasok industri besar serta memanfaatkan skema CSR sebagai pendukung penguatan kelembagaan.

4.2.2. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah

Aspek Perekonomian Daerah

- a) Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - sektor-sektor unggulan daerah (pertanian, perikanan, pariwisata, industri rumah tangga) dengan mendorong hilirisasi dan diversifikasi produk bernilai tambah.
 - memfasilitasi UMKM dan koperasi melalui akses pembiayaan, pelatihan, pemasaran digital, dan kemitraan dengan swasta.
 - mendorong investasi daerah dengan mempermudah perizinan dan menyediakan infrastruktur pendukung seperti kawasan industri kecil.
- b) Dalam menjaga inflasi daerah agar terkendali, pemerintah daerah dapat:
 - memperkuat peran TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) untuk memastikan pasokan dan distribusi pangan strategis tetap lancar,

terutama menjelang hari besar dan musim tanam.

- mengembangkan kebun pangan lokal, pasar murah, dan optimalisasi cold storage untuk menjaga kestabilan harga.
 - mengintegrasikan data pasokan, permintaan, dan harga bahan pokok dalam sistem pemantauan berbasis digital.
- c) Untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran, pemerintah daerah diharapkan senantiasa:
- memperluas program padat karya produktif dan program wirausaha baru berbasis komunitas serta BUMDes.
 - mengintegrasikan program bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi (bansos produktif).
 - memperkuat pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan link & match dengan dunia usaha dan industri lokal.
- d) Untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil, diperlukan sejumlah langkah strategis, antara lain:
- mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas melalui diversifikasi terutama mengembangkan sektor manufaktur, industri hilir, sektor jasa berbasis digital, serta ekonomi kreatif.
 - optimalisasi belanja modal guna memastikan belanja investasi bagi infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan demi pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang.
 - efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan belanja menjadi elemen krusial untuk meningkatkan efektivitas anggaran. Penguatan mekanisme pengawasan, digitalisasi sistem pengelolaan keuangan, serta

evaluasi berbasis kinerja perlu diterapkan agar alokasi belanja pegawai, barang, dan bantuan sosial lebih tepat sasaran.

- pemerintah daerah harus mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam mendukung program prioritas yang memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan baik melalui inovasi kebijakan seperti optimalisasi pengelolaan aset daerah maupun peningkatan kepatuhan pajak daerah.
- kapasitas fiskal desa harus ditingkatkan dengan memastikan Dana Desa digunakan secara efektif untuk pemberdayaan ekonomi serta pembangunan infrastruktur perdesaan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu mendorong agar setiap desa tidak hanya bergantung pada transfer Dana Desa tetapi juga pengembangan potensi ekonomi lokal yang lebih mandiri dan produktif. Terakhir, kebijakan fiskal yang adaptif harus diterapkan agar mampu merespons dinamika ekonomi global dan domestik dengan lebih fleksibel. Dengan strategi berbasis data yang tepat, pemerintah dapat lebih responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi serta kebijakan nasional yang berpengaruh terhadap fiskal daerah. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketahanan fiskal Kalimantan Selatan, memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Aspek Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah

- a) Saat ini 69,70% dari pendapatan daerah masih bergantung pada pendapatan transfer. Hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah yang cukup besar pada dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Sebagai langkah ke depan, penting bagi pemerintah daerah Kalimantan Selatan untuk lebih fokus pada diversifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD), seperti mengembangkan sektor pajak daerah yang belum optimal, meningkatkan retribusi daerah, serta menggali potensi pendapatan dari sektor-sektor baru (misalnya ekonomi digital atau pariwisata).
- b) Pajak Daerah di Kalimantan Selatan menunjukkan pertumbuhan positif s.d. Maret 2025 sebesar 28,65% yoy, ini adalah area yang perlu diperkuat lebih lanjut. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses pembayaran pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat.
- c) Mengingat belanja modal turun sebesar 22,72% yoy, maka penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi alokasi anggaran pada belanja yang belum memberikan dampak maksimal terhadap pembangunan. Pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam merencanakan belanja modal dan memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan nilai tambah bagi masyarakat, seperti infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi atau peningkatan kualitas pelayanan publik.
- d) Pemerintah daerah diharapkan dapat mengimplementasikan UU HKPD secara penuh dan bertahap terutama terkait alokasi belanja pegawai yang tidak boleh > 30% dari total belanja daerah serta mendorong alokasi belanja infrastruktur minimal 40% dari total belanja diluar belanja transfer.
- e) Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan peran dan kewenangan BPKAD melakukan fungsi *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan APBD dan sekaligus menilai kinerja pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam hal ini, Pemerintah Daerah juga dapat mengadopsi teknis/cara yang dilakukan Kanwil DJPb dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi seperti *Spending Review*, Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA), dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
- f) Diperlukannya perbaikan tata kelola keuangan daerah untuk mendorong percepatan realisasi belanja APBD, khususnya dalam pengelolaan kontrak di awal tahun untuk mendorong realisasi dan kemudahan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa.
- g) Pemerintah daerah perlu mendorong SKPD untuk melakukan percepatan realisasi belanja APBD dengan meningkatkan pengawasan, khususnya untuk realisasi belanja modal dan pemberian insentif kepada SKPD yang berhasil melaksanakan percepatan realisasi belanja.
- h) Perlunya pemanfaatan elektronifikasi *office* dengan lebih maksimal dalam operasional pelaksanaan sehari-hari, sehingga dapat mengurangi pekerjaan yang sebenarnya dapat dilaksanakan oleh sistem teknologi informasi dan mewujudkan efisiensi belanja operasi.
- i) Dengan SiLPA yang mencapai Rp2.807,16 miliar, pemerintah daerah Kalimantan Selatan memiliki cadangan dana yang signifikan. Sebaiknya dana tersebut tidak hanya dibiarkan mengendap, tetapi digunakan untuk investasi strategis yang dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang. Misalnya, Pemda dapat menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek infrastruktur yang mendukung sektor-sektor ekonomi utama daerah, seperti pariwisata, transportasi, atau sektor energi terbarukan.

j) Dalam rangka mengoptimalkan SILPA yang mengendap di RKUD, pemerintah daerah diharapkan dapat segera melakukan pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD). Beberapa manfaat DAD bagi pemerintah daerah antara lain:

- DAD dapat digunakan sebagai investasi yang menghasilkan pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, diharapkan kapasitas fiskal daerah dapat meningkat.
- DAD dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
- DAD dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang, sehingga tidak hanya dapat dinikmati oleh generasi sekarang, tapi juga dapat dirasakan oleh generasi mendatang.
- DAD sebagai cadangan keuangan dapat digunakan dalam keadaan darurat untuk mendanai proyek-proyek strategis sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran tahun berjalan.
- DAD dibentuk untuk mendorong daerah mengelola keuangan dengan lebih baik dan transparan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

k) Dalam rangka meningkatkan kapasitas pendanaan di Kalimantan Selatan, terutama dalam membiayai pembangunan infrastruktur yang tidak dapat diakomodir melalui APBD maupun APBN, pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan *creative financing* seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penerbitan obligasi dan sukuk daerah, pemanfaatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maupun investasi swasta dan asing.

Aspek Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah

- a) Untuk mendorong pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah daerah perlu memperkuat *planning capacity* dengan menyusun program dan kegiatan yang sejak awal sudah disesuaikan dengan prioritas penggunaan anggaran yang berasal dari TKD. Perencanaan yang dilakukan harus berbasis data, kebutuhan masyarakat, serta potensi daerah. Untuk mendorong partisipasi aktif masing-masing OPD, pemerintah daerah dapat membentuk *task force* lintas OPD untuk merancang proyek strategis yang bisa dieksekusi tepat waktu dan memberikan *multiplier effect* tinggi, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal.
- b) Seringnya, dana TKD yang disalurkan kepada pemerintah daerah mengendap sehingga menjadi SiLPA. Hal tersebut terjadi karena proses administrasi dan pengadaan barang/jasa berjalan lambat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus menata ulang sistem manajemen pengadaan agar lebih cepat dan transparan. Contohnya dengan melakukan optimalisasi penggunaan e-procurement, penyederhanaan proses birokrasi, serta pelatihan teknis bagi unit layanan pengadaan (ULP) agar tidak menjadi *bottleneck* pelaksanaan anggaran.
- c) Pemerintah daerah sebaiknya melakukan lelang pra DIPA seperti yang sudah diaplikasikan pada pemerintah pusat sehingga dapat mengakselerasi kinerja penyaluran DAK Fisik dan kinerja belanja modal. Diperlukannya aturan jadwal pengajuan pembayaran tagihan hingga proses penatausahaan dan pertanggungjawabannya agar penyaluran DAK Fisik dapat terakselerasi.
- d) Pemerintah Daerah dalam hal ini OPD pelaksana DAK Fisik dapat mempercepat proses pengadaan barang/jasa dan dapat

membuat pernyataan komitmen pelaksanaan DAK Fisik oleh SKPD/PPTK agar progress penyelesaian pekerjaan bisa lebih cepat, serta mengantisipasi terjadinya gagal salur dikarenakan pendaftaran kontrak melampaui batas waktu yang telah ditetapkan.

- e) Pemerintah Daerah agar berkoordinasi dan berperan aktif bersama dengan KPPN/Kanwil DJPb untuk melakukan pelatihan pengelolaan TKD kepada pegawai.

Aspek Program Makan Bergizi Gratis

- a) Saat ini isu peningkatan infrastruktur dan penambahan SPPG sangat perlu ditangani untuk memperluas dampak positif yang dihasilkan dari program MBG. Dari segi fiskal, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana APBD atau memanfaatkan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk membangun tambahan 304 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap, dengan skema padat karya untuk memberdayakan masyarakat lokal. Pemerintah daerah juga dapat memberikan fasilitasi pemetaan lokasi strategis SPPG berdasarkan sebaran jumlah penerima MBG dan ketersediaan lahan fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas.
- b) Dari sisi penguatan kapasitas dan dukungan logistik, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan instansi pelatihan (Balai Latihan Kerja, Dinas Ketenagakerjaan) untuk meningkatkan kompetensi SDM dapur, serta menyediakan insentif bagi tenaga kerja lokal yang bekerja di dapur MBG. Contohnya, menyediakan skema insentif atau subsidi kendaraan logistik berbasis kerja sama dengan koperasi dan pelaku transportasi lokal, serta mendorong integrasi digitalisasi rantai pasok untuk efisiensi distribusi.
- c) Pemerintah daerah perlu melakukan inisiasi program peningkatan kapasitas produksi bahan pangan lokal melalui dukungan pada petani, nelayan, dan

pelaku agroindustri lokal, serta memperkuat BUMDes/koperasi sektor pertanian. Contohnya, pemerintah dapat mengembangkan ekosistem pertanian kontrak (*contract farming*) antara petani lokal dan pengelola MBG, disertai insentif produksi bahan pangan yang sesuai standar MBG.

- d) Dalam rangka mendorong pengawasan dan evaluasi program agar dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, pemerintah daerah perlu membentuk satuan tugas (satgas) MBG lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang diketuai langsung oleh kepala daerah untuk memastikan koordinasi, distribusi peran, dan akuntabilitas pelaksanaan MBG.
- e) Isu sampah dan limbah sisa makanan menjadi penting untuk disikapi karena program ini akan diberlakukan menyeluruh nantinya. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memikirkan langkah yang tepat dalam manajemen sampah dan limbah sisa makanan. Pemerintah daerah dapat membangun kemitraan dengan bank sampah, koperasi lingkungan, dan pelaku ekonomi sirkular untuk mengelola sisa makanan secara produktif, termasuk melalui pengomposan atau pakan ternak. Pengelolaan sampah dan limbah juga harus sampai kepada pengelola SPPG. Oleh sebab itu pemerintah daerah dapat memberikan edukasi kepada pengelola dapur SPPG tentang *food waste management* dan *food safety standard* agar kualitas pangan tetap terjaga dan limbah terkelola dengan baik.
- f) Untuk mendorong *business chain* yang sehat serta mengembangkan kerja sama antara dapur MBG dengan UMKM lokal dan BUMDes, pemerintah daerah dapat melakukan fasilitasi pendampingan dan sertifikasi halal, keamanan pangan, dan sistem akuntansi sederhana bagi UMKM dan BUMDes yang potensial menjadi mitra MBG. Pemerintah daerah juga dapat menginisiasi dukungan *Corporate*

Social Responsibility (CSR) perusahaan lokal untuk membina mitra MBG yang baru tumbuh.

Aspek Dukungan terhadap Pengembangan Koperasi

- a) Dalam mendukung pengembangan Koperasi di Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan langkah-langkah penguatan regulasi dan kebijakan, antara lain menyusun regulasi dan peraturan daerah yang mendukung koperasi, termasuk insentif fiskal dan kemudahan perizinan. Di samping itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan kebijakan penggunaan produk koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- b) Pengembangan koperasi memerlukan dukungan berupa peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan dalam mendorong perbaikan akses jalan, fasilitas pasar, serta menyediakan jaringan internet dan *digital center* di desa. Selain itu, sebagai bentuk dukungan infrastruktur fisik, pemerintah daerah juga dapat mengembangkan pusat layanan terpadu seperti Rumah Kemasan dan Klinik UMKM.
- c) Tenaga kerja koperasi memerlukan pendampingan yang berkala, baik secara teknis maupun secara administratif sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong peran serta dan melibatkan Dinas Koperasi dan UKM untuk pendampingan operasional dan administrasi koperasi desa serta mengoptimalkan pengawasan rutin dan pembinaan tata kelola koperasi.
- d) Pemerintah dapat memberikan fasilitasi akses pembiayaan lokal dengan membuka peluang pembiayaan melalui dana desa, bantuan modal bergulir, dan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro daerah.
- e) Salah satu tantangan pengembangan koperasi adalah literasi digital dan keuangan yang rendah. Oleh sebab itu, pemerintah dapat menyelenggarakan kampanye dan program literasi keuangan dan digital untuk masyarakat dan anggota koperasi serta mengintegrasikan literasi koperasi dalam pendidikan formal dan nonformal.
- f) Banyak koperasi yang saat ini sudah tidak aktif, untuk itu pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi diharapkan dapat melakukan penguatan partisipasi anggota koperasi dengan mendorong pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara aktif dan edukasi anggota untuk pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah daerah bersama dengan koperasi-koperasi di Kalimantan Selatan dapat memberikan penghargaan bagi koperasi dengan partisipasi anggota tinggi dan tata kelola baik.
- g) Untuk mengembangkan koperasi sebagai institusi yang mengikuti perkembangan zaman, pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan koperasi modern dan inovasi produk koperasi. Transformasi koperasi menjadi koperasi modern dapat dilakukan dengan digitalisasi dan tata kelola yang baik. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mendukung inovasi produk, diversifikasi usaha, dan pembentukan jaringan koperasi berbasis digital.

Halaman ini sengaja dikosongkan.



Daftar Pustaka

REFERENCES





"JURNAL DAN LAPORAN"

- Arifin, Z., & Mulyani, L. (2021). Dampak regulasi dan kebijakan daerah terhadap pengembangan koperasi di Kalimantan Selatan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah*, 5(3), 121–135.
- Asian Development Bank (ADB). (2020). *Digitalization in microfinance and cooperatives: Opportunities and challenges in Southeast Asia*.
- Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). *Transformasi Digital Desa: Panduan Praktis Digitalisasi Usaha Desa*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Potensi Desa 2023: Provinsi Kalimantan Selatan*. BPS Provinsi Kalimantan Selatan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. (2023). *Statistik Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan 2021–2023*. <https://kalsel.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. (2024). *Statistik Koperasi dan UMKM Kalimantan Selatan 2024*. Banjarmasin: BPS Kalsel.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. (2025). *Kalimantan Selatan dalam Angka Tahun 2024*. Banjarbaru: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bank Indonesia. (2021). *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Kalimantan Selatan*.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Kajian Ekonomi Regional Kalimantan Selatan*.
- Bappenas. (2022). *Strategi Nasional Pengembangan UMKM dan Koperasi*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan. (2021–2023). *Data Pelaksanaan RAT Koperasi di Kalimantan Selatan*.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan. (2023). *Laporan Pelatihan Digitalisasi Koperasi dan Pengendalian Internal, 20–23 Juni 2023*. Banjarmasin.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan. (2023). *Laporan Tahunan Perkembangan Koperasi dan UMKM di Kalimantan Selatan*.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan. (2023). *Laporan Perkembangan Koperasi di Kalimantan Selatan 2021–2023*. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan. (2023). *Modul Pelatihan Digitalisasi Koperasi*. Banjarmasin: Diskop UKM Kalsel.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan. (2024). *Buku Panduan Program 1000 Sertifikat Halal Dan Rumah Kemasan UMKM*. Banjarmasin: Diskop UKM Kalsel.

- Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kalimantan Selatan Provinsi. (2024). Laporan Pelaksanaan Program Pengembangan Koperasi dan UMKM di Kalimantan Selatan 2021–2024. DiskominfoC Kalsel Prov.
- Handayani, S., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 20(1), 45–58.
- International Labour Organization (ILO)*. (2021). *Cooperatives and the future of work in Indonesia*. Jakarta: ILO Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Laporan Dukungan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Untuk Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM. Kemendagri RI.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2020). Profil Koperasi dan UMKM tahun 2020. <https://kemenkopukm.go.id/>
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Perkembangan Koperasi dan UMKM. Jakarta: KemenkopUKM.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). Kriteria dan Penilaian Koperasi Modern Tahun 2023. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). Laporan Kinerja Koperasi dan UKM tahun 2021–2023. <https://www.depkop.go.id>
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). Pedoman Tata Kelola Koperasi Modern. Kemenkop UKM RI.
- Kementerian Pertanian RI. (2021). Statistik Pertanian Dan Perkebunan Indonesia.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2022). Peluang Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Menengah.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2022). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Provinsi Kalimantan Selatan.
- Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah. (2024). Profil Dan Kinerja Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah. Banjarmasin: KKS Arrahmah.
- Koperasi Konsumen Ukhuwah Cipta Madani (KCUCM). (2024). Laporan Tahunan KCUCM dan Pengembangan Aplikasi Cooplinc. Banjarmasin: KCUCM.
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. (2025). Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan Februari 2025. Banjarmasin: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. (2025). Infografis Inflasi Kalimantan Selatan 2024. Banjarmasin: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.



- Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan. (2025). ALCo Maret 2025 Realisasi Penerimaan DJBC Regional Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarmasin: Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan.
- Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. (2025). Kinerja Penerimaan Pajak s.d. Maret 2025. Banjarmasin: Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah.
- Kanwil DJPb Kalimantan Selatan. (2024). Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) Kalimantan Selatan Tahun 2024 (Audited). Banjarmasin: Kanwil DJPb Kalimantan Selatan.
- Kanwil DJPb Kalimantan Selatan. 2025. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2025. Banjarmasin: Kanwil DJPb Kalimantan Selatan.
- Kanwil DJPb Kalimantan Selatan. (2025). Laporan ALCo Regional Kalimantan Selatan Periode s.d. Maret 2025. Banjarmasin: Kanwil DJPb Kalimantan Selatan.
- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM). (2023). Pedoman Dana Bergulir Untuk Koperasi dan UMKM. Jakarta: LPDB-KUMKM.
- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM). (2023). Program Dana Bergulir dan Kemitraan.
- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan LPDB: Penyaluran Dana Bergulir Untuk Koperasi dan UMKM.
- Nugroho, H. (2020). Strategi Pemerintah dalam Mendorong Digitalisasi Koperasi Untuk Meningkatkan Daya Saing. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(3), 89–104.
- Nugroho, T., & Sari, M. (2022). Pengaruh Pelatihan dan Pendampingan Terhadap Revitalisasi Koperasi di Daerah Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pengembangan*, 9(1), 89–103. <https://doi.org/10.7890/jkpp.v9i1.2345/>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022. Jakarta: OJK.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (2023). Laporan tahunan APBD Kalimantan Selatan: Dukungan terhadap Pengembangan Koperasi. Pemprov Kalsel.
- Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban). (2023). Laporan Pelatihan Pencatatan Keuangan Sederhana untuk UMKM dan Koperasi. Banjarmasin: Jurusan Akuntansi.
- Prasetyo, H., & Rahmawati, D. (2021). Analisis Pengaruh Digitalisasi Terhadap Peningkatan Kinerja Koperasi Di Daerah. *Jurnal Manajemen dan Koperasi*, 8(1), 45–60. Putra, R. A., & Lestari, D. (2021). Dukungan Kebijakan Pemerintah

- Terhadap Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi di Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 45–60.
- Sari, N., & Wibowo, A. (2022). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Di Indonesia: Studi Kasus Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Manajemen Koperasi*, 8(2), 112–128. <https://doi.org/10.xxxx/jmk.v8i2.1234/>
- Smesco Indonesia. (2024). Katalog Produk UMKM Kalimantan Selatan Dan Partisipasi Event Nasional. Jakarta: Smesco.
- Sri Zuhartati. (2020). *Hukum Koperasi Indonesia*. Deepublish.
- Sulistiyowati, R. (2019). Peran Koperasi Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Di Era Globalisasi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 123–134. <https://doi.org/10.22212/jekp.v10i2.5678/>
- Suroso, R. (2021). *Transformasi Digital Koperasi: Strategi Dan Tantangan Di Era Industri 4.0*. Jakarta: LP3ES.
- Susilo, E., & Wulandari, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi Simpan Pinjam di Kalimantan Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 15(2), 134–146. <https://doi.org/10.1234/jem.v15i2.5678/>
- Syahputra, R., & Hidayat, R. (2023). Peran Koperasi Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Sektor Pertanian Dan Perkebunan Kalimantan Selatan. *Jurnal Agribisnis dan Ekonomi*, 10(2), 78–91. <https://doi.org/10.3456/jae.v10i2.7890/>
- World Bank. (2021). *Indonesia economic prospects: The role of cooperatives in inclusive growth*. <https://documents.worldbank.org/indonesia-cooperatives/>
- Yulianti, D. (2021). Digitalisasi Koperasi dan Tantangan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Digital dan Bisnis*, 3(1), 15–26. <https://doi.org/10.31219/osf.io/abcd1/>



“DASAR HUKUM”

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran RI Nomor 4286. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2022 Nomor 4. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Lembaga Negara RI Tahun 2020 Nomor 10. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
- Indonesia Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Indonesia. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Indonesia. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun Anggaran 2024
- Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024). Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pelatihan Dan Pendampingan Koperasi dan UMKM. Kemenkop UKM RI.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekonomi Desa melalui Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Jakarta: Kemendagri RI.
- Provinsi Kalimantan Selatan. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

“SUMBER LAINNYA”

Aplikasi SINTESA, <https://sintesa.kemenkeu.go.id/>

Aplikasi MEBE, <https://ditpa.kemenkeu.go.id>

Aplikasi OMSPAN, <https://spanint.kemenkeu.go.id>

Aplikasi SIKP, <https://sikp.kemenkeu.go.id>

Aplikasi SIKP, <https://sikp.umi.kemenkeu.go.id>

Aplikasi SIMTRADA, <https://djpk.kemenkeu.go.id/simtrada>

Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/>

Badan Pusat Statistik, <https://bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, <https://kalsel.bps.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, <https://data.kalselprov.go.id/>

Media Center Provinsi Kalimantan Selatan, <https://diskominfomc.kalselprov.go.id>

Kanwil Kemenag Kalimantan Selatan, <https://kalsel.kemenag.go.id>

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin,
<https://diskopumker.banjarmasinkota.go.id>

Kalimantan Post, <https://kalimantanpost.com>

ANTARA News, <https://kalsel.antaranews.com>

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

KAJIAN FISKAL REGIONAL

Kalimantan Selatan

TRIWULAN I TAHUN 2025

© KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

